

EKONOMI PEMBANGUNAN

(Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah)



**Eko Sudarmanto, I Nyoman Wahyu Widiana, Nugroho SBM,
Diana Kartika Dewi, Misfi Laili Rohmi, Fitri S. Kasim, Tri Widayati,
Rina Arum Prastyanti, Fikriyatul Falashifah, Tri Wahyu Rejekiingsih,
Iwan Henri Kusnadi, Derizka Inva Jaswita**

EKONOMI PEMBANGUNAN

**(Tinjauan Manajemen dan Implementasi
Pembangunan Daerah)**

**Eko Sudarmanto
I Nyoman Wahyu Widiana
Nugroho SBM
Diana Kartika Dewi
Misfi Laili Rohmi
Fitri S. Kasim
Tri Widayati
Rina Arum Prastyanti
Fikriyatul Falashifah
Tri Wahyu Rejekiningsih
Iwan Henri Kusnadi
Derizka Inva Jaswita**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKONOMI PEMBANGUNAN

(Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah)

Penulis:

Eko Sudarmanto
I Nyoman Wahyu Widiana
Nugroho SBM
Diana Kartika Dewi
Misfi Laili Rohmi
Fitri S. Kasim
Tri Widayati
Rina Arum Prastyanti
Fikriyatul Falashifah
Tri Wahyu Rejekiningsih
Iwan Henri Kusnadi
Derizka Inva Jaswita

ISBN: 978-623-8102-12-9

Editor: Diana Purnama Sari, S.E., M.E.
Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M. Hum.

Desain Sampul Dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi: Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

website: www.globaleksekutifteknologi.co.id
email: globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan, "Buku Eknomi Pembangunan (Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah)". Buku ini terdiri atas 12 Bab yang membahas tentang konsep, indikator ekonomi pembangunan, Teori-teori pembangunan, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, perubahan struktural dalam pembangunan, unsur pokok dalam kebijakan pembangunan, masalah pemnagunan daerah, masalah dualisme pembangunan, dan potensi pembangunan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Buku ini diharapkan sebagai salah satu sumber referensi belajar yang mudah dipahami oleh pembacanya.

Kami menyadari, bahan Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Penulis, Desember 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Ekonomi Pembangunan.....	1
1.2.1 Definisi Pembngunan.....	1
1.2.2 Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan.....	5
1.3 Ekonomi Pembangunan, Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	6
1.3.1 Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi.....	6
1.3.2 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11
BAB 2 INDIKATOR PEMBANGUNAN.....	13
2.1 Ruang Lingkup Pembangunan.....	13
2.2 Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan.....	16
2.3 Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang Ekonomi.....	17
2.4 Indikator Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Kesehatan.....	21
2.6 Indikator Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Sosial Dan Budaya	25
2.7 Indikator Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Politik.....	26
2.8 Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang Hukum.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 3 TEORI-TEORI PEMBANGUNAN.....	31
3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Teori Pembangunan Linier.....	31
3.2.1 Teori Pembangunan Klasik Adam Smith.....	32
3.2.2 Teori Pembangunan Karl Marx.....	32
3.2.3 Teori Pembangunan WW Rostow.....	35
3.2.4 Teori Pertumbuhan/Pembangunan Harrod-Domar.....	37
3.3 Teori Perubahan Struktural.....	39
3.3.1 Teori Arthur Lewis.....	39
3.3.2 Teori Pola Pembangunan Hollis dan Chenery.....	40
3.4 Teori Ketergantungan.....	41
3.4.1 Model atau Teori Ketergantungan Neo-Kolonial.....	41
3.4.2 Model atau Teori Ketergantungan Paradigma Palsu.....	43
3.4.3 Model atau Teori Ketergantungan Pembangunan Dualistik.....	44

3.5 Teori Pembangunan Kaum Neo-Klasik Penentang Revolusi	45
3.6 Teori-Teori Pembangunan Baru	46
3.6.1 Teori Pertumbuhan atau Pembangunan Endogen.....	46
3.6.2 Teori/Pendekatan Ekonomi Kelembagaan	47
DAFTAR PUSTAKA	54
BAB 4 TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI.....	55
4.1 Pendahuluan	55
4.2 Tahap Pertumbuhan Friedrich List (1844)	56
4.2.1. Mengembara.....	56
4.2.2. Beternak	56
4.2.3. Bertani	56
4.2.4. Pertanian dan Industri Rumah Tangga.....	56
4.2.5. Pertanian, Industri Manufaktur dan Perdagangan	57
4.3 Tahap Pertumbuhan Bruno Hildebrand (1864)	57
4.3.1. Perekonomian Barter	57
4.3.2. Perekonomian uang.....	57
4.3.3. Perekonomian Kredit.....	58
4.4 Tahap Pertumbuhan Karl Bucher (1893).....	58
4.4.1. Perekonomian Rumah Tangga.....	58
4.4.2. Perekonomian Kota.....	59
4.4.3. Perekonomian Nasional	59
4.5 Tahap Pertumbuhan Karl Marx (1818 – 1883)	59
4.5.1. Masyarakat Perbudakan.....	59
4.5.2. Masyarakat Feodal	60
4.5.3. Masyarakat Kapitalis.....	60
4.5.4. Masyarakat sosialis Modern	61
4.5.5. Masyarakat Komunal Primitif	61
4.6 Tahap Pertumbuhan Collin Clark	62
4.7 Tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostow	62
4.7.1. Masyarakat Tradisional.....	63
4.7.2. Prasyarat <i>Take-off</i> (tinggal landas).....	64
4.7.3. Periode <i>Take off</i> (tinggal landas)	66
4.7.4. Menuju kedewasaan.....	68
4.7.5. Konsumsi tinggi dan besar-besaran	69
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB 5 STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI.....	73
5.1 Pendahuluan.....	73
5.2 Hakikat Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi.....	75
5.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Efektif	75
5.2.1 Tahapan Dalam Pembangunan Ekonomi Efektif	78
5.2.2 Strategi Pembangunan Ekonomi Efektif	80
DAFTAR PUSTAKA	83
 BAB 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.....	 85
6.1 Pendahuluan.....	85
6.2 Pengertian perencanaan.....	86
6.3 Unsur dan fungsi perencanaan pembangunan.....	87
6.3.1 Unsur perencanaan pembangunan.....	87
6.3.2 Fungsi Perencanaan Pembangunan	90
6.4 Jenis-jenis perencanaan pembangunan	90
6.5 Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Perencanaan Pembangunan.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
 BAB 7 PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM PROSES PEMBANGUNAN ..	 95
7.1 Pendahuluan.....	95
7.2 Teori Perubahan Struktural	97
7.3 Perubahan Struktur Perekonomian Negara-Negara Berkembang	101
7.4 Perubahan Struktur Ekonomi di Indonesia	104
DAFTAR PUSTAKA	106
 BAB 8 UNSUR-UNSUR POKOK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	 107
8.1 Pendahuluan.....	107
8.2 Dampak Covid 19 bagi Pembangunan di Indonesia.....	111
8.3 Perencanaan Pembangunan Pasca Covid 19.....	113
8.3 Kemajuan Pembangunan Indonesia Tahun 2020 dan Perencanaan Pembangunan Indonesia 2022.....	116
8.3.1 Kemajuan Pembangunan Indonesia Tahun 2020	117
8.3.2 Perencanaan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022	118
DAFTAR PUSTAKA	126
 BAB 9 MASALAH POKOK PEMBANGUNAN DAERAH.....	 131
9.1 Pendahuluan.....	131
9.2 Hakikat dan Paradigma Pembangunan Daerah	133

9.2.1 Definisi Pembangunan Daerah	133
9.2.2 Mekanisme Pembangunan Daerah	133
9.2.3 Pilar dan Pelaku Pembangunan Daerah	135
9.2.4 Pergeseran Paradigma Pembangunan Daerah	137
9.3 Masalah Pokok Pembangunan Daerah	137
9.3.1 Permasalahan Pembangunan Ekonomi	138
9.3.2 Permasalahan Sosial dan Kependudukan.....	141
9.3.3 Permasalahan Sarana dan Prasarana.....	142
9.3.4 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	143
9.3.5 Politik: Pembangunan dan Penguatan.....	144
9.3.6 Permasalahan Khusus: Pemulihan Pasca Covid-19	144
DAFTAR PUSTAKA	146
BAB 10 MASALAH DUALISME PEMBANGUNAN.....	149
10.1 Pendahuluan	149
10.2 Jenis Dualisme.....	150
10.2.1 Dualisme Statis	151
10.2.2 Dualisme Dinamis.....	153
10.2.3 Dualisme Teknologi.....	156
10.3 Produktivitas dan Ketimpangan.....	158
10.4 Dualisme Dan Perkembangan	162
10.5 Konsentrasi Dan Kebijakan	165
DAFTAR PUSTAKA	171
BAB 11 POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH.....	173
11.1 Tantangan Pembangunan Daerah	173
11.2 Potensi Sumber Daya Manusia	175
11.3 Potensi Kemitraan	179
11.4 Potensi Sumber Daya dan Prospek	184
11.5 Strategi Pembangunan Daerah	189
DAFTAR PUSTAKA	192
BAB 12 PARSITIPASI MASARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.....	195
12.1 Pendahuluan.....	195
12.2 Parsitipasi masarakat	197
12.2.1 Fungsi dan Manfaat Parsitipasi masarakat	198
12.2.2 Bentuk-Bentuk Parsitipasi masarakat	200
12.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	203
12.2.4 Tahapan Parsitipasi Masarakat.....	205

12.2.5 Teori Partisipasi : Konsep Parsitipasi masarakat dalam Pembangunan Menurut Para Ahli	207
12.3 Pengertian Perencanaan Pembangunan	210
DAFTAR PUSTAKA	214
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hypotesis Rostow mengenai laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara.....	74
Gambar 5.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Efektif.....	82
Gambar 7.1 Transformasi Ekonomi	102
Gambar 7.2 Perubahan struktur ekonomi Indonesia	110
Gambar 8.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	123
Gambar 8.2 Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022	125
Gambar 8.3 Pemulihan Ekonomi	126
Gambar 9.2 Interaksi Pelaku Pembangunan	142
Gambar 9.3 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi	145

BAB 1

PENDAHULUAN

Oleh Eko Sudarmanto

1.1 Pendahuluan

Ekonomi pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang akan mempengaruhi bagaimana ekonomi pembangunan secara teoritis dapat diterapkan yang didasarkan atas suatu kebijakan.

Ekonomi pembangunan selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji sebagai sebuah ilmu maupun implementasi kebijakan, karena peran ekonomi pembangunan sebagai salah satu indikator keberhasilan kegiatan ekonomi. Ekonomi pembangunan merupakan bidang yang didasarkan pada beberapa macam aspek, seperti ekonomi, politik, budaya dan sosial. Aspek ekonomi yang mendasarinya juga sangat komprehensif, yang meliputi beberapa aspek antara lain: ekonomi keuangan, regional, industri, lingkungan, demografi, kemiskinan, tata kota, dan ekonomi internasional.

1.2 Konsep Ekonomi Pembangunan

1.2.1 Definisi Pembngunan

Dengan perkembangan paradigma pembangunan yang terus mengalami perubahan memberikan peluang terjadinya perbedaan definisi pembangunan dari beberapa perspektif. Namun demikian, perubahan tersebut juga memiliki dampak positif dalam konteks mengakomodir berbagai variabel baru (tambahan) yang dianggap bisa mempengaruhi kesejahteraan. Kondisi ini juga menyiratkan adanya landasan definisi pembangunan yang perlu dikaitkan dengan pencapaian suatu tujuan. Meskipun secara indikator terdapat perbedaan, namun secara objek fokus dan inti nilai tidak jauh berbeda.

Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu kondisi di mana terjadi peningkatan *output* ekonomi secara agregat. Hal ini dapat diukur dengan melihat adanya peningkatan produktivitas pelaku ekonomi yang biasanya diukur melalui pendapatan per kapita, yang secara sederhana memberikan gambaran berapa nilai ekonomi yang diberikan oleh seorang individu pada suatu periode tertentu. Perubahan besaran pendapatan per kapita diasumsikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan juga didefinisikan sebagai perubahan struktural perekonomian dari sektor agrikultura menuju sektor manufaktur dan sektor jasa. Sebagaimana dengan paradigma untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi, bahwa sektor jasa lebih memberikan nilai tambah ekonomi yang besar dibandingkan sektor manufaktur dan sektor agrikultura. Sehingga fokus dari strategi pembangunan adalah percepatan industrialisasi dan peningkatan *output* serta pertumbuhan (*growth*) secara masif. Definisi ini juga fokus pada masalah makroekonomi lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi.

Definisi pembangunan dalam perspektif ekonomi tradisional ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Berdasarkan paradigma baru, pembangunan didefinisikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap populer, institusi nasional yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Perubahan pembangunan harus melibatkan sistem sosial secara utuh, pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, serta mengakomodir semua kepentingan individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut.

Perubahan definisi pembangunan ini menunjukkan bahwa peningkatan *output* sebagaimana perspektif tradisional tetap menjadi fokus pembangunan. Meskipun dalam

implementasinya harus bisa berjalan dengan fokus lain yang mungkin seperti berseberangan dengan fokus tradisional. Terlepas dari perbedaan yang ada, pada dasarnya pembangunan mencoba menciptakan sebuah sistem kehidupan yang lebih baik dan lebih humanis.

Menurut Sukirno (2006), ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang untuk mendapatkan cara mengatasi masalah-masalah tersebut, agar dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari ekonomi pembangunan adalah untuk:

- 1) Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan atau ketiadaan pembangunan di suatu negara.
- 2) Mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi.

Ekonomi pembangunan memiliki perbedaan dengan ilmu ekonomi yang lain seperti ilmu ekonomi makro maupun ilmu ekonomi mikro. Ekonomi pembangunan hingga saat ini belum mempunyai pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh sebagian besar para ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) Kompleksitas masalah pembangunan.
- (2) Banyaknya faktor yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh pembangunan. Sehingga permasalahan yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan meliputi bidang yang sangat luas.

Dan di antara beberapa contoh bidang yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan adalah sebagai berikut:

- Masalah pertumbuhan ekonomi.
- Masalah kemiskinan.

- Masalah pembentukan modal.
- Perdagangan luar negeri.
- Pengerahan tabungan.
- Bantuan luar negeri.
- Masalah pengangguran.
- Masalah migrasi.
- Masalah-masalah bidang pertanian, industri, dan lain sebagainya.

(3) Tidak adanya teori-teori pembangunan yang bisa menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi secara komprehensif.

Para ahli ekonomi hingga saat ini belum mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempunyai peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi, dan bagaimana mekanisme proses pembangunan ekonomi tersebut bisa terjadi. Namun demikian, bukan berarti pola analisis ekonomi pembangunan tidak dapat ditentukan sifat-sifatnya. Pada hakikatnya pembahasan tentang pembangunan ekonomi dapat dikategorikan dalam dua kelompok pembahasan, yaitu:

- a) Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di suatu negara serta implikasi sifat-sifat tersebut terhadap kemungkinan untuk membangun ekonominya.
- b) Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi yang sifatnya memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan sebagai upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi di suatu negara.

Dalam beberapa pembahasan mengenai masalah ekonomi, istilah ekonomi pembangunan sering kali disamakan dengan pembangunan ekonomi. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai makna dan definisi yang berbeda. Di samping itu, masih ada istilah lain yang sering dipertukarkan yaitu pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi.

1.2.2 Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ekonomi pembangunan tidak hanya terdiri dari dasar-dasar ilmu ekonomi tradisional, namun juga mendapat pengaruh dari konsep-konsep lain. Pendekatan yang digunakan ekonomi tradisional seperti maksimalisasi kepuasan dan keuntungan, efisiensi pasar, serta determinasi keseimbangan pasar, juga bisa melandasi awal ekonomi pembangunan yang berdasarkan pada pertumbuhan *output* (*output-based*). Sedangkan pendekatan ekonomi politik yang menggeser paradigma ekonomi pembangunan, memfokuskan diri pada aspek yang lebih luas dan bukan sekadar aspek fisik material.

Ekonomi politik merupakan konteks yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dalam sebuah aktivitas ekonomi. Sehingga memungkinkan sebuah tindakan ekonomi dapat berbeda dari rasionalitas yang dibangun oleh ekonomi tradisional, termasuk dalam konteks pembangunan. Dengan demikian, ekonomi pembangunan memiliki ruang lingkup kajian yang lebih luas jika dibandingkan dengan ekonomi tradisional.

Ruang lingkup ekonomi pembangunan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan politik, namun budaya dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat juga merupakan aspek utama yang mempengaruhi komponen atau determinan kesejahteraan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hidup suatu masyarakat di sebuah komunitas akan dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang diyakininya.

Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang tidak terikat pada bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu ekonomi bisa dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain, karena sifatnya tidak bebas nilai (*value-free*). Namun, akhir-akhir ini perkembangan ekonomi klasik diarahkan menggunakan pendekatan matematis untuk membantu dalam analisis. Secara fungsional pendekatan matematis ini, ternyata belum mampu mengakomodir situasi ekonomi secara utuh karena ekonomi pembangunan memiliki ruang lingkup yang lebih besar dari pada ekonomi tradisional. Pendekatan lain juga diperlukan dalam pengembangan ekonomi pembangunan, antara lain aspek-aspek di luar material fisik yaitu meliputi nilai dan budaya yang ada di masyarakat. Kombinasi ini akan membuat analisis ekonomi pembangunan menjadi lebih komprehensif. Perubahan paradigma ekonomi pembangunan juga mengindikasikan bahwa faktor pendorong transformasi paradigma pembangunan masih sangat mungkin berubah, sebagaimana aspek nilai dan budaya. Hal ini didasarkan pada tujuan ekonomi pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan asumsi yang digunakan oleh teori ekonomi tradisional (*simple economics*).

1.3 Ekonomi Pembangunan, Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

1.3.1 Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu negara untuk memperoleh berbagai cara dalam mengatasi masalah-masalahnya serta mampu membangun ekonominya dengan lebih cepat.

Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk

(masyarakat) suatu negara meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting masyarakatnya, meliputi perubahan sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakatnya dan struktur kegiatan ekonominya.

Berdasarkan definisi tersebut maka pembangunan ekonomi mempunyai 3 (tiga) sifat penting, yaitu:

1) Suatu proses

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses yang dilaksanakan dan berlangsung secara terus-menerus. Artinya pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar antara faktor satu dengan faktor lainnya yang menghasilkan pembangunan ekonomi bisa saling berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi. Sehingga dapat diketahui urutan berbagai peristiwa yang terjadi dalam mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke tahap berikutnya.

2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena dengan peningkatan pendapatan per kapita merupakan suatu cerminan adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan untuk mengetahui laju pembangunan ekonomi suatu negara, dapat diketahui dari tingkat pertambahan *Gross National Product* (GNP) atau *Gross Domestic Product* (GDP), meskipun cara ini masih mengandung beberapa kelemahan. Maka dari itu, beberapa ilmuwan ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi.

3) Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang

Namun demikian bukan berarti pendapatan per kapita suatu negara harus mengalami kenaikan terus-menerus, pada suatu waktu tertentu bisa saja turun untuk sementara

waktu misalnya pada saat terjadi pergolakan politik, menurunnya sektor ekspor atau sektor lainnya. Yang paling utama kegiatan ekonomi negara tersebut secara rata-rata terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dilihat dari ketiga sifat pembangunan ekonomi tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara yang menyebabkan menurunnya peran sektor pertanian dan meningkatnya peran sektor industri, serta meningkatnya pendapatan per kapita. Di samping perubahan-perubahan tersebut, menurut Rostow (1971) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan:

- (a) Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, maupun sosial masyarakat.
- (b) Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yang semula menginginkan banyak anak menjadi membatasi jumlah anak dalam keluarga.
- (c) Perubahan kegiatan investasi masyarakat, yaitu melakukan investasi yang tidak produktif ke yang lebih produktif.
- (d) Perubahan dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang semula ditentukan oleh kedudukan keluarga (suku bangsa) menjadi ditentukan oleh kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan.
- (e) Perubahan pandangan masyarakat yang mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya, menjadi berpandangan bahwa manusia harus mengolah dan mengeksplorasi alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi. Perbedaannya adalah ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pembangunan ekonomi khususnya di suatu negara (berkembang), sedangkan

pembangunan ekonomi atau sering pula disebut perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat (modernisasi).

1.3.2 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi (perkembangan ekonomi) dan pertumbuhan ekonomi sering digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Sebagai contoh, pernyataan yang mengatakan bahwa laju perkembangan ekonomi Indonesia adalah kurang lebih 5% per tahun. Padahal ungkapan tersebut yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi. Secara konsep, istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) berbeda dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Para ahli ekonomi membedakan kedua hal tersebut dengan mengartikan istilah pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan dalam pendapatan nasional, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai berikut:

- a) Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat.
- b) Perkembangan pendapatan per kapita yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya dari tradisional ke modern.

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, sedangkan dikatakan terjadi pembangunan/ perkembangan ekonomi selain terdapat lebih banyak output, juga terjadi perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Di samping itu, dikatakan terjadi pembangunan ekonomi apabila

pertambahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Namun demikian beberapa ahli ekonomi memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GNP atau GDP saja.

Dalam pemakaian istilah yang lebih umum, pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara yang sedang berkembang, yaitu dengan didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: (a) akumulasi kapital; (b) pertumbuhan penduduk; dan (c) kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Chapra, Umer. 1995. Islamic and The Economic Challenge. *Riyadh: International Islamic Publishing House.*
- Huda, Nurul. 2015. Ekonomi Pembangunan Islam. *Jakarta: Prenada Media Group.*
- Karim, Adiwarman A. 2007. Ekonomi Makro Islami. *Jakarta: Rajagrafindo Persada.*
- Mannan, Muhammad Abdul. 1970. Islamic Economics - Theory and Practice. *Islamabad: Dana Bhakti Wakaf.*
- Munthe, Risma N., dkk. 2020. Sistem Perekonomian Indonesia. *Medan: Yayasan Kita Menulis.*
- Purba, Bonaraja, dkk. 2020. Ekonomi Politik - Teori dan Pemikiran. *Medan: Yayasan Kita Menulis.*
- Purba, Bonaraja, dkk. 2021. Ekonomi Internasional. *Medan: Yayasan Kita Menulis.*
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014. Ekonomi Islam. *Jakarta: Rajawali Pers.*
- Rahmadana, Muhammad F. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi. *Medan: Yayasan Kita Menulis.*
- Rostow, Walt Whitman. 1971. The Stage of Economics Growth (2th Editio). *Cambridge: Cambridge Univeersity Press.*
- Sakti, Ali. 2007. Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. *Jakarta: Aqsa Publishing.*
- Sudarmanto, Eko dkk. 2022. Ekonomi Pembangunan Islam. *Medan: Yayasan Kita Menulis.*
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan - Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. *Jakarta: Prenada Media Group.*
- Syarifuddin, dkk. 2020. Ekonomi Syariah. *Bandung: Widina Bhakti Persada.*

Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2006. Economic Development. *United Kingdom: Pearson Education Inc.*

Yustika, Ahmad E. 2012. Ekonomi Kelembagaan. *Jakarta: Gelora Aksara Pratama.*

BAB 2

INDIKATOR PEMBANGUNAN

Oleh I Nyoman Wahyu Widiana

2.1 Ruang Lingkup Pembangunan

Pembangunan ialah sesuatu hasil aktivitas serta program yang terbuat oleh pemerintah buat mendukung kesejahteraan masyarakat. Pembangunan mempunyai tujuan seperti dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yakni kesejahteraan sosial dan pembangunan wilayah yang merata, pendidikan, kesehatan, hukum serta ekonomi yang terccukupi oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan umumnya biasanya telah di rancang terlebih dahulu atau diprogramkan terlebih dahulu melalui perencanaan. Setelah adanya perencanaan yang matang, kemudian dilanjutkan dengan beberapa eksekusi program dan diakhiri dengan evaluasi secara bertahap dari pemerintah. Jadi bisa disimpulkan kalau pembangunan ialah sesuatu proses pergantian dengan upaya seta terencana kearah yang lebih baik.

Tujuan utama dari pembangunan merupakan buat tingkatan taraf hidup warga. Berbagai macam usaha terus dibesarkan dalam mencapai tujuan bersama ialah, tingkatan kesejahteraan warga. Pembangunan hendak berjalan lancar serta sukses, kala memperoleh reaksi dari warga. Warga wajib bersinergi bersama pemerintah guna mewujudkan pembangunan secara totalitas. Pembangunan yang biasanya dilakukan adalah mengenai mobilisasi, serta fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti jalan tol, jembatan, serta infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat lebih mudah dan efisien. Pembangunan umumnya

tidak langsung nampak, hendak memerlukan waktu yang lumayan lama dari tahun ke tahun.

Pemikiran menimpa pembangunan dimulai dengan membandingkan gagasan pembangunan, modernisasi serta industrialisasi. Pergantian struktur ekonomi meliputi kenaikan ataupun perkembangan yang pesat dalam produksi di zona industri serta jasa, serta donasi yang terus menjadi besar terhadap pemasukan nasional. Pergantian budaya, di sisi lain, kerap berhubungan dengan pergantian nilai serta norma yang dianut warga, dan semangat nasionalisme serta timbulnya nasionalisme. Kala pembangunan berlangsung dalam seluruh lapisan masyarakat inti utama dari pembangunan adalah proses terjadinya kemajuan, perkembangan serta diversifikasi.

Pembangunan dibagi menjadi dua yaitu, pembangunan fisik serta pembangunan non fisik. Pembangunan fisik biasanya dilakukan oleh pemerintah secara rutin misalnya adalah infrastruktur baik bangunan fisik atau institusi. Pembangunan fisik ini merupakan pembangunan langsung atau pembangunan yang terlihat mata. Pembangunan fisik infrastruktur, gedung, fasilitas, dan sebagainya. Pembangunan non fisik merupakan salah satu jenis pembangunan yang tidak terlihat namun dapat dirasakan oleh masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi.

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha yang terencana dan terprogram. Apa yang dilakukan negara secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat lebih baik. Di satu sisi, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Perkembangan Ekonomi berbasis sumber daya yang terabaikan. Kelestarian lingkungan pada akhirnya berdampak negatif terhadap lingkungan. Karena pada dasarnya memiliki sumber daya alam dan lingkungan. Artinya, ekspansi yang tidak Memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, kata keberlanjutan itu sendiri masih baru. Perhatian diberikan pada keberlanjutan, tetapi muncul selama beberapa dekade. Sejak Malthus menjadi prihatin tentang ketersediaan tanah pada tahun 1798. Pertumbuhan dalam kesimpulannya bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas. Melalui ketersediaan sumber daya alam dengan ketersediaan sumber daya alam. Arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam yang tidak terbatas selalu berkesinambungan. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu penting yang perlu ditangani. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Perkembangan. Pembangunan berkelanjutan secara inheren ditujukan untuk mencari keadilan. Pembangunan antara generasi sekarang dan yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk pemerataan hasil pembangunan di antara berbagai kelompok dan strata masyarakat dan antar generasi. Prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ramah lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan berarti memastikan bahwa pembangunan selaras dengan lingkungan dan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Fitur ini diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan disengaja untuk mengintegrasikan lingkungan, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Sifat pengaturan sumber daya alam dan lingkungan yang saling terkait membutuhkan metode dan mekanisme pembangunan yang memperhitungkan keterkaitan ini. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan di satu sektor harus memperhatikan dampaknya terhadap pembangunan di sektor

lain. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan hubungan antara individu sebagai entitas sosial dan lingkungan sosialnya. Pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang mandiri, tetapi juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Isu lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari mekanisme pasar yang gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut untuk menyeimbangkan pembangunan sosial dan lingkungan dengan pembangunan ekonomi. Intervensi dapat dipimpin oleh organisasi segitiga serupa, yaitu pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil. Terdapat hubungan “check and balance” peer-to-peer antara ketiga kekuatan tersebut sehingga kepentingan ketiga kekuatan tersebut tetap seimbang.

2.2 Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan

Kala tahun 1950- an serta dini 1960- an, pembangunan bermula pada terpusat kepada mengoptimalkan perkembangan ekonomi dengan penumpukan modal serta industrialisasi. Akibat ketidakpercayaan terhadap mekanisme pasar dan kegagalan pasar, pemerintah dengan sistem perencanaan terpusat dalam tingkatan investasi modal fiskal, menggunakan surplus tenaga kerja, meningkatkan industri substitusi impor serta tingkatan jumlah tenaga kerja asing. Strategi pembangunan berfokus pada pembangunan ekonomi, khususnya perkembangan ekonomi, pembangunan wilayah lain diperuntukan buat mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi serta menjajaki laju pembangunan. Pembangunan terfokus pada aspek pertumbuhan mempertaruhkan aspek pemerataan serta kebalikannya. Kebijakan bisa memesatkan perkembangan ekonomi yang besar dengan harapan pada

kesimpulannya hendak tercapai pemerataan hasil pembangunan.

Pembangunan bersumber pada pendekatan kebutuhan bawah selaku sesuatu pemecahan. Perpindahan fokus dari pembuatan modal fisik selaku modal utama pembangunan ke pembuatan modal manusia. Pembangunan tahun 1950- an memandang sesuatu strategi umum serta universal buat membongkar permasalahan negeri lagi tumbuh. Kajian berfokus kepada ciri khusus negeri bersumber pada keadaan empiris dalam bermacam anggapan menganalisis tiap isu sumber energi alam. Hingga dari itu, dibutuhkan sesuatu kehati- hatian dalam mengalami kasus lingkungan semacam demografi, kelembagaan, serta ketersediaan kewirausahaan. Pembangunan merupakan sesuatu proses mencakup pergantian mendasar revisi struktur sosial, sikap warga serta sistem kelembagaan, dan aspek ekonomi semacam kenaikan pemasukan per kapita serta pemerataan pemasukan dan pengurangan kemiskinan.

2.3 Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang Ekonomi

Terdapat beberapa penanda pembangunan ekonomi dianggap berhasil dalam suatu negara, namun ini akan berbeda. Pada negara yang belum sejahtera, dimensi pembangunan dapat sangat jelas terlihat pada kebutuhan bawah semacam listrik pedesaan, pelayanan kesehatan pedesaan, serta harga kebutuhan bawah yang rendah. Penanda pembangunan beralih ke aspek sekunder serta tersier di negara- negara yang sanggup penuh. Terdapat banyak penanda ekonomi yang ada buat organisasi internasional semacam pemasukan per kapita(GNP ataupun PDB), struktur ekonomi, urbanisasi serta tabungan bruto.

1. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan sesuatu penanda ekonomi makro buat mengukur perkembangan ekonomi, baik dari sisi GNP maupun PDB. Dalam perspektif ekonomi, penanda terukur dari kesejahteraan manusia dan kemakmuran sesuatu komunitas. Pendapatan perkapita jadi sesuatu penanda ekonomi makro dalam tolak keberhasilan suatu pembangunan. Kenaikan pendapatan nasional menjadikan sesuatu tujuan pembangunan di sebagian negeri. Seolah-olah kesejahteraan serta kemakmuran sesuatu warga secara otomatis ditunjukkan lewat kenaikan pendapatan nasional. Seringkali dianalogikan, ketika terjadinya kenaikan pendapatan nasional dalam suatu negara maka negara tersebut dianggap sejahtera, karena setiap lapisan masyarakatnya menyumbang dari sebagian pendapatannya melalui distribusi pajak sehingga dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar utama dalam hidup. Ketika kebutuhan ini tercukupi dan bisa membayar pajak, maka bisa dianggap masyarakat tersebut sejahtera dari sisi ekonomi.

Pendapatan perkapita digunakan dalam pembangunan ekonomi karena berpengaruh kepada stabilitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan perkapita menunjukkan stabilitas ekonomi suatu negara yang bagus. Ada hubungan yang sangat erat antara pendapatan perkapita serta pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang muncul berdampak pada pembangunan ekonomi. Jika dikaitkan dengan urbanisasi, akan lebih banyak menarik tenaga kerja ke perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika pendapatan perusahaan akan terus meningkat, yang akan mempengaruhi pekerjaannya. Jika karyawan terbukti meningkatkan kualitas pekerjaannya, permintaan juga akan meningkat

dan oleh karena itu pendapatan per kapita juga akan meningkat.

2. Struktur Ekonomi

Kenaikan pendapatan perkapita menjelaskan mengenai pergantian struktural ekonomi serta kelas sosial. Biasanya ketika ada pembangunan ekonomi yang berkembang, struktur ekonomi pun akan berkembang pula. Mungkin yang dulu struktur ekonominya masih tradisional kemudian dihadapkan dengan berbagai teknologi yang ada, maka akan membuat struktur ekonomi berkembang dengan adanya teknologi tersebut. Hal ini akan berujung pula kepada pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Struktur ekonomi ini juga akan bisa mengindikasikan apakah pembangunan tersebut sudah berdampak atau bermanfaat kepada masyarakat sekitar atau tidak. Implikasi dari pembangunan ini akan meluas kepada kesempatan kerja, peluang kerja serta lapangan pekerjaan yang tersedia.

3. Urbanisasi

Urbanisasi ialah bertambahnya penduduk yang tinggal di perkotaan daripada penduduk di pedesaan. Ketika penduduk perkotaan nol, hingga tidak hendak terjalin sesuatu urbanisasi. Industrialisasi di beberapa negeri menampilkan pangsa penduduk perkotaan berbanding lurus dengan laju industrialisasi.

Urbanisasi adalah perpindahan orang dari desa ke kota, dan semakin banyak orang pindah ke kota, urbanisasi digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Ini menunjukkan bahwa ekonomi terapan adalah konsep ekonomi makro ketika ada begitu banyak orang pedesaan

yang urbanisasi di daerah perkotaan. Misalnya, ada banyak peluang kerja untuk mendukung peralatan mesin canggih, dan begitu banyak pekerjaan sehingga perusahaan membutuhkan pekerjaan baru.

4. Tabungan

Pengembangan zona manufaktur/ industri pada sesi industrialisasi memerlukan investasi serta modal. Modal finansial sesuatu sumber utama proses industrialisasi warga. Warga yang produktif, modal usaha ini bisa dibiayai lewat tabungan swasta serta pemerintah. Tabungan berkaitan dengan struktur perekonomian, dan tabungan itu sendiri adalah modal perekonomian. Semakin tinggi tingkat tabungan kotamadya, semakin maju perekonomiannya.

Perkembangan masalahnya sewaktu sektor pertanian beralih kepada sektor industri, maka produktivitas akan meningkat dan begitu pula outputnya. Dengan kata lain, tabungan adalah aset perekonomian. Kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah tabungan ketika struktur ekonomi berubah, semakin banyak ekonomi yang tumbuh.

5. Indeks Mutu Hidup

Indeks Mutu Hidup bermanfaat buat mengukur kesejahteraan serta kekayaan warga. Penanda makroekonomi kerap sekali kandas membagikan gambaran kesejahteraan warga dalam mengukur sesuatu keberhasilan ekonomi. Contohnya kala pemasukan nasional sesuatu negeri bertambah tanpa tingkatan khasiat jaminan sosial. Penanda bisa dihitung lewat angka harapan hidup pada umur satu tahun, angka kematian balita serta angka melek huruf. Penanda angka harapan

hidup serta angka kematian bayi memperlihatkan status gizi, status kesehatan, serta area keluarga anak serta bunda yang berhubungan erat dengan kesejahteraan keluarga. Pembelajaran lewat literasi merepresentasikan jumlah penduduk dalam hasil pembangunan.

Indeks kualitas hidup menjadi tiga bagian yakni, angka harapan hidup angka melek huruf, serta angka kematian bayi. Indeks kualitas hidup berpengaruh pada kualitas pembangunan ekonomi. Ketika indeks kualitas hidup tinggi akan dapat berdampak kepada perekonomian yang baik pula. Ketika suatu negara mempunyai angka harapan hidup tinggi maka secara tidak langsung perkembangan ekonomi yang bagus dalam negara tersebut. Kedua adalah angka kematian, jika angka kematian bayi menurun maka dapat dikatakan perkembangannya baik. Ini dapat dijelaskan melalui adanya pelayanan kesehatan, SDM tenaga medis yang memadai, fasilitas kesehatan serta pelayanan pelayanan gizi, dan kesehatan yang baik dari ibu hamil hingga bayi baru lahir. Ketiga, jika angka melek huruf naik, maka pembangunan ekonomi baik. Hal ini menunjukkan semakin banyak lembaga untuk mempromosikan literasi di kalangan warga.

2.4 Indikator Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Kesehatan

Terdapatnya pembangunan zona kesehatan mengarah kepada pembangunan nasional, semacam mutu kesehatan, pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan. Kala warga sehat serta memiliki sarana dan fasilitas yang menunjang dalam program kesehatan hendak bisa tingkatkan harapan hidup warga. Tolak ukur indikato keberhasilan dalam bidang kesehatan selaku sikap proaktif dalam memelihara serta

tingkatkan kesehatan, menghindari efek terbentuknya penyakit. Suasana hendak jadi kesempatan tetapi bisa pula jadi suatu hambatan untuk penanggungjawab program buat bisa menggapai sasaran pergantian sikap. Berbagai permasalahan kesehatan kerap kali dipengaruhi oleh indikator sosial budaya, ekonomi, pembelajaran serta yang lain.

Pembangunan kesehatan ialah salah satu program proaktif serta preventif lewat paradigma kesehatan. Kesehatan seseorang bunda umumnya jadi sesuatu patokan, yang bisa diukur lewat ketersediaan sarana kesehatan semacam tenaga kesehatan ialah bidan, angka harapan hidup, jumlah orang yang berkeluarga berencana serta angka kematian balita dan berbagai perihal yang berhubungan dengan kesehatan ibu. Pembangunan dalam kesehatan bermanfaat membagikan pelayanan kedokteran ialah, tidak berubah- ubah serta hemat bayaran. Puskesmas bisa menjangkau susunan warga sampai ke pelosok. Pemerintah gencar memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan serta kenaikan derajat kesehatan warga.. Pendekatan buat memperhitungkan keberhasilan pembangunan merupakan status kesehatan. Hingga, derajat kesehatan merupakan perihal prioritas dalam rangka penilaian hasil penerapan program kesehatan. Analisis status kesehatan absolut dibutuhkan dalam penilaian keberhasilan pembangunan kesehatan serta perencanaan.

Dalam tingkatkan taraf hidup bidang kesehatan, kesehatan bunda memperoleh atensi spesial. Tiap persalinan didampingi tenaga kedokteran terlatih. Seluruh perempuan umur produktif memiliki akses dalam penyembuhan komplikasi keguguran. Komplikasi kehamilan serta persalinan tidak senantiasa bisa diprediksi sehingga bunda berbadan dua harus memperoleh sarana perawatan kebidanan darurat. Pemicu utama kematian bunda umumnya perdarahan, peradangan, eklampsia, partus lama serta komplikasi aborsi.

Hingga, asuhan kebidanan oleh tenaga kedokteran jadi perihal berarti sebab sebagian besar komplikasi terjalin saat sebelum serta setelah kelahiran.

2.5 Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang Pendidikan

Terdapat 2 penanda utama pembangunan zona pembelajaran, ialah penanda pembangunan pembelajaran serta penanda keberhasilan pembangunan pembelajaran. Penanda kemajuan pembangunan pembelajaran merupakan akses penduduk umur sekolah ke lembaga pembelajaran, pemahaman warga buat menyekolahkan anak, dan lainnya. Singkatnya, pendidikan adalah produk masyarakat. Pendidikan merupakan proses mewariskan pengetahuan, sikap, keyakinan, keterampilan, dan aspek perilaku. Pendidikan dapat terwujud dari hasil dari hubungan kita dengan orang lain, baik dalam ruang lingkup keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat luas. Pada dasarnya pendidikan dapat menunjang kemajuan hidup seseorang secara berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan sudah kita dapatkan sejak kita masih di keluarga dan terus berkembang. Di dalam keluarga anak didik dan pendidikan terpenting bagi perkembangan individu anak adalah ketika masa seorang anak dalam ruang lingkup keluarga.

Adanya teknologi serta informasi menjadikan perubahan peran sekolah dalam Lembaga pendidikan. Sekolah tidak hanya sebagai pusat belajar karena kegiatan belajar jaman sekarang sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Peran guru tidak lagi menjadi sumber mendapatkan pengetahuan, karena pengetahuan dapat didapatkan dalam teknologi informasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pemerintah daerah diberi wewenang

untuk mengarahkan, membimbing, mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta wajib memberikan pelayanan dan fasilitas untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga negara.

Ketika berbicara peran pendidikan dalam pembangunan nasional, maka muncul model fungsional yang berasumsi keterbelakangan dan kemiskinan disebabkan oleh negara tidak memiliki SDM pengetahuan, keterampilan, dan sikap modern. Lembaga pendidikan formal sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan keterampilan. Model pendidikan input-proses-output telah mengubah sekolah menjadi proses yang produktif. Mahasiswa dianggap sebagai pendatang baru di pabrik. Guru, kurikulum dan fasilitas diperlukan sebagai alat input.

Pembuat kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai mesin pertumbuhan, mesin dan lokomotif pembangunan. Sebagai mesin pembangunan, pendidikan harus mampu menghasilkan penemuan dan inovasi yang merupakan penggerak fundamental pembangunan. Sejalan dengan peran pendidikan sebagai mesin pertumbuhan dan faktor penentu dalam pembangunan masyarakat, bentuk pendidikan yang paling tepat adalah sistem pendidikan satu arah, yang diselenggarakan secara terpusat untuk memfasilitasi pendidikan menuju peningkatan pembangunan nasional. Lembaga pendidikan akan mampu menciptakan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Agar proses pendidikan menjadi efektif dan efektif, pendidikan harus disusun secara sistematis dan terkelola.

2.6 Indikator Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Sosial Dan Budaya

Ruang lingkup Pembangunan sosial terpusat kepada kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kebijakan sosial yakni peningkatan pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan sosial berhubungan dengan pembangunan manusia serta kesejahteraan sosial. Meskipun secara konseptual tumpang tindih, dalam praktiknya ketiganya relatif berbeda dalam kepadatan dan luas. Pembangunan sosial berfokus kepada meningkatnya kualitas hidup masyarakat luas, pembangunan manusia kepada modal manusia yang meningkat melalui dua indikator utama. Pendidikan (misalnya melek huruf) dan kesehatan (misalnya harapan hidup). Pembangunan kesejahteraan sosial, di sisi lain, tergantung pada peningkatan modal sosial yang tercermin dalam indikator fungsi sosial, seperti kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, memenuhi peran sosial, dan mengatasi guncangan. .dan tekanan. kehidupan. Penerima manfaat dari jasa pembangunan sosial meliputi individu dan masyarakat dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, tetapi penerima manfaat utama dari jasa pembangunan sosial sering disebut Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Indonesia.

Dalam hal mengkaji model pembangunan nasional, termasuk model pembangunan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sering diungkapkan dengan cara yang kabur dan beragam, mengandung konotasi positif dan negatif. Bantuan sosial dalam arti sempit didefinisikan sebagai bantuan keuangan dan manfaat lain untuk kelompok yang kurang beruntung. Istilah kesejahteraan memiliki banyak arti Perlindungan sosial sering dikaitkan dengan, dan bahkan tumpang tindih dengan, bidang lain yang sering

diklasifikasikan sebagai sektor sosial, seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan. Ini diterjemahkan sebagai "kebahagiaan" atau "keadaan berlimpah". Namun, kesejahteraan juga berarti "penyediaan layanan sosial oleh negara" dan "penyediaan layanan khusus, khususnya jaminan sosial berdasarkan kebutuhan, kepada yang membutuhkan". tentang orang miskin. Tujuan utama dari bantuan sosial adalah pengentasan kemiskinan. Yang dimaksud dengan "berbagai kemiskinan" di sini bukan hanya "kemiskinan materi" seperti rendahnya pendapatan (kemiskinan moneter) dan kurangnya tempat tinggal, tetapi juga berbagai masalah kemiskinan.

2.7 Indikator Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Politik

Pembangunan didasarkan pada indeks yang dirancang untuk melindungi kekuatan politik pemerintah dari mata publik, mengabaikan kebutuhan pembangunan manusia. Pemerintah mendukung kewenangan daerah pemilihan untuk menjalankan misi pembangunan. Pembangunan manusia seringkali tidak sejalan dengan masalah. Misalnya, dalam menentukan taraf hidup, pemerintah mengeluarkan pengeluaran untuk satu orang untuk memenuhi kebutuhan minimum, yaitu kalori untuk subsisten (2.100 kalori), Rp 5.500/orang per hari. Asupan kalori bukan satu-satunya kebutuhan pokok penduduk. Semua penduduk memiliki jaminan hukum kehidupan yang baik (makanan, pakaian dan perumahan). Ketika kita menetapkan angka 5.500 rupiah/hari di garis kemiskinan, kita katakan itu tidak manusiawi. Menggunakan tolok ukur ini akan menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan kebutuhan selain kalori, seperti ketersediaan perumahan, sandang, kebutuhan pendidikan, dan standar pendukung lainnya.

Sektor kesehatan Indonesia menghadapi masalah serius dengan ledakan penduduk (hasil sensus 2010), yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan manusia. Beberapa permasalahan tercermin dalam kehidupan ibu dalam keluarga miskin dengan banyak anak, yang berbanding lurus dengan rendahnya kemampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi dan gizinya. Timbulnya perbedaan ganda antara harapan dan kenyataan yang terjadi di Indonesia, seperti rendahnya kualitas hidup akibat rendahnya pendidikan. Data BPS 2010 menjelaskan usia sekolah sebesar 5,7 tahun (tingkat sekolah dasar). Ketika usia 5,7 tahun, seseorang dikatakan masih dalam hal pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah berujung kepada semakin kompleksnya masalah kemiskinan dan pengangguran.

2.8 Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang Hukum

Keberadaan hukum dan kelembagaan di Indonesia harus direformasi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera serta berkeadilan. Kebijakan pembangunan legislatif berguna untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik. Ada 7 strategi dan arah kebijakan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan adil. Ketujuh strategi tersebut antara lain meningkatkan efektivitas hukum dan meningkatkan kinerja lembaga hukum. Menghormati, memajukan dan menerapkan hak asasi manusia (HAM); Perbaikan bersih tanpa korupsi, kolusi, dan otokrasi (KKN); Meningkatkan kualitas pelayanan publik; Perbaikan implementasi. Ketujuh strategi tersebut harus berdampak pada kualitas pelayanan publik, keadilan dan kepastian hukum. Strategi peningkatan kapasitas penegakan hukum berfokus pada peningkatan pengawasan eksternal dan

internal terhadap upaya penegakan hukum. Pemerintah harus mencerminkan legislasi yang kuat dan kredibel serta mencegah KKN memperkuat integritas lembaga negara dan meningkatkan pengawasan publik.

Agenda legislasi nasional merupakan agenda penting yang perlu mendapat perhatian karena dua alasan. Pertama, Indonesia adalah negara yang taat hukum, sehingga segala tindakan pemerintah yang berupa undang-undang harus diartikulasikan sebagai dasar keabsahannya. Kedua, bidang hukum itu sendiri, termasuk aspek pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum, merupakan salah satu tantangan reformasi yang masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan upaya kolektif untuk menyelesaikannya. Mengingat begitu kuatnya kedudukan dan kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 akibat penguatan sistem Presidensial melalui amandemen UUD 1945, maka harapan agar legislasi dalam negeri Presiden berhasil dikembangkan sangat beralasan. Presiden Indonesia di bidang hukum bahkan lebih berkuasa dari presiden Amerika Serikat. Mengenai legislasi, Presiden Indonesia memiliki 50% kekuasaan legislatif (UU). Presiden juga memiliki kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang. Dalam penegakan hukum, semua pejabat pemerintah adalah penegak hukum. Yang dilakukan pemerintah adalah menegakkan hukum. Presiden juga memainkan peran penting dalam bidang penegakan hukum, karena dua lembaga penegak hukum terpenting melapor kepadanya: polisi dan Kejaksaan. Selain itu, Presiden juga mengisi jabatan di instansi lain yang terkait dengan penegakan hukum dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta
- Tambunan, Tulus T.H. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro; Mustopadidjaja. 1984. Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan nasional. Jakarta.

BAB 3

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

Oleh Nugroho SBM

3.1 Pendahuluan

Pembangunan diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak, terutama pemerintah, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Pembangunan sebenarnya meyangkut dimensi atau bidang yang sangat luas yaitu meliputi bidang Ideologi ,Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Namun pada umumnya di banyak negara, pembangunan dititikberatkan di bidang ekonomi.

Pembangunan yang dilakukan di banyak negara dilandasi oleh teori-teori pembangunan yang sudah berkembang sejak lama dari waktu ke waktu sampai di masa kini. Ada berbagai ahli yang mencoba mensistemasi perkembangan teori-teori pembangunan. Dalam bab ini Teori-Teori Pembangunan dilakukan berdasarkan kombinasi dari pengklasifikasian yang dilakukan oleh beberapa penulis.

3.2 Teori Pembangunan Linier

Menurut Teori-Teori Pembangunan Linier, pembangunan adalah sebuah proses yang harus melalui tahapan-tahapan secara urut atau linier. Ada empat teori yang termasuk dalam kategori teori pembangunan linier yaitu Teori Pembangunan Klasik Adam Smith, Teori Pembangunan Karl Marx, Teori Pembangunan WW Rostow, dan Teori Pembangunan Harrod Domar.

3.2.1 Teori Pembangunan Klasik Adam Smith

Adam Smith membagi tahap perkembangan masyarakat yang mempengaruhi pembangunan ekonomi menjadi lima tahap yaitu: masa berburu, masa bertani dan beternak, masa berdagang, dan masa industrialisasi. Pada tahap perdagangan khususnya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional maka spesialisasi menjadi hal penting bagi tiap negara yang ingin maju. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berspesialisasi pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif yang juga akan diekspor ke negara-negara lain, sedangkan untuk produk-produk yang negara tidak mempunyai keunggulan komparatif akan lebih baik diimpor.

Pada tahap perekonomian modern yang digerakkan oleh industrialisasi maka modal- menurut Adam Smith- memegang peran penting. Akumulasi modal dilakukan masyarakat melalui tabungan. Pada tahap industrialisasi spesialisasi tenaga kerja juga penting di samping modal. Menurut Adam Smith perekonomian yang baik adalah yang digerakkan oleh “Tangan Tak Kelihatan” yaitu mekanisme pasar. Peran pemerintah sangatlah terbatas.

Pada akhirnya karena keterbatasan sumberdaya alam dan modal maka pembangunan ekonomi akan stagnan pada tingkat tertentu. Tingkat tertentu itu disebut sebagai tahap stasioner.

3.2.2 Teori Pembangunan Karl Marx

Karl Marx membagi tahap pembangunan atau tahap perkembangan masyarakat menjadi dua tahap. Pertama, masyarakat di bawah sistem kapitalisme. Kedua, masyarakat di bawah sistem sosialisme-komunisme.

Masyarakat kelas bawah – khususnya kaum buruh- di bawah sistem kapitalisme sangat menderita sebab mereka dieksploitasi oleh kaum pemilik modal. Caranya adalah

dengan menekan upah buruh semurah mungkin sehingga biaya produksi menjadi sangat rendah dan dengan demikian laba atau keuntungan yang diperoleh kaum pemilik modal sangat besar. Penderitaan kaum buruh di bawah sistem kapitalisme ini- menurut Karl Marx- harus diubah yaitu dengan mengganti sistem kapitalisme dengan sistem sosialisme-komunisme.

Ada beberapa perbedaan dari sistem Kapitalisme dan sosialisme. Perbedaan antara sistem Kapitalisme dan Sosialisme tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perbedaan Sistem Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem Kapitalisme	Sistem Sosialisme
1. Hak milik pribadi atas faktor-faktor produksi diakui	1. Hak milik pribadi atas faktor-faktor produksi tidak diakui (semua faktor produksi dimiliki oleh negara)
2. Persaingan usaha bebas tetapi dibatasi oleh Undang-undang Anti Trust (Anti Monopoli)	2. Tidak ada persaingan
3. Balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja berupa materi	3. Balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja berupa materi dan non-materi (misal penghargaan atau tanda jasa)
4. Prinsip keadilannya: setiap orang menerima balas jasa sesuai produktivitasnya dan bisa melebihi kebutuhannya	4. Prinsip keadilannya: setiap orang menerima balas jasa yang sama dan tidak
5. Kadar campurtangan	

Sistem Kapitalisme	Sistem Sosialisme
pemerintah dalam perekonomian kecil dan swasta yang dominan	melebihi kebutuhannya 5. Kadar campurtangan pemerintah dalam perekonomian sangat besar dan swasta perannya sangat kecil

Sumber: dikutip dari berbagai sumber

Ada 2 (dua) cara mengganti sistem kapitalisme dengan sistem sosialisme-komunisme. Cara pertama adalah dengan membiarkan saja sistem kapitalisme karena sistem kapitalisme akan dengan sendirinya bubar atau dalam istilah Karl Marx akan runtuh dari dalam.. Mengapa kapitalisme bisa runtuh dari dalam? Menurut Karl Marx, jika pengusaha menekan upah buruh maka daya beli buruh akan rendah. Padahal di sisi yang lain butuh adalah juga konsumen dari produk yang dihasilkan oleh pengusaha atau pemilik modal. Akibat selanjutnya adalah produk yang dibuat oleh pengusaha tidak laku sehingga akan bangkrut dan jatuh miskin. Pada akhirnya kaum buruhlah yang mengganti kaum pengusaha memimpin negara.

Menurut Karl Marx menunggu kapitalisme runtuh dari dalam akan terlalu lama. Agar pergantian sistem kapitalisme ke sistem sosialisme maka harus dilakukan dengan melakukan revolusi.

Ada dua kritik terhadap teori dan praktek pembangunan dari Karl Marx. Pertama, cara revolusi di berbagai negara untuk mengganti sistem kapitalisme dengan sistem sosialisme-komunisme terlalu besar “biaya” nya berupa korban jiwa dan juga kerusakan-kerusakan fisik yang

terjadi. Kedua, ternyata dalam prakteknya dalam sistem sosialisme-komunisme tetap terjadi ketidakadilan atau kesenjangan pendapatan dan ekonomi. Para pembesar partai tetap menikmati keistimewaan dan mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibanding pendapatan masyarakat biasa. Slogan “Sama Rasa Sama Rata” ternyata berhenti pada slogan dan tidak pernah dipraktekkan di kenyataan.

3.2.3 Teori Pembangunan WW Rostow

WW Rostow (1960) membagi tahap-tahap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ke dalam lima tahap yaitu: (a) Masyarakat Tradisional, (b) Prasyarat untuk Lepas Landas, (c) Lepas Landas, (d) Gerak Ke arah Kedewasaan, dan (f) Konsumsi Masa yang Tinggi.

a. Masyarakat Tradisional (*Traditional Society*)

Ada beberapa ciri dari masyarakat tradisional menurut WW Rostow, antara lain: (1) produksi dilakukan dengan teknologi yang sederhana dan sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri (subsisten), (2) sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian, dan (3) masyarakat masih menganut secara turun temurun adat istiadat dan kebiasaan yang tidak rasional dan tidak produktif (tidak efisien).

b. Prasyarat untuk Lepas Landas (*Pre Condition to Take Off*)

Perekonomian atau masyarakat yang berada pada tahap lepas landas mempunyai ciri-ciri antara lain: (1) sektor pertanian yang produktif dan modern memegang penting untuk menunjang perkembangan sektor yang lain terutama sektor industri dalam hal menyediakan pangan yang cukup serta petaninya sebagai pasar bagi produk yang dihasilkan sektor industri, (2) Surplus yang dihasilkan oleh sektor pertanian juga digunakan untuk pembangunan

infrastruktur sosial ekonomi, dan (3) Sektor industri mulai berkembang dan menggeser dominasi sektor pertanian dalam perekonomian.

c. Tinggal Landas (*Take Off*)

Pada tahap tinggal landas maka perekonomian akan mempunyai beberapa ciri, antara lain: (1) kenaikan investasi menjadi sekitar 10 persen dari pendapatan nasional, (2) Sumber utama investasi berasal dari dalam negeri, (3) berkembangnya sektor industri secara lebih massif atau lebih cepat sehingga menjadi sektor pemimpin (leading sector). Sektor pemimpin akan menggerakkan pertumbuhan sektor-sektor yang lain. (4) berkembangnya penggunaan teknologi yang modern dalam proses produksi, dan (5) adanya kelembagaan di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang menunjang perilaku hidup modern dan pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady).

d. Gerak Ke Arah Kedewasaan (*Drive to Maturity*)

Pada tahap gerak ke arah kedewasaan ada beberapa ciri penting, antara lain: (1) sektor industri berkembang dengan lebih cepat, (2) muncul kritik-kritik terhadap industrialisasi karena dampak negatifnya, (3) peran pemilik modal dalam proses industrialisasi yang menonjol atau penting digantikan oleh para manajer profesional, dan (4) sudah mulai muncul sektor-sektor pemimpin baru menggantikan atau menyamai sektor industri.

e. Konsumsi Massa Tinggi (*High Mass Consumption*)

Pada tahap konsumsi massa tinggi, menurut WW Rostow, ada beberapa cirinya, antara lain: (1) perhatian sudah tidak pada kegiatan produksi tetapi pada distribusi atau konsumsi, (2) konsumsi sebagai indikator tingkat kesejahteraan juga diusahakan merata di setiap lapisan masyarakat, dan (3) mulai ada ekspansi kekuasaan maupun pasar ke luar batas negara atau ke luar negeri.

Teori pembangunan WW Rostow ini mendapatkan kritik dari Simon Kuznets. Beberapa kritik Simon Kuznets terhadap Teori Pembangunan WW Rostow antara lain:

1. Ciri-ciri setiap tahap dalam pembangunan ekonomi seperti diuraikan oleh WW Rostow ternyata sangat sulit diuji secara empiris
2. Antara satu tahap dengan tahap yang lain ternyata batasannya secara empiris kabur
3. Setiap negara harus melalui setiap tahap secara linier, padahal dalam praktek empiris bisa saja suatu negara melompat dan tidak harus urut melalui tahap demi tahap.

3.2.4 Teori Pertumbuhan/Pembangunan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan/Pembangunan Harrod-Domar dimasukkan ke dalam kategori teori pertumbuhan atau pembangunan linier karena ada tahapan pertumbuhan atau pembangunan hingga mencapai titik akhir yang disebut Harrod-Domar sebagai tingkat pertumbuhan atau pembangunan yang mantap atau stabil (*steady state* atau *steady growth*).

Teori pertumbuhan/pembangunan ekonomi ini dikembangkan oleh dua orang, yaitu R.F. Harrod dan Evsey Domar. Keduanya merupakan seorang ahli ekonomi yang membangun teori-teori berdasarkan pengalaman dari perekonomian negara-negara maju. Harrod dan Domar mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi secara terpisah. Harrod memaparkan teorinya di tahun 1939 pada *Economic Journal*, sedangkan Domar di tahun 1947 dalam jurnal *American Economic Review*.

Teori Harrod-Domar berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara agar perekonomian dapat berkembang

untuk jangka panjang secara mantap (*steady growth*). Seperti teori pada umumnya, teori ini berusaha memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya di teori John Maynard Keynes tentang tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting. Investasi mempunyai 2 (dua) peran penting dalam perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat.

Dari kedua peran investasi tersebut berarti investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa betapa pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan negara untuk membiayai dan memperbaiki barang-barang (bangunan, material, peralatan, dan sebagainya) yang mengalami kerusakan.

Menurut Todaro (2000), hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memajukan perekonomian negara. Itulah mengapa dibutuhkan investasi sebagai stok penambah modal. Pada intinya, demi mencapai *steady-state growth*, maka diperlukan situasi dan kondisi di mana para pelaku usaha memiliki harapan

dan pandangan yang positif terhadap situasi negara sehingga bisa melakukan investasi.

3.3 Teori Perubahan Struktural

Teori pembangunan yang termasuk ke dalam kategori teori perubahan struktural menekankan pada pentingnya perubahan struktur ekonomi suatu negara jika ingin mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi lewat usaha-usaha pembangunan ekonomi. Ada dua teori yang termasuk dalam teori perubahan struktural yaitu Teori Arthur Lewis (1954) dan Teori Hollis dan Chenery (1975).

3.3.1 Teori Arthur Lewis

Teori Arthur Lewis dikemukakan pertama kali dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan ekonomi dengan penawaran kerja yang tidak terbatas” yang dimuat dalam majalah The Manchester School pada Mei 1954. Teori Pembangunan Arthur Lewis ini dikenal juga dengan Teori/Model Dua Sektor. Dalam tulisannya tersebut Arthur Lewis membagi perekonomian khususnya di negara-negara sedang berkembang menjadi dua yaitu perekonomian atau sektor tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian atau sektor modern di perkotaan yang didominasi oleh sektor industri.

Perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian ditandai dengan kelebihan (surplus) penawaran tenaga kerja sehingga produktivitasnya rendah. Produktivitas yang rendah tersebut membuat upah tenaga kerja juga rendah. Di sisi lain, perekonomian modern di perkotaan yang didominasi oleh sektor industri ditandai dengan kurangnya penawaran tenaga kerja sehingga produktivitas per tenaga kerjanya tinggi dan membuat upahnya tinggi.

Kondisi yang kontras di antara kedua sektor perekonomian tersebut membuat tenaga kerja dari pedesaan bermigrasi ke kota untuk mencari upah yang lebih tinggi. Berpindahnya tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan membawa akibat di pedesaan kekurangan tenaga kerja sehingga upah di sektor pertanian di pedesaan mengalami peningkatan, sementara di perkotaan terjadi sebaliknya. Proses tersebut akan berlangsung terus menerus sampai kemudian tercapai keseimbangan dimana jumlah tenaga kerja di pedesaan dan di perkotaan relatif sama, produktivitasnya juga sama, dan dengan demikian juga tingkat upahnya sama.

Teori Arthur Lewis ini mendapatkan banyak kritik dari para ahli ekonomi pembangunan yang lain. Beberapa kritik terhadap Teori Arthur Lewis antara lain:

1. Pada kenyataannya tenaga kerja di sektor pertanian di pedesaan tidak bisa dengan mudah berpindah ke sektor industri di perkotaan karena dibutuhkan ketrampilan yang tinggi dan berbeda.
2. Asumsi bahwa upah di perkotaan dan pedesaan dengan mudah naik dan turun seiring bertambah dan berkurangnya jumlah tenaga kerja akibat migrasi atau perpindahan tenaga kerja tidak realistis karena upah cenderung kaku yaitu ketika sudah naik tidak akan mungkin turun.
3. Asumsi bahwa di perkotaan kekurangan tenaga kerja yang dapat diisi dengan tenaga kerja dari pedesaan juga tidak realistis karena diatasi dengan penggunaan mesin-mesin yang bisa menggantikan tenaga kerja.

3.3.2 Teori Pola Pembangunan Hollis dan Chenery

Teori Hollis dan Chenery pertama kali dikemukakan dalam tulisan mereka yang berjudul "*Pattern of Development 1950-1970*" yang ditulis untuk Bank Dunia (*World Bank*) dan diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 1975.

Teori Hollis dan Chenery didasarkan pada riset empiris

mereka atas beberapa negara dengan mengkorelasikan antara pendapatan nasional per kapita dengan struktur ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran struktur ekonomi suatu negara dari perekonomian yang didominasi oleh sektor primer ke sekunder dan ke tersier diikuti dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Kesimpulan yang ditarik oleh Hollis dan Chenery adalah kalau suatu negara ingin pendapatan per kapitanya meningkat maka harus mengubah struktur ekonominya dari struktur yang didominasi sektor primer ke sekunder dan akhirnya ke tersier.

3.4 Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan- sering disebut juga Teori Pembangunan Neo-Marxis- pada dasarnya menyatakan bahwa keterbelakangan atau ketidakkmajuan negara-negara dunia ketiga tidak melulu kesalahan negara dunia ketiga. Menurut teori-teori pembangunan yang masuk dalam rumpun teori ketergantungan

Keterbelakangan atau ketidakkmajuan negara-negara sedang berkembang juga disebabkan oleh faktor kesengajaan dan kesalahan dari negara-negara maju. Negara dunia ketiga tidak maju alias terbelakang karena dibuat tergantung kepada negara-negara maju. Ada tiga macam model atau teori ketergantungan negara-negara dunia ketiga terhadap negara-negara maju, yaitu: (1) Model atau Teori Ketergantungan Neo-Kolonial, (2) Model atau Teori Ketergantungan Paradigma Palsu, dan (3) Model atau Teori Ketergantungan Dualistik.

3.4.1 Model atau Teori Ketergantungan Neo-Kolonial

Menurut model atau teori ini ada beberapa hal yang menyebabkan ketergantungan negara-negara sedang

berkembang terhadap negara-negara maju. Pertama, negara-negara maju sengaja mempertahankan sistem ekonomi negara-negara sedang berkembang, untuk mengeksport bahan mentah dan mengimpor produk Jadi. Kondisi tersebut menyebabkan industrialisasi di negara-negara sedang berkembang Bergantung pada teknologi negara-negara maju.

Kedua, diupayakan secara sistematis misal lewat iklan dan cara alain agar penduduk negara-negara sedang berkembang lebih menyukai produk impor daripada produk hasil produksi dalam negeri atau domestik.

Ketiga, kaum pemilik modal atau kapitalis di negara-negara sedang berkembang bekerjasama dengan kaum kapitalis negara-negara maju untuk mengeksploitasi sumber-sumberdaya alam di dalam negeri untuk kepentingan mereka tanpa mempedulikan kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang.

Kesimpulan yang ditarik oleh model atau teori ketergantungan Neo-Kolonial ini adalah jika negara-negara sedang berkembang ingin maju maka harus melepaskan diri dari ketergantungan atau hubungan ekonomi dengan negara-negara maju.

Ada beberapa kritik terhadap model atau teori ketergantungan Neo-Kolonial. Pertama, teori ini gagal menjelaskan fenomena negara-negara Asia yang dari negara sedang berkembang bisa berubah menjadi negara-negara maju yang kemudian dikenal sebagai negara-negara industri baru (*Newly Industrialized Countries* atau *NIC's*). Ternyata tidak ada bukti ketergantungan yang disebutkan oleh teori atau model ini. Kedua, gagasan untuk melepaskan diri dari hubungan ekonomi dengan negara-negara maju merupakan sesuatu yang tidak realistis karena bukti empiris tidak ada negara yang mengisolasi diri bisa maju. Ketiga, pada kenyataannya antara negara-negara sedang berkembang dengan negara-negara maju yang terjadi adalah

kesalingketergantungan (artinya ada hubungan timbal balik) dan bukan hanya ketergantungan negara-negara sedang berkembang terhadap negara-negara maju.

3.4.2 Model atau Teori Ketergantungan Paradigma Palsu

Model atau Teori Ketergantungan Paradigma palsu menyatakan bahwa keterbelakangan atau ketidakmajuan negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh penerapan paradigma atau teori-teori yang berasal dari negara maju di negara-negara sedang berkembang. Penerapan tersebut berasal dari saran-saran para ahli ekonomi dari negara-negara maju yang biasanya bekerja di Lembaga-lembaga internasional yang membantu atau sebagai konsultan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Penerapan paradigma maupun teori yang berasal dari negara-negara maju apa adanya di negara sedang berkembang ternyata tidak sesuai atau tidak cocok. Sebab dari hal tersebut adalah situasi dan kondisi negara-negara sedang berkembang sangat berbeda dengan situasi dan kondisi negara-negara maju asal dari teori maupun paradigma yang diterapkan di negara-negara sedang berkembang.

Sebagai akibat lanjutan dari kesalahan penerapan teori atau paradigma tersebut adalah negara-negara sedang berkembang tidak berhasil keluar dari ketertinggalan atau ketidakmajuan. Akibat yang lain adalah negara-negara sedang berkembang tergantung pada negara-negara maju dalam berbagai hal, antara lain: bantuan keuangan, teknologi, bantuan tenaga ahli, dan lain-lain.

Salah satu contoh analisis dengan model paradigma palsu ini adalah ketika Indonesia menandatangani Kerjasama atau Letter of Intent (LOI) dengan IMF untuk mengatasi krisis

ekonomi yang erawal dengan krisis moneter tahun 1998. Saran IMF untuk mengatasi krisis ekonomi adalah saran yang biasa dilakukan di negara-negara maju yaitu memprkecil defisit APBN. Ternyata saran IMF itu tidak tepat untuk Indonesia dan krisis ekonomi di Indonesia tidak juga membaik. Peran pemerintah lewat peengeluaran pemerintah yang besar dengan konsekuensi defisiti APBn yang besar justru diperlukan ketika konsumsi rumahtangga, investasi swasta, dan sektor perdagangan luar negeri lumpuh. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan IMF

3.4.3 Model atau Teori Ketergantungan Pembangunan Dualistik

Model Pembangunan Dualistik menyatakan di manapun selalu akan ada struktur yang dualistik, misalnya Kota-Desa, Tradisional-Modern, Pertanian-Industri, Negara Sedang Berkembang-Negara Maju, Superior-Inferior, dan Pusat (*Core*)- Pinggiran (*Pheripery*).

Dalam struktur dualistic antara negara sedang berkembang-negara maju maka negara maju bertindak sebagai pusat (*Core*) dan negara sedang berkembang bertindak sebagai pinggiran (*Pheripery*). Negara sedang berkembang sebagai pinggiran diarahkan untuk melayani negara maju sebagai pusat.

Salah satu cara agar negara sedang berkembang mau melayani kepentingan negara maju sebagai pusat adalah lewat teori-teori pembangunan yang disebarluaskan di negara-negara sedang berkembang untuk diterapkan. Salah satu contohnya adalah teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional antara negara sedang berkembang dengan negara maju. Negara sedang berkembang mempunyai keunggulan komparatif di sektor pertanian dan produk-produk yang dihasilkan dengan teknologi padat karya.

Sementara negara maju mempunyai keunggulan komparatif di sector industry dan produk-produk yang dihasilkan dengan teknolog padat modal serta teknologi modern. Sebagai akibatnya ngara sedang berkembang tetap miskin dan menjadi pensuplai bahan baku serta tenaga kerja murah bagi kepentingan negara-negara maju.

3.5 Teori Pembangunan Kaum Neo-Klasik Penentang Revolusi

Teori Pembangunan Kaum Neo-Klasik Penentang Revolusi (*Neo-Classical Counter Revolution Theory*) berpendapat bahwa keterbelakangan ekonomi dari negara-negara sedang berkembang lebih disebabkan oleh faktor-faktor di dalam negeri (faktor internal) dari negara-negara sedang berkembang sendiri dan bukan dari faktor eksternal seperti dituduhkan oleh teori ketergantungan. Yang termasuk ke dalam kategori Teori Neo-Klasik penentang revolusi adalah Teori Solow-Swan.

Beberapa faktor internal yang menyebabkan keterbelakangan ekonomi negara-negara sedang berkembang antara lain: modal yang terrbatas, mtu sumberdaya manusia yang rendah, teknologi yang tertinggal, dan tata kelola pemerintahan yang buruk (*Bad Governance*).

Pada faktor kekurangan modal usulan kaum neo-klasik adalah dengan melakukan pemupukan modal dari dalam negeri lewat tabungan masyarakat. Sedangkan untuk mengejar ketertinggalan dalammtu sumberdaya manusia maka sektor pendidikan haruslah mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan. Khusus untuk tata kelola pemerintahan yang buruk, Teori Neo-Klasik Penentang Revolusi menyatakan bahwa salah satu sebab utamanya adalah peran pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian. Oleh karena solusinya adalah meyerahkan

perekonomian pada pasar bebas dan membatasi peran pemerintah.. Peran pemerintah hendaknya dibatasi pada peran pembangunan berbagai infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dan hal-hal lain yang swasta tidak tertarik untuk mengusahakannya.

3.6 Teori-Teori Pembangunan Baru

Menurut Teori-Teori Pembangunan baru maka faktor yang mempengaruhi keterbelakangan maupun kemajuan suatu negara bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu usaha-usaha pembangunan ekonomi haruslah memperhatikan beberapa faktor yang kompleks tersebut.

3.6.1 Teori Pertumbuhan atau Pembangunan Endogen

Teori Pertumbuhan atau Pembangunan Endogen merupakan jawaban terhadap kritik atas Teori Pertumbuhan Neo-Klasik yang mempunyai banyak kelemahan. Beberapa kelemahan Teori Pertumbuhan atau pembangunan Neo-klasik antara lain: (1). Tidak bisa menjelaskan sumber-sumber kemajuan teknologi, (2) tidak bisa menjelaskan faktor residual (faktor lain) yang menyebabkan perbedaan dalam pertumbuhan meskipun 2 negara punya tingkat teknologi yg sama, (3) faktor utama pertumbuhan adalah modal dan tabungan yang karena ada gap tabungan-investasi (Saving-Investment Gap) lalu ditutup dengan aliran modal asing (faktor eksogen) dengan segala konsekuensi yang seringkali membawa dampak negatif bagi ekonomi domestik, dan (4) fungsi produksi dalam Teori Solow mengalami Diminishing Return karena adanya depresiasi modal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bisa mengalami penurunan.

Menurut Teori Pertumbuhan Endogen sumber pertumbuhan mestinya bukan dari faktor eksogen, tetapi dari faktor endogen. Faktor endogen yang merupakan kunci

utama kemajuan teknologi dan sumber pertumbuhan justru pada sumber daya manusia (SDM). Hal ini mengingatkan pada Paradox Leontief yang membantah Teori Heckser-Ohlin (H-O) tentang proporsi faktor produksi. Menurut Teori H-O negara yang mempunyai suatu faktor produksi yang berlimpah akan memproduksi barang dengan teknologi yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah tersebut. Lalu Leontief menemukan paradox bahwa ekspor Amerika tahun 1943 ternyata justru merupakan barang-barang yang dibuat dengan teknologi padat karya, padahal AS mempunyai modal berlimpah dibanding tenaga kerja. Lalu disimpulkan bahwa tenaga kerja AS adalah tenaga kerja terdidik yang tidak terpisahkan (embodied) dari teknologi dan modal. Sumber Daya Manusia juga tak bisa terdepresiasi sehingga fungsi produksi nasional tak mengalami kondisi Diminishing Return.

Teori pembangunan atau pertumbuhan endogen ternyata dikritik karena: (1) tetap menggunakan model utama Neo-Klasik, hanya saja lebih menekankan pentingnya sumberdaya manusia dan bukan modal, dan (2) kenyataannya, pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang menghadapi kendala bukan kendala dalam modal, sumberdaya manusia, serta teknologi, melainkan disebabkan antara lain oleh inefisiensi yang timbul karena kegagalan koordinasi, infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna.

3.6.2 Teori/Pendekatan Ekonomi Kelembagaan

Teori atau pendekatan ekonomi kelembagaan dalam pembangunan muncul sebagai kritik dan alternatif pendekatan Neo-Klasik, atau yang sering disebut sebagai *mainstream economics*, yang dianggap gagal mengentaskan negara-negara sedang berkembang dari keterbelakangan ekonomi mereka. Dalam analisis ekonomi Neo-Klasik: (1)

kelembagaan dianggap sebagai variabel non-ekonomi dan diasumsikan tidak berubah (asumsi ceteris paribus), (2) kelembagaan tidak dianalisa sebagai variabel sebab atau akibat dari fenomena ekonomi, dan (3) Pasar diasumsikan hanya digerakkan oleh hukum penawaran dan permintaan.

Selanjutnya para ahli ekonomi kelembagaan menyatakan bahwa ekonomi Neo_klasik atau mainstream economics tidak memasukkan faktor kelembagaan dalam analisisnya padahal dalam kenyataannya faktor kelembagaan memegang faktor yang penting dalam bidang ekonomi termasuk dalam proses pembangunan ekonomi. Beberapa fenomena di dunia nyata yang menunjukkan pentingnya faktor kelembagaan tersebut antara lain: (1) fenomena pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang dimana dengan kelembagaan yang berbeda dengan negara maju meski mengaplikasikan kebijakan yang sama dengan negara-negara maju ternyata menghasilkan output yang berbeda, (2) kejatuhan Uni Sovyet yang disebabkan oleh ketiadaan kelembagaan dasar yang ada di sistem kapitalisme yang ternyata lebih sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai manusia ekonomi yaitu Hak milik (Property Rights) dan Kepastian dalam Hukum Kontrak, (3) tingginya biaya mencari informasi dan biaya koordinasi dalam produksi dan distribusi di perekonomian modern, dan (4) adanya biaya transaksi yang besar khususnya di sektor jasa yang kian memegang peran penting di ekonomi modern.

Definisi kelembagaan adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu (Mubyarto, 1989). Kelembagaan tersebut bisa dalam artii wadah, bisa pula berarti kode etik, adat-istiadat, norma, peraturan dan hukum. Kelembagaan ada yang bersifat resmi (formal) dan

tidak formal.

Ada 3 (tiga) elemen atau unsur dalam kelembagaan (Muslimin Nasution, 2002). Pertama, Batas kewenangan (jurisdictional boundary) yaitu batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut,

Kedua, hak kepemilikan (property right). Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau *consensus* yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat. Pengertian ini mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.

Ketiga, aturan keterwakilan atau representasi (*Rule of Representation*). Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap kinerja atau output dari keputusan tersebut akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan atau kebijakan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut.

Aplikasi dari Teori/Pendekatan Ekonomi Kelembagaan dikemukakan oleh Nugroho SBM (2008). Dalam tulisannya Nugroho SBM mengaplikasikan pendekatan kelembagaan

dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

Ada beberapa masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Pertama, masalah-masalah dalam sistem sub kontrak antara petani dengan perusahaan perkebunan besar yang dikenal dengan sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Masalah yang timbul dalam sub kontrak di PIR ini adalah Posisi tawar petani lemah sehingga harga ataupun standar hasil pertanian yang dijual kepada perkebunan bisa dipermainkan oleh pihak perkebunan. Masalah yang lain adalah biaya kontrak yg mahal. Masalah yang lain lagi adalah anak angkat yaitu para petani tradisional tak bisa menjamin mutu karena teknologi yang dipakai masih sangat sederhana. Di samping itu ada malah keengganan petani untuk terikat kepada kontrak karena mereka merasa tak bebas.

Masalah kedua adalah berkaitan dengan koperasi. Di sektor pertanian dibentuk Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tujuan untuk menolong petani dengan menyediakan input produksi pertanian (pupuk, pestisida, bibit) yang murah bagi petani anggotanya dan membeli hasil produksi pertanian khususnya padi dengan harga yang layak sehingga kesejahteraan petani anggotanya bisa terjamin dan selalu meningkat. Namun sampai saat ini KUD belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Ada beberapa sebab mengapa KUD belum mampu menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan petani anggotanya, antara lain: kurangnya modal, KUD cenderung dibentuk dari atas sehingga rasa memiliki petani rendah, dan adanya perilaku yang kurang baik dari oknum pengurus KUD.

Masalah ketiga adalah masalah standarisasi mutu produk-produk pertanian. Dalam era perdagangan global dan modern, konsumen menuntut produk pertanian yang: aman, sehat, dan berkualitas tinggi. Produk yang demikian bisa dihasilkan dengan melakukan standarisasi. Beberapa

negara yang pertaniannya maju seperti Thailand sudah melakukan standarisasi tersebut. Di Indonesia, khusus untuk beras sudah ada standarisasi yang dilakukan oleh BULOG dan KUD. Oleh BULOG dan KUD sudah ditentukan tingkat kekeringan gabah dari petani yang bisa dijual di BULOG dan KUD. Namun seringkali kadar air atau tingkat kekeringan gabah ini dipakai sebagai alasan untuk menolak pembelian gabah dari petani. Produk-produk pertanian yang lain belum dilakukan standarisasi.

Masalah keempat menyangkut mekanisme jual-beli produk pertanian. Jual beli produk pertanian selama ini masih dilakukan lewat jalur informal antara lain lewat pengepul atau tengkulak. Hal ini tentu saja merugikan petani. Hal tersebut dilakukan oleh petani karena kalau melalui jalur formal ke lembaga-lembaga formal biaya kontrak atau biaya transaksinya besar. Biaya transaksi yang besar lewat jalur resmi juga disebabkan oleh pungutan resmi (Perda pajak dan retribusi daerah) maupun tidak resmi (pungutan liar) yang masih besar di era otonomi daerah.

Masalah kelima, akses petani yang terbatas terhadap input dan terhadap kredit untuk membiayai kegiatan di sektor pertanian. Ketersediaan input pertanian seperti pupuk seringkali langka. Hal tersebut disebabkan oleh ulah para spekulan yang bermain spekulasi untuk mencari keuntungan. Akses kepada pinjaman atau kredit untuk membiayai usaha tani juga seringkali sulit karena petani tidak punya agunan sehingga ia bisa meminjam di lembaga-lembaga keuangan formal. Petani lalu meminjam adri pelepas uang (rentenir) dengan suku bunga yang sangat tinggi.

Masalah keenam menyangkut pengenalan teknologi baru, input baru sering terkendala oleh sempitnya lahan pertanian yang dimiliki oleh petani. Sempitnya lahan

pertanian membuat petani tidak mau begitu saja menerima introduksi atau pengenalan teknologi dan input baru karena resiko yang dihadapi sangat besar. Jika penerapan teknologi baru dan input baru tersebut gagal maka hidup petani dan keluarganya juga akan terancam.

Masalah ketujuh, seringkali kelembagaan baru yang diperkenalkan oleh pemerintah kepada petani telah merusak kelembagaan lama yang sudah baik. Salah satu contohnya adalah sistem upah uang untuk petani penggarap telah merusak sistem upah in natura yaitu sistem bawon. Padahal sistem bawon atau sistem tradisional ada hubungan emosional petani pemilik lahan dan penggarap yaang tidak hanya berdasarkan untung rugi saja. Atas dasar beberapa permasalahan pertanian di Indonesia dengan menggunakan oendekatan ekonomi kelembagaan seperti telah diuraikan maka diusulkan beberapa kebijakan untuk mengatasinya.

Pertama, sistem sub-kontrak tetap dibutuhkan di sektor pertanian. Sistem sub-kontrak perlu diperluas tidak hanya di sektor pertanian saja tetapi juga di sektor lain seperti sektor industri manufaktur tetapi dengan syarat ada kebijakan pengaturan pemerintah agar tidak merugikan pihak yang lemah (petani, perajin kecil, industri rumah tangga).

Kedua, perlu revitalisasi KUD sehingga benar-benar merupakan lembaga yang menolong petani mengangkat kesejahteraannya. Antara lain dengan memperketat seleksi pengurusnya.

Ketiga, perlu dibentuk lembaga standarisasi untuk produk-produk pertanian. Lembaga ini yang bertugas untuk mengadakan standarisasi dan sertifikasi produk-produk hasil pertaanian khususnya untuk pasar ekspor.

Keempat, perlunya pengurangan biaya atransaksi untuk penjualan produk-produk pertanian. Biaya transaksi yang tinggi bisa muncul karena Perda di era otonomi daerah dan oleh ulah tengkulak serta jalur distribusi yang terlalu panjang.

Oleh karena itu pembatalan perda-perda yang mempertinggi biaya transaksi, penindakan para tengkulak dan perpendekkan jalur distribusi komoditas pertanian perlu terus dilakukan.

Kelima, akses petani yang seringkali sulit terhadap input karena ulah spekulan juga harus diataasi dengan menindak tegas para spekulan yang mencari keuntungan dengan mempermainkan distribusi input-input pertanian. Akses kepada kredit yang sulit karena petani tidak punya agunan bsa diatasi dengan asuransi di sektor pertanian yang ditanggung oleh pemerintah.

Keenam, masalah sempitnya lahan pertanian sehingga menyulitkan introduksi teknologi dan input baru disektor pertanian bisa diatasi dengan melakukan konsolidasi lahan (penggabungan lahan) pertanian. Juga bisa tetap dilakukan untuk pembukaan lahan-lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa.

Ketujuh, introduksi kelembagaan baru di sektor pertanian dan sektor lainnya sebaiknya mempertimbangkan kelembagaan lama yang sudah baik sehingga introduksi kelembagaan baru tidak merusak kelembagaan lama yang sudah baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. 2013. Ekonomi Kelembagaan: paradigma, teori, dan kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Boediono. 1982. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta,
- Deliarnov. 2018. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Cetakan 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djojohdikusumo, Soemitro. 1993. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. LP3ES. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2010. Masalah, kebijakan dan politik Ekonomika pembangunan. Jakarta : Erlangga.
- Kuncoro, M. 2015. Indikator Ekonomi. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Muljana, B.S., 1983. Pembangunan Ekonomi dan Tingkat Kemajuan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Penerbit FE-UI.
- Muslimin Nasution. 2002. Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agro Industri. Bogor: IPB Press.
- Nugroho SBM. 2008. Masalah Pngembangan Sektor Pertanian dengan Pendekatan Kelembagaan di Indonesia. Jurnal Bisnis Strategi, Vol 17, Nomer 1, Juli, Program MM Undip, Semarang.
- Sukirno, S. 2015. Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Gramedia Grup.
- Todaro. M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Buku 1 dan 2, Terjemahan oleh Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar, ed 11. Jakarta: Erlangga.

BAB 4

TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh Diana Kartika Dewi

4.1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat/ waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa bersifat dinamis, berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Teori pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai faktor yang menentukan kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang (Chalid, 2015).

Hal ini sesuai dengan pandangan Kuznets yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas/ *output* dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi pada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu terjadi dimungkinkan karena adanya kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro & Smith, 2003).

Teori pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat dalam dekade 50-an hingga kini. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow merupakan garda depan dari *linear stage of growth theory* (teori linearitas). Pada dekade 1950-1960, yang banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan. (Chalid, 2015). Sebelum teori yang dikemukakan oleh Rostow, terlebih dahulu teori tentang pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Friedrich List pada tahun 1844 yang berasal dari

Mazhab Historis yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi dari sisi sejarahnya. (Adrimas, 2012).

4.2 Tahap Pertumbuhan Friedrich List (1844)

Pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List dilihat dari perkembangan perilaku masyarakat dalam memproduksi. Berikut dapat dijelaskan tahap-tahap pertumbuhan: (Adrimas, 2012).

4.2.1. Mengembara

Kegiatan pada tahap ini, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam produksi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh manusia yang paling awal (*primitif*).

4.2.2. Beternak

Tahap ini muncul dari banyaknya jumlah hewan yang mereka pelihara sehingga nantinya bisa menimbulkan suatu usaha peternakan.

4.2.3. Bertani

Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk yang semakin meningkat, sehingga kebutuhan bahan pangan juga meningkat. Untuk itu juga membutuhkan pengembaraan yang cukup jauh serta membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Oleh karena itu masyarakat mulai terdorong untuk memikirkan alternatif lain dalam produksi, hal ini dikarenakan kejenuhan masyarakat dalam kehidupan mengembara. Sehingga muncul suatu kehidupan baru yang dikenal dengan bercocok tanam (bertani).

4.2.4. Pertanian dan Industri Rumah Tangga

Pada tahap ini terjadi kemajuan yang bagus pada sektor pertanian, namun penyerapan tenaga kerja secara penuh tidak

dapat dilakukan, sehingga banyaknya pengangguran musiman. Dengan demikian mereka memanfaatkan waktu senggang yang ada untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan lain. Maka muncul industri rumah tangga.

4.2.5. Pertanian, Industri Manufaktur dan Perdagangan

Dengan adanya perkembangan teknologi pada sistem produksi sektor pertanian maupun sektor rumah tangga, sehingga menghasilkan jumlah produksi yang banyak dengan cara yang semakin efisien dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor perdagangan.

4.3 Tahap Pertumbuhan Bruno Hildebrand (1864)

Menurut Bruno Hildebrand pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari perubahan-perubahan dalam metode distribusi yang digunakan bukan dari sikap produksi/ konsumsi. Tahapan teori ini muncul karena Bruno mengkritik pandangan Friedrich tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand (Adrimas, 2012):

4.3.1. Perekonomian Barter

Perekonomian Barter ini merupakan kegiatan pertukaran barang secara langsung oleh kedua belah pihak. Kegiatan ini memiliki keterbatasan dalam perdagangan karena pertukaran barang hanya akan terjadi apabila kedua belah pihak saling membutuhkan barang yang dipertukarkan. Sehingga menghasilkan jumlah jenis produk yang ditukarkan terbatas serta biaya dan waktu yang diperlukan relatif besar.

4.3.2. Perekonomian uang

Pada tahap ini terjadi transaksi dalam perekonomian dengan menggunakan suatu media yang disebut dengan uang. Tahap ini memberikan pengaruh pada perekonomian secara makro sehingga

memunculkan Lembaga-lembaga keuangan dalam perekonomian, serta dapat juga memacu perkembangan uang sebagai alat tukar.

4.3.3. Perekonomian Kredit

Proses pertukaran dalam perekonomian tahap ini adalah proses transaksi barang/jasa dengan menggunakan pembayaran yang terdapat perbedaan waktu (sesuai dengan perjanjian dalam perdagangan antara kedua pihak yang terlibat). Dalam melakukan transaksi diperlukannya uang sebagai alat transaksi, yangmana pada kenyataannya jumlah uang terbatas sementara kebutuhan terhadap uang tidak terbatas. Sehingga uang merupakan suatu kendala dalam memaksimalkan kebutuhan/ transaksi. Dalam hubungan ini untuk mengatasi kelangkaan uang dalam bertransaksi maka kredit jelas merupakan suatu transaksi alternatif yang dapat dilakukan.

4.4 Tahap Pertumbuhan Karl Bucher (1893)

Dalam tahap ini, berdasarkan acuan pada evolusi perekonomian di Jerman Karl Bucher menganalisis dan mensitesakan pendapat List dan Hildebrand yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari tiga tahap pertumbuhan (Adrimas, 2012):

4.4.1. Perekonomian Rumah Tangga

Pada tahap ini belum ada kegiatan perdagangan, masing-masing rumah tangga memenuhi kebutuhan mereka sendiri-sendiri dengan cara memproduksi mandiri kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat juga terbatas, produksi yang dihasilkan hanya sebagai konsumsi sehingga dapat disimpulkan pada tahap ini kegiatan produksi yang dilakukan sebatas penggunaan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan pokok.

4.4.2. Perekonomian Kota

Pada tahap ini sudah berkembangnya sektor perdagangan dari yang sebelumnya yang hanya antar keluarga. Dengan semakin berkembangnya perdagangan, maka pasar juga akan semakin ramai sehingga seiring waktu akan berkembang menjadi suatu kawasan yang disebut dengan kota yang melahirkan perekonomian kota. Berikut dapat dilihat ciri perekonomian kota:

1. Skala perdagangan yang besar
2. Berkembangnya sektor transportasi
3. Banyaknya jenis barang yang diperdagangkan
4. Jarak distribusi barang yang semakin jauh
5. Banyaknya pelaku ekonomi yang terlibat
6. Peranan pedagang dan pengusaha yang semakin menonjol
7. Perekonomian yang semakin efisien dapat merangsang pertumbuhan produksi dan konsumsi yang lebih luas. Hal ini diakibatkan dengan adanya penggunaan uang secara lebih luas yang menghasilkan perekonomian perkotaan yang lebih dinamis dari perekonomian rumah tangga.

4.4.3. Perekonomian Nasional

Pada tahap ini kegiatan ekonomi pedesaan dan perkotaan sudah terintegrasi yang didukung dengan adanya kemajuan yang signifikan pada sistem produksi dan perdagangan. Di samping itu batas wilayah kekuasaan antar daerah semakin jelas, sehingga dibutuhkan peranan pemerintah dalam perekonomian.

4.5 Tahap Pertumbuhan Karl Marx (1818 – 1883)

Secara historis Karl Mark menjelaskan ada lima tahapan dalam pertumbuhan ekonomi (Adrimas, 2012):

4.5.1. Masyarakat Perbudakan

Dalam perkembangan teknik produksi yang ada, adanya dua kelompok yang saling membutuhkan namun dalam prakteknya saling bertentangan, adanya istilah majikan dan budak. Yangmana

majikan lebih dominan daripada budak yang memiliki kedudukan yang kurang dihargai.

Menurut Marx, dengan memberikan upah yang kecil kepada budak ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi majikan. Hal ini seiring berjalannya waktu akan memberikan kesadaran pada budak atas kedudukan dan ketimpangan yang mereka rasakan, sehingga memicu permusuhan antara kedua belah pihak.

4.5.2. Masyarakat Feodal

Dengan adanya kritikan tentang perbudakan yang muncul dari pandangan ahli ekonomi terhadap praktek perbudakan, akhirnya meruntuhkan tahapan ini. Sehingga munculnya masyarakat feodal yangmana merupakan masyarakat bangsawan yang pada saat itu menguasai alat-alat produksi utama yaitu: tanah. Para petani dan buruh tani berasal dari budak yang dibebaskan. Petani ini akan bekerja untuk lahannya sendiri setelah mereka bekerja untuk masyarakat feodal. Jika dibandingkan dengan masyarakat perbudakan, dengan adanya kaum feodal ini akan memicu peningkatan alat produksi dan kemajuan teknologi pada sektor pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah produksi. Hal ini akan memunculkan berkembangnya sektor perdagangan. Dalam perkembangannya maka terbentuklah suatu kelompok dalam masyarakat yang dikenal dengan kelompok borjuis kapitalistis.

4.5.3. Masyarakat Kapitalis

Dengan lahirnya masyarakat kapitalis ini juga dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dari peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh adanya peranan penting dari kapital dan akumulasi kapital, yang digagas oleh Adam Smith. Selain itu untuk memaksimalkan luasnya pasar

adalah dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan ekonomi.

Dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi Inggris ke industri dari struktur ekonomi agraris ini yang menyebabkan lahirnya masyarakat kapitalis. Pada tahap ini masyarakat kapitalis Kembali terbagi menjadi dua: kelas kapitalis dan buruh. Sehingga munculnya kesenjangan pada masyarakat yang sangat luas, hal ini terlihat dari perbedaan antara orang kaya dan miskin. Orang kaya akan semakin sedikit dan jumlah orang miskin yang semakin banyak. Hal ini menggambarkan tatanan ekonominya seperti piramida, jumlah paling kaya yang berada di puncak piramida.

4.5.4. Masyarakat sosialis Modern

Pada tahapan ini, adanya kemajuan dalam penggunaan alat-alat produksi dan teknologi yang sudah maju. Kemudian masyarakatnya juga mempunyai peluang untuk maju disemua bidang kehidupan terutama bidang ekonomi.

4.5.5. Masyarakat Komunal Primitif

Tahap ini merupakan tahapan yang lebih menekankan kepada pentingnya masyarakat yang bukan menonjolkan kepentingan individu seperti masyarakat kapitalis primitif. Tahapan ini juga ditandai dengan teknologi yang masih sederhana. Tahapan ini di adopsi dari pandangan Friedrich List (mengembara, beternak dan bertani). Namun ada perbedaan diantara pandangan keduanya, yangmana List melihat dari sisi perkembangan Teknik produksi sedangkan Marx lebih menekan kajiannya pada sisi kepemilikan faktor produksi. Tahap ini diakhiri dengan munculnya paham individualisme yang secara tidak langsung akan mengurangi rasa kebersamaan, diawali dengan munculnya perbedaan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh kemajuan teknik produksi.

4.6 Tahap Pertumbuhan Collin Clark

Menurut Collin Clark merupakan ahli ekonomi Inggris modern (1957) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Adrimas, 2012):

1. Masyarakat tradisional,
Pada tahap ini sebagian masyarakat mendapatkan sumber pendapatan dan tempat bekerja mereka melalui sektor pertanian.
2. Lebih dominanya sektor industri daripada sektor pertanian akibat adanya perkembangan sektor industri.
3. Tingginya pertumbuhan sektor jasa, sebagai akibat dari perkembangan masyarakat lebih cepat.

4.7 Tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Tahap pertumbuhan ekonomi Rostow yang berasal dari Texas University, tuliskan dalam karyanya yang berjudul: *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Tahapan pertumbuhan ini muncul akibat dari reaksi terhadap teori komunis Mark. Menurut Rostow ada lima tahapan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Masyarakat Tradisional,
2. Prasyarat *Take-off* (tinggal landas)
3. Periode *Take-off*
4. Dorongan menuju kematangan (*Drive to maturity*)
5. Konsumsi tinggi dan besar-besaran (*Hight-mass consumption*).

Dari kelima tahap diatas maka yang menjadi tahapan kunci adalah *Take off* (tinggal landas) yang didorong oleh satu atau lebih sektor (Adrimas, 2012).

Berikut uraian masing-masing tahapan tersebut:

4.7.1. Masyarakat Tradisional

Perekonomian pada masa tahap ini cenderung bersifat *subsistem*, yang mana penggunaan teknologi pada masa ini masih sangat terbatas. Dalam masa ini sektor pertanian memegang peranan penting karena penggunaan teknologi yang kurang, maka barang-barang yang diproduksi merupakan komoditas pertanian dan bahan mentah, dan untuk memiliki sumber daya yang ada dipengaruhi oleh hubungan darah dan keluarga (Chalid, 2015).

Karakteristik pada tahap ini menurut Rostow ada 3:

1. Penentuan organisasi dan metode produksi masih menggunakan kebiasaan lama.
2. Dalam kegiatan ekonomi, relatif kecilnya dampak sains dan teknologi.
3. Masyarakat merasakan tidak diperlukannya perubahan.

Dengan tingginya rasio ketergantungan dan rendahnya tingkat produktivitas yang disebabkan banyaknya anak yang tidak sebanding dengan produktivitas sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan (*Visicious Circle*). Di Indonesia keadaan ini terjadi pada masa Orde Baru (1966) yang dapat ditemui di daerah pedesaan adanya kebiasaan yang kurang produktif tersebut. Jika dilihat dari perkembangan sains dan teknologi pada masyarakat tradisional ini cukup terbelakang, ini disebabkan oleh pendapatan masyarakatnya yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan tingkat rasional yang berkorelasi positif dengan kemajuan teknologi. Karena rasional masyarakatnya yang rendah maka kemajuan sains dan teknologi di dalam masyarakat tersebut juga lambat (Adrimas, 2012).

Masyarakat tradisional ini, bersifat *statis* karena mereka merasa tidak memerlukan perubahan. Jika dilihat dari struktur sosial masyarakatnya yang ditentukan oleh hubungan darah dan keluarga yang cenderung disebut bersifat hierarkis (bertingkat) (Jhingan, 1983).

4.7.2. Prasyarat *Take-off* (tinggal landas)

Pada tahap ini, proses pertumbuhan menurut Rostow pada dasarnya merupakan proses perubahan masyarakat dari agraris menuju masyarakat industri. Tahap ini juga merupakan tahapan yang menentukan bagaimana persiapan suatu masyarakat berikutnya, yaitu tinggal landas.

Menurut Rostow, negara-negara Eropa mengalami tahapan kedua ini pada abad ke 15 dan 16, yang mana ditandai dengan perubahan radikal pada masyarakat dengan munculnya semangat *Renaissance*, serta terjadi perubahan paradigma berpikir dari statis menuju dinamis. Pada tahap ini telah bermunculan perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian, seperti: banyaknya industri yang muncul, perkembangan teknologi yang pesat, Lembaga keuangan yang resmi dan perubahan investasi yang besar-besaran pada industri manufaktur. Sehingga pada tahap ini juga bisa disebut sebagai awal mulanya industrialisasi. Untuk mempertahankannya butuh beberapa persyaratan:

1. Adanya Transportasi yang didukung oleh peningkatan investasi pada sektor infrastruktur
2. Bidang pertanian mengalami revolusi teknologi
3. Perluasan impor, termasuk impor modal yang dibiayai oleh produksi yang efisien dan pemasaran sumber daya alam untuk ekspor (Chalid, 2015).

Pada tahap ini juga dijelaskan adanya perbedaan dua kategori Negara berdasarkan sistem masyarakatnya: (1) adanya perubahan yang harus dilakukan oleh negara pada sistem masyarakat yang tradisional dan (2) tidak perlunya perubahan yang dilakuakn oleh Negara pada sistem masyarakatnya karena telah termasuk kedalam negara berkembang, karena sebagian besar penduduknya berasal dari Eropa Barat yang sudah terlebih dahulu berkembang.

Berikut bisa dilihat karakteristik negara yang berada pada tahap ini adalah:

1. Berkurangnya secara perlahan sikap mental tradisional masyarakat, hal ini ditandai dengan sudah berkembang luasnya pendidikan.
2. Adanya peningkatan yang teratur dari *Saving* dan investasi sehingga mampu melewati laju pertumbuhan penduduk, yang ditandai dengan mulai munculnya sektor perbankan/ Lembaga keuangan, karena adanya keadaan yang saling menunjang antara *saving*, investasi dan pendapatan masyarakat.

Rostow juga menyarankan supaya investasi pemerintah di arahkan kepada perluasan *Social overhead capital* (prasarana produksi) terutama pada transportasi. Hal ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, penggunaan secara produktif dari sumber daya alam yang ada serta adanya campur tangan pemerintah secara lebih efektif. Dengan pengelolaan sumber daya secara efisiensi dan efektif ini yang nantinya dapat meningkatkan investasi dengan harapan adanya peningkatan ekspor dan penerimaan devisa yang dapat memperluas impor dan impor barang modal.

1. Adanya *Introduksi* teknologi maju. Dengan adanya teknologi maju dapat meningkatkan usaha-usaha serta mempengaruhi perkembangan alat dan metode produksi, yang disebabkan oleh adanya penurunan sikap mental tradisional, peningkatan Pendidikan, *saving* dan investasi
2. Munculnya paham nasional sebagai reaksi terhadap intervensi dan dominasi asing (Adrimas, 2012).

4.7.3. Periode Take off (tinggal landas)

Menurut Rostow untuk sampai ditahap ini dibutuhkan waktu 20–30 tahun. Untuk itu karakteristik yang harus dimiliki suatu negara adalah:

1. Investasi Neto meningkat lebih kurang dua kali lipat sehingga bisa mencapai peningkatan pendapatan nasional diatas 10%
2. Perkembangan salah satu atau beberapa sektor industri manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi

Karakteristik pertama dan kedua saling berkaitan, karena kenaikan investasi dapat memicu peningkatan pertumbuhan terutama pada sektor manufaktur. Sektor ini merupakan indikator bagi perkembangan industrialisasi yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Di samping itu sektor manufaktur ini memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain, sehingga sektor lain pun bisa berkembang sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan yang tinggi (Chalid, 2015).

Pada karakteristik kedua di atas perkembangan beberapa sektor penting, kemudian Rostow membagi suatu perekonomian menjadi tiga sektor (Adrimas, 2012):

- a. Sektor pertumbuhan utama (*leading growth sector*)

Merupakan kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan yang pesat dan berekspansi ke sektor lainnya dengan adanya inovasi. Contohnya: Inggris-tekstil dan katun, Indonesia- Minyak dan gas.

Pada pertumbuhan *leading sector* ini menurut Rostow tergantung pada 4 faktor dasar: (1) harus ada peningkatan permintaan efektif terhadap produk sektor-sektor tersebut, yang bisa dicapai dengan menurunkan konsumsi dan impor modal (2) harus ada pengenalan fungsi produksi baru dan perluasan kapasitas dalam sektor tersebut (3) adanya keuntungan investasi dan

modal dan (4) sektor penting harus mendorong perluasan output disektor lain melalui transformasi teknik (Jhingan, 1983).

b. Sektor pertumbuhan *suplementer* (*supplementary growth sector*)

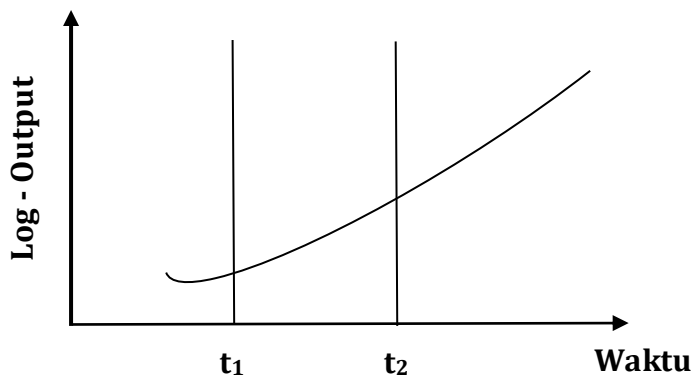
Pada sektor ini akibat adanya pertumbuhan sektor primer maka sektor ini dapat berkembang pesat Contohnya: pembangunan sistem transportasi (perkeretaapian/ sektor primer) dapat merangsang perluasan industri besi, batu bara dan baja (sektor suplementer)

c. Sektor pertumbuhan turunan (*derivative growth*)

Merupakan sektor yang berkembang sejalan dengan peningkatan pendapatan (Adrimas, 2012).

3. Pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya kerangka politik, sosial dan organisasi secara cepat yang menampung ekspansi disektor modern.

Sedangkan karakteristik ketiga merupakan kondisi yang harus terwujud jika karakteristik pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan baik. Karakteristik ketiga ini menjelaskan pandangan Rostow tentang perekonomian pada dasarnya merupakan hasil dari perubahan sektor nonekonomi dari semua lapisan masyarakat yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat ini (Chalid, 2015).



Gambar 4.1: Hypotesis Rostow mengenai laju pertumbuhan ekonomi suatu negara

Sumber: Adrimas,2012

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa periode *take off* adalah antara t_1 dan t_2 . Pada saat terjadi percepatan laju pertumbuhan dari pertumbuhan sebelumnya (rendah) kepada periode selanjutnya yang lebih tinggi dan stabil (*self sustained*).

4.7.4. Menuju kedewasaan

Rostow mendefinisikan bahwa tahap ini sebagai tahapan penerapan teknologi modern yang efektif terhadap sumberdaya yang ada pada masyarakat. Tahapan ini merupakan tahapan jangka Panjang, yang ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Investasi Netto nya lebih dari 10 persen pendapatan nasional, dan perekonomian mampu menahan segala guncangan yang tak terduga (Jhingan, 1983).

Tahap ini memerlukan waktu 40 – 50 tahun, karakteristik suatu perekonomian pada tahap ini adalah (Adrimas, 2012):

1. Teknologi produksi sudah berkembang pesat
2. Rentang produksi semakin meluas

3. Adanya perubahan struktur dan keahlian tenaga kerja dari yang tidak terdidik menjadi terdidik
4. Perubahan pemilikan dunia usaha
5. Munculnya keadaan masyarakat yang mulai bosan dengan kemajuan industrialisasi

Kelima karakteristik ini saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan sebab akibat dari yang lainnya. Dalam tahap ini juga muncul *leading sector baru* yang mulai menggantikan sektor lama yang sudah mulai mundur karena adanya perubahan teknologi yang ada.

4.7.5. Konsumsi tinggi dan besar-besaran

Pada tahap ini merupakan akhir dari tahapan pembangunan menurut oleh Rostow. Pada tahap ini adanya pembangunan pusat kota sebagai pusat industri yang ditandai dengan terjadinya migrasi yang sangat besar dari masyarakat pusat kota ke pinggir kota. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan sisi penawaran (supply side) ke pendekatan sisi permintaan (*demand side*) dalam sistem produksi yang dianut.

Sementara itu, perilaku ekonomi juga terjadi perubahan yang semula lebih menekankan pada sisi produksi, bergeser ke arah konsumsi. Selain itu, ada tiga kekuatan utama yang cenderung meningkatkan kesejahteraan dalam tahap konsumsi yang banyak ini, yaitu (Jhingan, 1983):

1. Penerapan kebijakan nasional untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh lintas batas territorial nasional.
2. Memiliki suatu negara yang kesejahteraan (*welfare state*) melalui pemerataan pendapatan nasional secara lebih adil melalui pajak progresif, jaminan sosial yang lebih baik, dan adanya fasilitas hiburan untuk pekerja
3. Keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting, seperti: mobil, jaringan rel kereta api,

rumah murah, dan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik.

Negara Amerika merupakan negara yang mencapai era konsumsi masa tinggi ini pada tahun 1920 dan negara-negara lain di Eropa Barat juga mengikutinya. Sedangkan negara Jepang adalah negara Asia yang mencapai tahap ini (Chalid, 2015).

Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow merupakan literatur ekonomi yang paling luas beredar, dan mendapatkan komentar pada tahun-tahun terakhir. Banyak ahli ekonomi yang meragukan keaslian dari lima tahap pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Rostow diantaranya: apakah dapat diketahui satu tahap selesai dan tahap berikutnya mulai, apakah setiap perekonomian melalui tahapan yang sama, dan terlalu menggeneralisasikan urutan-urutan tahapan tersebut secara tak beralasan (Jhingan, 1983).

Berikut kita rinci masing-masing tahapan, yang menjadi kritikan beberapa ahli ekonomi:

1. Masyarakat tradisional tidak diperlukan bagi negara yang telah maju, seperti: Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru dan Australia. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu negara tidak perlu melalui tahapan pertama ini.
2. Prasyarat tidak mesti mendahului tinggal landas. Misalnya: tidak ada alasan yang tepat bahwa revolusi pertanian dan pembentukan modal dibidang transportasi harus sebelum tinggal landas.
3. Adanya tumpang tindih dalam tahapan yang berbeda, dari pengalaman Sebagian besar negara mengajarkan kepada kita bahwa perkembangan dalam pertanian terus berlanjut bahkan dalam tahap tinggal landas sekalipun. Demikian juga dengan sektor transportasi khususnya perkeretaapian, merupakan salah satu faktor yang esensial dalam tahap

- tinggal landas. Hal inilah yang menunjukkan adanya tumpang tindih dalam tahapan yang berbeda.
4. Kritikan terhadap tinggal landas. Tahap ini merupakan tahap yang kontroversial yang mendapatkan kritikan tajam dari sejarawan dan ekonom. Mereka mengkritik teori Rostow yang merupakan perpanjangan dari teori Toynbee. Teori ini hanya menekankan pada *symptom* kekuatan yang ada dan menganggap itu lebih bersifat menentukan daripada kekuatan itu sendiri.
 5. Tidak adanya kepastian waktu tinggal landas
 6. Kemungkinan kegagalan tidak diperhitungkan, contohnya pada Analisa tinggal landas yang mengabaikan pengaruh warisan sejarah, saat suatu bangsa memasuki proses pertumbuhan ekonomi modern, dengan tingkat keterbelakangan, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Dari tahap pertumbuhan yang dijelaskan Rostow di atas, maka tahapan yang ideal dan cocok pada industrialisasi Negara terbelakang adalah tahap tinggal landas. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Dasgupta bahwa “istilah ini kurang tepat, namun ia bersifat *sugestif* dan dapat memberikan penafsiran yang bermanfaat bagi pemahaman proses pembangunan ekonomi negara terbelakang. Hal ini dapat memberikan dukungan dan kekuatan dalam memberikan tafsiran yang cocok dengan kondisi ekonomi yang dipilih” (Jhingan, 1983).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrimas, 2012. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Teori, Pelaksanaan dan Permasalahan, 1st ed. Padang: Andalas University Press
- Chalid, P., 2015. Materi Pokok Teori dan isu Pembangunan, 2nd ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Jhingan, M.L., 1983. The Economics of Development and Planning, 16th ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M.P., Smith, S.C., 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Eighth Edition. ed. Jakarta: Erlangga.

BAB 5

STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Misfi Laili Rohmi

5.1 Pendahuluan

Secara formal, pembangunan ekonomi mengacu pada proses di mana ekonomi berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, dengan fokus khusus pada perubahan struktur ekonomi, sektor komersial dan industri, tingkat perubahan teknologi, serta terbukanya kesempatan kerja. Seiring dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi peningkatan standar hidup individu, keluarga dan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi.

Terkait dengan pembangunan ekonomi, negara-negara di dunia terklasifikasi ke dalam beberapa tingkatan ekonomi yang berbeda-beda, yakni negara miskin, berkembang dan negara maju. Negara maju menguasai berbagai sektor produktif yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tersedianya tenaga ahli dan teknologi yang memadai menyokong negara maju untuk tumbuh ke arah yang lebih maju. Sementara itu, negara-negara berkembang memiliki kelemahan – kelemahan yang menyebabkan mereka kesulitan untuk membangun perekonomiannya. Kurangnya tenaga ahli menyebabkan sumber daya alam tidak dapat diberdayakan secara maksimal. Oleh karena

itu, negara-negara terbelakang mengizinkan negara maju untuk mengelola sumber daya alam mereka dalam hubungan kerjasama. Namun, ternyata negara maju memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Kondisi lingkungan yang semakin rusak menimbulkan berbagai musibah di negara terbelakang. Hal ini menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh negara-negara terbelakang.

Dunia ini dihuni oleh segelintir negara-negara kaya. Mereka memanfaatkan sumber daya alam dari negara-negara terbelakang untuk diberdayakan. Selanjutnya, bahan baku yang diperoleh dari negara-negara terbelakang diolah menjadi produk jadi kemudian dijual kembali. Pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang mahal bagi negara-negara terbelakang. Oleh karena itu, mereka harus membentuk strategi untuk mengatasi hambatan pembangunan yang ada di negaranya. Dinamika perekonomian dunia dewasa ini juga ditandai oleh semakin tingginya volume aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya penambahan populasi, berdampak pada semakin tingginya permintaan input produksi dan tuntutan produk akhir yang ramah lingkungan merupakan ciri dalam perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Konsep liberalisasi dan globalisasi perekonomian dunia pada satu sisi mampu meningkatkan percepatan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara luas, namun di sisi lain juga dapat mengakibatkan tergerusnya kualitas lingkungan. Maka diperlukan upaya strategis dan sistematis dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan dasar nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diidentifikasi berdasarkan kualifikasi dari titik kemajuan negara sebagaimana disebut sebagai negara maju, berkembang dan miskin. Negara maju secara umum menguasai sektor produktif yang akhirnya mendorong dalam laju pertumbuhan ekonomi secara global. Terdapatnya tenaga ahli yang profesional dan teknologi memadai mendukung bagi negara maju untuk tumbuh ke arah

yang lebih baik. Sedangkan pada negara berkembang memiliki kelemahan-kelemahan yang berdampak pada kesulitan dalam membangun ekonominya. Hal ini juga didukung oleh kurangnya tenaga ahli profesional dalam pengelolaan sumber daya alam hingga tidak dapat diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu, negara-negara terbelakang memperbolehkan negara-negara maju untuk mengelola sumber daya alam mereka dalam bentuk hubungan kerja sama. Namun demikian ternyata negara maju malah memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan akibatnya yakni berupa kondisi lingkungan yang semakin rusak.

5.2 Hakikat Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang strategis merupakan dasar dari terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa maka harus ada hubungan yang sistemik antara pemerintah dan warga negara dalam menjalankan sistem ekonomi yang mengacu pada dasar negara (Asyafiq, 2019). Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk berubah atau kemajuan ekonomi suatu negara yang lebih baik pada satu periode dengan dibuktikan meningkatnya pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1988). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak (Lincolin, 1997).

5.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Efektif

Menciptakan strategi pembangunan ekonomi yang kuat membutuhkan upaya bersama dari banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Upaya mencapai

pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dapat dimulai dari merevitalisasi masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Konsep pembangunan konvensional yang mengedepankan pembangunan fisik dirasa tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Perlu upaya pertumbuhan ekonomi efektif dengan mensinergikan berbagai stakeholder seperti penduduk dan keterampilan mereka; arsitektur dan infrastruktur lokal; institusi akademik, teknis, dan medis; konsentrasi bisnis dan pekerjaan lokal dan regional; sumber daya budaya, alam, dan seni. Tiga komponen inti dari strategi pertumbuhan ekonomi efektif terdiri dari dukungan bisnis, dukungan para pekerja serta dukungan kualitas hidup seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 5.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Efektif
Sumber: (Kramer Mellisa, 2016)

Usaha Penunjang. Mendukung kelompok masyarakat mencapai keberhasilan dengan mengembangkan keunggulan kompetitif dengan memaksimalkan aset unik mereka untuk mendukung bisnis yang sudah ada maupun menarik investasi baru. Aset berbasis tempat ini termasuk penduduk dan keterampilan mereka; arsitektur dan infrastruktur lokal; institusi akademik, teknis, dan medis; konsentrasi bisnis dan pekerjaan lokal dan regional; sumber daya budaya, alam, dan seni; dan kualitas hidup

secara umum. Apa yang membedakan pertumbuhan ekonomi efektif dari pembangunan ekonomi konvensional adalah penekanan pada pembangunan aset masyarakat yang ada, daripada mengejar pekerjaan atau pertumbuhan basis pajak tanpa memperhatikan lokasi. Informasi ini dapat membantu mengungkapkan seberapa baik bisnis bermanfaat bagi penduduk lokal dan berkontribusi pada kualitas hidup dan industri mana yang paling potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Menargetkan sektor-sektor ekonomi utama untuk pertumbuhan memungkinkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengarahkan upaya pembangunan ekonomi mereka secara strategis, yang membantu kota-kota kecil menggunakan sumber daya mereka yang terbatas dengan bijaksana. Bagian dari strategi pengembangan ekonomi melalui pertumbuhan efektif ini tidak hanya mempertimbangkan bisnis dan industri dengan potensi pertumbuhan terbesar, tetapi juga di mana bisnis ini berada dan bagaimana keberadaan mereka membantu masyarakat memenuhi tujuan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Pekerja Pendukung. Pengembangan tenaga kerja penting untuk memastikan bahwa penduduk dapat memulai bisnis dengan baik. Komponen strategi pertumbuhan ekonomi efektif berfokus pada pemahaman komposisi meliputi lokasi bisnis, jenis bisnis, dan wirausahawan potensial. Tiga komponen inti dari strategi pertumbuhan ekonomi efektif mendukung persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja yang sama, semua penduduk memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kemakmuran ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja dengan berbagai keterampilan dan tingkat pendidikan dapat membantu bisnis lokal tumbuh dan membuka bisnis baru. Dengan menawarkan kesempatan kepada penduduk untuk mempelajari keterampilan untuk berbagai pekerjaan, upaya pengembangan tenaga kerja juga dapat mengurangi kebutuhan penduduk untuk bepergian jarak jauh untuk menemukan pekerjaan yang sesuai. Kewirausahaan, meningkatkan kesinambungan fiskal dengan memperluas dan

mendiversifikasi basis pajak, dan meningkatkan kualitas hidup dengan layanan dan fasilitas baru.

Dukungan Kualitas Hidup. Berbagai faktor dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti pusat kota yang berkembang dengan ruang terbuka hijau; berbagai pilihan transportasi, termasuk pilihan untuk berjalan kaki, bersepeda, mengemudi, dan angkutan umum; sumber daya seni, budaya, dan komunitas seperti museum, seni publik, pusat komunitas, lembaga keagamaan, dan ruang pertemuan komunitas lainnya; dan institusi medis, teknis, dan akademik. Pepohonan membantu memperbaiki lingkungan pejalan kaki sekaligus menyerap air hujan dan meningkatkan kualitas air dan udara. Elemen pembangunan ekonomi efektif ini juga mencakup mengidentifikasi lokasi-lokasi utama untuk pembangunan dengan memperhatikan ruang terbuka publik.

5.2.1 Tahapan Dalam Pembangunan Ekonomi Efektif

Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi efektif meliputi (Kramer Mellisa, 2016):

1. Membangun Investasi

Membangun investasi sangat penting untuk memulihkan ekonomi yang sedang mengalami resesi. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang baik sehingga mengundang investor. Melalui investasi, lapangan kerja dapat tercipta sehingga pengangguran dapat ditekan.

2. Bersikap taktis dan strategis

Rencana pembangunan ekonomi yang efektif harus mencakup strategi jangka panjang yang luas yang menetapkan arah dan tujuan keseluruhan untuk setiap kegiatan dan investasi yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Rencana tersebut juga harus mengidentifikasi tindakan taktis jangka pendek yang mengatasi hambatan atau tantangan khusus untuk mencapai visi jangka panjang. Sementara strategi jangka panjang mungkin

tidak berubah selama beberapa tahun, taktik harus diperbarui secara teratur untuk mencerminkan perubahan kondisi dan peluang.

3. Fokus

Investasi waktu, uang, dan sumber daya masyarakat lainnya paling efektif bila ditargetkan ke area yang cukup besar untuk menawarkan peluang perubahan kesuksesan. Namun, target investasi yang besar tersebut tentu sulit tercapai bila tidak dimulai dari lingkup yang kecil. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada satu langkah investasi dimulai dari yang kecil kemudian perlahan berkembang ke tingkat investasi yang lebih besar.

4. Mulai dari yang sudah ada

Upaya pembangunan paling efektif di tempat-tempat di mana sudah ada beberapa kegiatan sektor swasta sehingga investasi publik dapat memperkuat dan mendukung investasi oleh pemilik rumah perorangan, pemilik bisnis, pemilik properti komersial, dan/ atau bank dan lembaga keuangan lainnya.

5. Temukan mitra yang tepat untuk tujuan tertentu.

Upaya pembangunan ekonomi yang berhasil bergantung pada kemitraan lintas lembaga publik, terutama ketika berbagai jenis pendanaan dilibatkan. Melibatkan mitra ini untuk tujuan spesifik dan misi yang sesuai lebih efektif daripada mencoba mencari dukungan untuk inisiatif yang luas atau kurang jelas. Masyarakat juga dapat menetapkan tujuan untuk diselaraskan dengan sumber pendanaan tertentu untuk meningkatkan peluang mendapatkan uang untuk implementasi.

6. Berkomunikasi dan berkoordinasi

Komunikasi dan koordinasi yang baik antarkelompok dan lembaga dapat membantu memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia mendukung visi masyarakat. Untuk daerah-daerah kecil dengan sumber daya terbatas,

koordinasi ini dapat membantu mencapai tujuan dengan biaya minimal.

5.2.2 Strategi Pembangunan Ekonomi Efektif

Keputusan untuk membuat strategi pembangunan ekonomi dapat muncul dari berbagai keadaan. Misalnya, masyarakat dapat membuat strategi pembangunan ekonomi: Saat terjadi krisis, seperti penutupan perusahaan besar, bencana alam. Apa pun alasannya, masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan mengikuti proses yang ditetapkan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan ekonomi akan memiliki peluang terbesar untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat. Mempersiapkan strategi pembangunan ekonomi memiliki lima langkah kunci:

(1) Memilih fokus area

Langkah awal dalam mempersiapkan strategi pembangunan ekonomi efektif adalah memilih lokasi, lingkungan, atau fokus area tertentu. Setiap area akan memiliki tujuan, indikator, dan alat implementasi yang berbeda. Misalnya, kebutuhan bisnis di kawasan industri kemungkinan akan sangat berbeda dengan kebutuhan pedagang di pusat kota. Apakah suatu komunitas sedang mempersiapkan strategi untuk seluruh kota atau satu kabupaten atau lingkungan, kemungkinan ada beberapa sub-area, yang masing-masing ditentukan oleh pola dan/atau tujuan penggunaan lahan yang berbeda. Faktanya, penekanan pada aset berbasis tempat tertentu dalam suatu komunitas membedakan strategi pembangunan ekonomi.

(2) Menetapkan konteks

Langkah ini melibatkan masyarakat yang mengetahui deskripsi kondisi di wilayah sasaran berdasarkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Sedapat mungkin, deskripsi ini harus mencakup informasi sebelumnya oleh pelaku sektor publik dan swasta, yang menunjukkan

mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, dan yang terbukti membantu tetapi belum berdampak banyak. Karena pembangunan ekonomi berkaitan dengan pekerjaan, industri, dan pendapatan pajak, masyarakat terkadang melakukan pengumpulan dan analisis data yang ekstensif sebelum menentukan tujuan pembangunan ekonomi mereka. Sementara data dapat memainkan peran penting dalam menentukan konteks dan tantangan yang ada pada wilayah tertentu.

(3) Menetapkan tujuan

Langkah lain dalam menciptakan strategi pembangunan ekonomi yang efektif adalah mengidentifikasi tujuan yang jelas terkait dengan kondisi spesifik di wilayah tertentu. Tujuan-tujuan ini harus aspiratif serta dapat dicapai. Sasarannya dibagi menjadi tiga kategori—mendukung bisnis, mendukung pekerja, dan mendukung kualitas hidup—berdasarkan komponen strategi pembangunan ekonomi pertumbuhan efektif.

(4) Mengidentifikasi hambatan yang ada

Strategi pembangunan ekonomi yang efektif harus mencerminkan aset yang ada di suatu daerah serta hambatan dalam pencapaian tujuan masyarakat tersebut harus dapat diidentifikasi. Mengidentifikasi hambatan untuk mencapai tujuan merupakan langkah penting karena sumber daya umumnya lebih efektif ketika mereka dipilih untuk mengatasi hambatan tertentu daripada mencapai tujuan yang luas. Misalnya, jika sebuah kota memiliki tujuan untuk membuat pusat kotanya lebih semarak, potensi hambatan untuk mencapai tujuan ini beragam, termasuk:

- a) Ruang ritel usang dan berukuran kecil
- b) Kurangnya penduduk sekitar untuk mendukung permintaan ritel
- c) Pemilik properti tidak tertarik untuk berinvestasi

di gedung-gedung di pusat kota

- d) Kebutuhan akan tempat parkir tambahan yang nyaman

Masing-masing hambatan ini membutuhkan alat yang berbeda untuk mencapai tujuan pusat kota yang dinamis. Misalnya, program perbaikan fasilitas tidak akan membantu secara signifikan jika masalah utamanya adalah kurangnya penduduk sekitar untuk mendukung bisnis yang ada.

(5) Memilih kebijakan yang tepat

Kebijakan paling efektif bila dikaitkan dengan hambatan tertentu. Terkadang lebih dari satu kebijakan dapat membantu mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan yang dapat dijadikan alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efektif mencakup bidang:

- a) Kebijakan penggunaan lahan
- b) Membangun kemitraan
- c) Pengembangan usaha dan kewirausahaan.
- d) Pengembangan tenaga kerja dan ketenagakerjaan
- e) Kesehatan dan lingkungan
- f) Pelestarian ruang terbuka
- g) Transportasi umum
- h) Pembiayaan infrastruktur

DAFTAR PUSTAKA

- Asyafiq, S. 2019. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28, pp. 18–30.
- Boediono. 1988. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kramer Mellisa. 2016. *Framework For Creating a Smart Growth Economic Development Strategy: a Tool For Small Cities and Town*. Washington DC.
- Kurniawan, D. 2010. Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. *Unisfat*, pp. 1–15. Available at: <https://ejournal.unisfat.ac.id/index.php/jg/article/view/189/128>.
- Lincoln, A. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Siwu, H. F. D. 2017. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(06), pp. 1–11. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/16464>.

BAB 6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Fitri S. Kasim

6.1 Pendahuluan

Perencanaan merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Artinya, setiap aktivitas akan berbeda setiap orangnya menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan disusun secara sistematis, terarah dan terukur serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Namun, bagi orang lain perencanaan tanpa disadari sudah dilakukan dalam aktivitas kesehariannya, misalnya perencanaan yang harus dilakukan seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Demikian halnya negara baik itu pemerintah pusat, maupun daerah memiliki perencanaannya masing-masing menyesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki untuk membangun wilayahnya. Di Indonesia untuk mendukung perencanaan pembangunan, maka pemerintah menetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Development planning atau perencanaan pembangunan diperlukan untuk membangun suatu daerah dikarenakan perbedaan sumberdaya alam maupun manusia di setiap daerah, maka dari itu dengan adanya perencanaan diharapkan bisa memprioritas potensi sumberdaya dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada kenyataannya, landasan dilakukannya perencanaan pembangunan yaitu tujuan yang ingin dicapai dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Menurut (Tarigan, 2015:3) perencanaan yaitu cara mengetahui selanjutnya menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

6.2 Pengertian perencanaan

Hakikatnya yang dimaksud dengan perencanaan yaitu mengarah pada suatu sistem atau metode untuk sampai ketujuan yang diharapkan oleh perencana atau institusi dengan tepat sasaran, efisien dan terukur. Menurut UU No. 25 Tahun 2004, perencanaan adalah metode memilih langkah-langkah masa depan yang diinginkan oleh perencana atau instansi dengan rangkaian pilihan dan memperkirakan sumberdaya yang tersedia (Indonesia, 2004). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perencanaan yaitu proses, perbuatan merencanakan (merancangkan). Para ahli menggunakan definisi berlainan untuk sebutan perencanaan. Untuk memperoleh gambaran perbandingan, maka berikut definisi pendapat dari beberapa para ahli yaitu:

Dalam kamus management karangan (Moekijat, 1980) berpendapat bahwa perencanaan adalah upaya untuk membuat rencana kegiatan, maksudnya memilih sesuatu yang akan direncanakan, siapa yang akan melaksanakan rencana, dan di mana lokasi untuk merealisasikan rencana tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994) dalam (Arsyad, 1999:19), perencanaan adalah proses kegiatan berkelanjutan yang mencakup putusan-putusan yang beraneka macam pilihan pemakaian sumberdaya untuk mewujudkan tujuan di masa depan.

(Arsyad, 1999) membagi empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. Menyusun rencana artinya menentukan pilihan rencana yang akan dilakukan;
2. perencanaan adalah sarana untuk pembagian sumberdaya untuk mewujudkan tujuan;
3. perencanaan adalah sarana untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan;
4. perencanaan yaitu mengarah ke pandangan dasar dan sikap ke masa depan untuk mewujudkan tujuan.

Sedangkan menurut (Todaro and Smith, 2012:513) perencanaan ekonomi digambarkan sebagai upaya pemerintah yang disengaja untuk mengkoordinasikan pengambilan putusan ekonomi jangka panjang dan untuk mempengaruhi langsung dan dalam beberapa kasus bahkan mengontrol tingkat pertumbuhan suatu negara melalui variabel ekonomi (pendapatan, konsumsi, pengangguran, investasi, tabungan, ekspor, impor dan lain-lain) demi mewujudkan serangkaian tujuan yang sudah direncanakan.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari perencanaan adalah bagaimana kita sebagai seorang perencana menetapkan tujuan yang ingin kita capai dan membuat strategi atau metode seperti apa yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

6.3 Unsur dan fungsi perencanaan pembangunan

6.3.1 Unsur perencanaan pembangunan

Para ahli memberikan pendapat mengenai konsep dasar perencanaan berdasarkan unsur-unsur perencanaan meliputi (Nursini, 2010:3):

1. Proses, artinya seorang perencana melakukan strategi yang nanti digunakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

2. Pembagian sumberdaya, maksudnya seorang perencana harus bisa memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan modal yang tersedia dengan baik. Karena kualitas dan kuantitas sumberdaya menentukan berhasil atau tidaknya rencana.
3. Alat mencapai tujuan, mengandung arti perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan.
4. Merencanakan berarti membuat pilihan, artinya perencanaan adalah proses kegiatan untuk memilih; a) memilih beragam preferensi tujuan agar mencapai keadaan lebih baik; b). Memilih metode untuk mencapai tujuan; c). Memilih rencana yang di prioritaskan, mengingat tidak semua apa yang direncanakan diselesaikan secara bersamaan dalam satu waktu dan juga harus memperhitungkan modal yang dimiliki.
5. Masa depan, artinya saat melakukan perencanaan seorang perencana mempertimbangkan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Apakah program yang akan dilaksanakan bertujuan jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Implikasinya akan bertautan dengan proyeksi (ramalan), waktu kegiatan, monitoring dan evaluasi.

Unsur-unsur perencanaan apabila kita amati dari segi implementasinya dilapangan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu:

1. *Vision* (visi): Suatu kerangka keinginan yang ingin di capai seorang perencana di masa depan.
2. *Mission* (misi): Metode atau teknik yang harus dilalui setiap perencana dengan tujuan untuk mencapai visi.
3. *Planning* (perencanaan): rencana yang akan kita realisasikan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

4. *Planning goals* (tujuan perencanaan): kegiatan yang ingin dicapai.
5. *Target* (sasaran): wujud dari tujuan yang akan dicapai, umumnya lebih terukur diikuti dengan *target* perolehannya.
6. *Strategy* (strategi): metode yang diambil selama kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah disusun sebelumnya.
7. *Policy* (kebijakan): Mengacu kepada peran pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang terdapat ketika melakukan perencanaan sebagai landasan atau dasar seorang perencana untuk melakukan kegiatannya.
8. *Action* (tindakan): Aktivitas untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, target dan strategi yang sudah disusun.

Menurut (Taufiqurokhman, 2008:8-9) unsur perencanaan yang baik dan ideal mengandung lima pertanyaan yaitu; *what, why, where, when, who dan how* atau bisa kita singkat dengan 5 W + 1 H. Berikut penjelasannya:

1. *What* artinya apa yang akan dilakukan oleh seorang perencana atau institusi untuk mewujudkan tujuan yang sudah di rencanakan sebelumnya.
2. *Why* artinya mengapa seorang perencana atau institusi tersebut harus mewujudkan tujuan tersebut.
3. *Where* artinya di mana perencanaan tersebut akan dikerjakan.
4. *When*, merujuk pada waktu pelaksanaan atau kapan perencanaan itu akan di laksanakan.
5. *Who*, siapa yang akan melaksanakan tugas yang telah direncanakan.
6. Dan yang terakhir *How*, bagaimana metode yang akan dilakukan untuk menyelesaikan rencana yang sudah

disepakati agar bisa mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

6.3.2 Fungsi Perencanaan Pembangunan

Landasan adanya fungsi perencanaan pembangunan mengarah kepada proses penetapan atas rencana mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh perencana atau institusi, dengan mengoptimalkan sumberdaya baik itu alam maupun manusia agar selama kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien. Relevansi dari perencanaan itu sendiri agar bisa melakukan perbaikan sedini mungkin jika terjadi kesalahan dilapangan, mengidentifikasi kendala atau halangan eksternal dan internal. Fungsi perencanaan menurut UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Indonesia, 2004), yaitu :

1. Membantu pengaturan antar pelaksana pembangunan;
2. Menjamin terwujudnya penggabungan, penyelarasan, serta sinergisme antar pemerintah pusat dan daerah;
3. Menjamin adanya hubungan keterlibatan dan keselarasan perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.
4. Memaksimalkan keikutsertaan masyarakat saat perencanaan pembangunan akan dilaksanakan.
5. Menjamin penggunaan sumberdaya yang akan digunakan tepat guna.

6.4 Jenis-jenis perencanaan pembangunan

(Tarigan, 2015: 13-19) berpendapat bahwa jenis-jenis perencanaan bisa kita lihat dari berbagai segi, Berikut adalah uraian masing-masing jenis perencanaan:

1. Perencanaan fisik versus perencanaan ekonomi

Perencanaan fisik atau perencanaan bagian infrastruktur, yang kegiatannya yaitu memanfaatkan bentuk fisik suatu

wilayah. Misalnya perencanaan dibidang jalur transportasi. Sedangkan, perencanaan ekonomi adalah perencanaan yang fokus utamanya bagaimana untuk membenahi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

2. Perencanaan alokatif versus perencanaan inovatif

Perencanaan alokatif (*allocative planning*), merupakan perencanaan yang mendukung rencana kegiatan yang bersifat umum atau biasa disebut dengan mengatur perencanaan agar berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan inovatif (*innovative planning*, disini seorang perencana diberikan wewenang secara penuh atau bebas untuk menentukan metode atau langkah-langkah yang akan digunakan, dengan catatan tujuan yang sudah disepakati bisa tercapai.

3. Perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal

Perencanaan dapat mempunyai tujuan tunggal atau jamak. Perencanaan bertujuan tunggal jika tujuan yang akan dicapai hanya satu-satunya dalam satu periode. Perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai bersamaan.

4. Perencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujuan laten

Perencanaan bertujuan jelas adalah rencana yang tujuannya pasti (nyata) dan terukur berhasil tidaknya rencana tersebut. Sedangkan perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak mengatakan sasaran bahkan tujuannya pun kurang jelas oleh karena itu akan susah untuk mendeskripsikannya.

5. Perencanaan indikatif versus perencanaan imperaktif

Perencanaan indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk petunjuk artinya perencana belum tegas untuk menetapkan tujuannya. Perencanaan imperaktif atau

perencanaan sistem komando adalah perencanaan yang sistem dengan baik tujuan, metode, pengoperasian, bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk merealisasikan rencana tersebut.

6. *Top down versus botton up planning*

Perencanaan model *top-down*, ketika kewenangan utama perencanaan dilakukan oleh pimpinan pada level tinggi dan level dibawahnya mengikuti arahan rencana yang dimaksud. Sebaliknya, *botton-up* adalah ketika kewenangan utama perencanaan dilakukan pada level bawah maka yang ada pada level atas wajib menerima semua usulan yang diberikan.

7. *Vertical versus horizontal planning*

Vertical planning adalah perencanaan yang memprioritaskan koordinasi antara pihak yang terlibat di dalam rencana. Horizontal planning yaitu perencanaan yang memfokuskan keterlibatan antar pihak yang sama sehingga akan berjalan secara sinergi.

8. *Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung versus yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung.*

Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Sebaliknya, perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan paling-paling hanya dimintakan persetujuan yang diwakili oleh DPRD untuk persetujuan akhir.

6.5 Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, ada empat tahapan perencanaan yang sering digunakan dalam praktiknya di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Perencanaan pembangunan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota (Indonesia, 2004).

1. Menyusun rencana, maksudnya kita menyusun rencana yang akan dilakukan dalam bentuk dokumen rencana yang utuh dan rampung, terdiri dari empat tahap: *Pertama*, penyiapan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, komrehensif, dan ternilai. *Kedua*, pihak-pihak yang ingin terlibat dalam rencana, menyediakan program yang akan dilakukan. *Berikutnya* adalah melibatkan rakyat dan menyesuaikan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan, *keempat* yaitu penyusunan dokumen final rencana pembangunan.
2. Penetapan rencana, adalah melahirkan rencana menjadi produk hukum agar mengikat seluruh pihak terlibat dalam rencana.
3. Pengawasan rencana, maksudnya apabila terjadi kesalahan dilapangan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan maka dengan cepat bisa melakukan koreksi dan penyesuaian agar rencana yang sudah dibuat akan terlaksana dengan baik.
4. Evaluasi rencana adalah kegiatan akhir dari perencanaan dengan melakukan penilaian secara sistematis, menganalisis data dan informasi untuk menilai hasil dari kinerja selama berlangsung pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Moekijat. 1980. *Kamus Management*. Bandung: Penerbit ALUMNI.
- Nursini 2010. *Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Teori Dan Aplikasi)*. pp. 1–251. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf>.
- Tarigan, R. 2015. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. 7th edn. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Taufiqurokhman. 2008. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan', Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*, pp. 1–106. Available at: <http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>.
- Todaro, M.P. and Smith, S.C. 2012. *The Developed and Developing World Income*.
- Indonesia, R. 2004. *Undang-undang (UU) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Indonesia: LN. 2004 (104): 19 HLM, TLN 4421: 13 HLM. Available at: <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/60>.

BAB 7

PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Oleh Tri Widayati

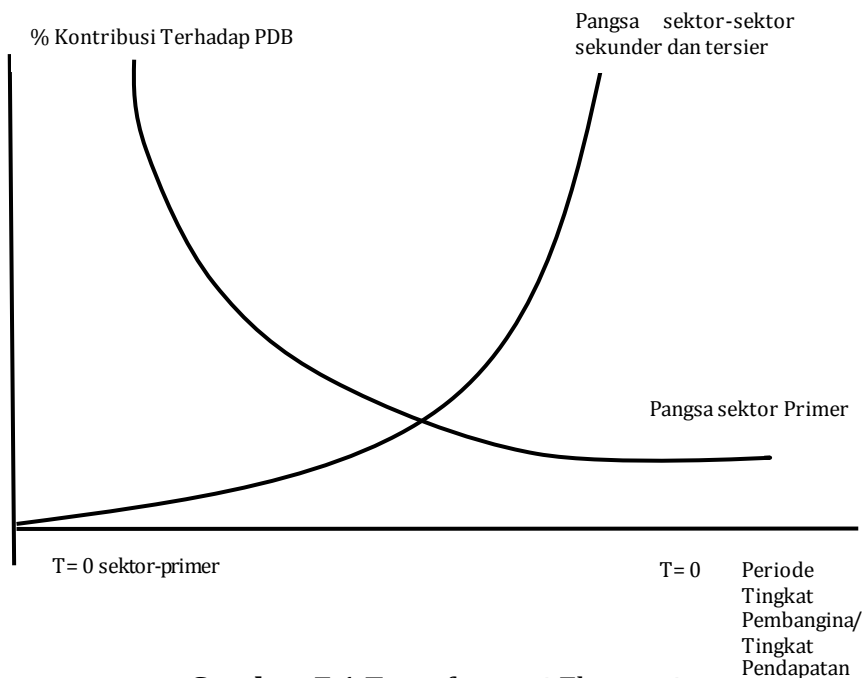
7.1 Pendahuluan

Struktur perekonomian suatu daerah tercermin dari kontribusi terbesar sektor tersebut terhadap produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto. Struktur perekonomian dapat diartikan sebagai susunan peran masing-masing sektor dalam perekonomian, baik menurut industrinya maupun dengan membagi sektor tersebut menjadi primer, sekunder, dan tersier. Pada hakikatnya, proses pembangunan bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi memiliki perspektif yang luas. Dalam proses pembangunan dilakukan upaya untuk mengubah struktur perekonomian menjadi lebih baik.

Dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan struktur ekonomi tidak dapat dihindarkan. Proses pertumbuhan pendapatan nasional di suatu negara akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi, dari yang tradisional dengan sektor pertanian menjadi sektor ekonomi modern yang didominasi oleh sektor non-primer, terutama manufaktur. dengan meningkatnya skala hasil (hubungan positif antara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan produktivitas) dinamis sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1993)

Pembahasan perubahan struktural menitikberatkan pada transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor yang modern seperti sektor jasa dan industri. (Juliadi, 2000)

Perubahan distribusi produk nasional dari sektor primer ke sektor non primer semakin cepat, didorong proses pindahnya faktor produksi modal dan tenaga kerja. Realokasi tersebut dipicu perbedaan harga, profit dan upah riil antara sektor-sektor primer yang lebih rendah dengan sektor non primer yang lebih tinggi. Profit di sektor non primer lebih tinggi dibandingkan di sektor primer, maka terjadi akumulasi modal yang pesat pada sektor non primer. Urbanisasi terjadi mengikuti perubahan struktur ekonomi dan terjadi juga migrasi yang pesat dari perdesaan ke perkotaan. (Tambunan, 2018). Transformasi ekonomi tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7.1 Transformasi Ekonomi
 (Sumber : Tambunan, 2018)

7.2 Teori Perubahan Struktural

Analisis Kuznet menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi secara umum disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai serangkaian perubahan yang saling terkait dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, dan penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi). produksi, seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan(Chenery, 1979)

Kuznet mengumpulkan data kontribusi berbagai sektor kepada produksi nasional di tigabelas Negara yang masuk dalam katagori Negara Maju. Dari penelitiannya, Kuznets membuat kesimpulan mengenai corak perubahan persentasi sumbangan berbagai sektor dalam menciptakan Produksi Nasional sebagai berikut :

1. Di tigabelas negara, kontribusi sektor pertanian terhadap produksi nasional menurun di 12 dari 13 negara. Industri menyumbang hamper setengah bahkan duapertiga dari total output nasional, pada awal pembangunan. Peran sektor pertanian dalam menciptakan produksi nasional hanya 20 persen atau kurang di sebagian besar negara, dan di beberapa negara pangasanya kurang dari 10 persen pada akhir tahun pengamatan, kecuali Australia. Peranan sektor pertanian di Australia dalam delapan dasawarsa bertambah besar, walaupun dalam jangka masa itu kemajuan ekonominya terus menerus berlangsung
2. Terjadi peningkatan kontribusi sektor industri dalam produksi nasional. Sektor industri mengalami peningkatan dari 20 sampai dengan 30 persen pada awal penelitian, meningkat menjadi 40 sampai dengan 50 persen pada akhir observasi.

3. Sektor jasa tidak mengalami perubahan kontribusi yang signifikan, dan perubahannya tidak konsisten sifatnya. Secara umum, penurunan sektor pertanian dalam produksi nasional diimbangi oleh kenaikan yang hampir sama besarnya pada sektor industri. Hal ini menyebabkan peranan sektor jasa-jasa tidak mengalami perubahan yang berarti. Perubahan struktur ekonomi yang coraknya seperti yang digambarkan di atas berarti bahwa (i) Perkembangan produksi sektor pertanian yang melambat; (ii) Sektor industri mengalami pertambahan lebih cepat daripada tingkat pertambahan produksi nasional; dan (iii) Peranan sektor jasa tidak mengalami perubahan yang signifikan..

Faktor yang menjadi penyebab perubahan struktur ekonomi tersebut yaitu:

- 1) Sifat manusia dalam berkonsumsi, dimana ketika pendapatan meningkat, elastisitas permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan (elastisitas pendapatan permintaan) rendah. untuk konsumsi bahan baku. -bahan makanan. Disisi lain, permintaan sandang, perumahan, dan barang konsumsi industri adalah kebalikannya. Engels menunjukkan sifat permintaan ini, yang dikenal dengan hukum Engels. Inti teori ini adalah semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin kecil proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan-bahan pertanian. Di sisi lain, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang industri meningkat.
- 2) Teknologi terus berubah. Perubahan teknologi yang terjadi dalam proses pembangunan akan menyebabkan perubahan struktur produksi yang bersifat koersif dan induktif. Kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi akan memperluas pasar dan kegiatan

perdagangan. Perubahan seperti ini akan menciptakan kebutuhan untuk menghasilkan hal-hal baru.

Teori transformasi struktural, dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :

1. Teori Pembangunan Arthur Lewis

Proses perkembangan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan kota (Urban) merupakan inti dari teori Arthur Lewis. Dalam teorinya, Lewis mengatakan bahwa ekonomi negara sebenarnya terbagi menjadi dua bagian: ekonomi pedesaan tradisional yang didominasi oleh sektor pertanian, dan ekonomi perkotaan modern dengan industri sebagai sektor utama. Di daerah pedesaan ada surplus tenaga kerja karena pertumbuhan penduduk yang kuat dan standar hidup penduduk di tingkat subsisten karena pertanian subsisten. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk matjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah.

Model dua sektor dalam teori Lewis adalah sebagai berikut: (Todaro, 2011)

a) Ekonomi Tradisional

Dalam teori ini, Lewis menganggap daerah pedesaan dengan ekonomi tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Ekonomi tradisional menyatakan bahwa standar hidup masyarakat adalah tingkat subsisten, karena kelebihan penduduk dan ditandai dengan nol produktivitas tenaga kerja marjinal. Situasi ini memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan keadaan surplus tenaga kerja sebagai fakta bahwa jika sebagian angkatan kerja ditarik dari sektor pertanian, sektor pertanian tidak akan kehilangan output.

b) Ekonomi industri

Ekonomi industri terletak di kota-kota modern, dimana sektor industri memegang peranan penting. Ciri

ekonomi ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer dari sektor subsisten. Perekonomian perkotaan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan sehingga menambahnya tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi

2. Teori Fei -Ranis

Konsep yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri merupakan inti dari Model Fei-Ranis. Ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh, yaitu :

- 1) Tahap di mana para penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
- 2) Tahap di mana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan ke sektor industri.
- 3) Tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan pertambahan output dan perluasan usahanya

3. Teori Chenery

Analisis pola pembangunan menjelaskan perubahan struktural dalam proses perubahan ekonomi di negara berkembang, yang berubah dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per

kapita, yang berkaitan dengan akumulasi modal dan peningkatan sumber daya manusia.

a) Dari sudut permintaan domestik

Dari sudut pandang permintaan domestik, permintaan pangan akan menurun karena akan diimbangi dengan peningkatan permintaan untuk barang-barang non-makanan, investasi yang lebih tinggi dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan GNP yang ada . Perubahan juga terjadi pada sektor perdagangan internasional, yaitu peningkatan nilai ekspor dan impor. Selama perubahan struktural ini, pangsa ekspor barang-barang produksi industri meningkat dan pangsa sektor yang sama di sisi impor menurun.

b) Dari sudut pekerja

Dari sudut pandang pekerja akan terjadi perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri, tetapi masih akan tertinggal dari perubahan struktural. Dengan penundaan ini, maka sektor pertanian akan berperan penting dalam meningkatkan pasokan tenaga kerja di awal dan di akhir proses transformasi perubahan struktural (Kuncoro, 2003).

7.3 Perubahan Struktur Perekonomian Negara-Negara Berkembang

Mekanisme transformasi ekonomi yang dialami Negara-Negara Sedang Berkembang yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju kepada struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer (khususnya industri dan jasa) merupakan hal yang menjadi titik berat dari Teori Perubahan Struktural. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam

menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari arthur lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (Tambunan, 2018)

Didalam kelompok Negara Sedang Berkembang, banyak Negara yang mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga decade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar Negara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antarnegara dalam sejumlah faktor-faktor internal berikut : (Tambunan, 2018)

1. Basis Ekonomi (Kondisi struktur awal ekonomi dalam negeri)

Jika pada awal pembangunannya suatu Negara sudah memiliki industri dasar seperti mesin, besi dan baja yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat/cepat dibandingkan dengan Negara yang hanya memiliki industri-industri ringan seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman

2. Besarnya pasar dalam negeri

Besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan riil perkapita. Pasar Dalam negeri yang besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 275.361.267 jiwa. (Sumber : Dukcapil, 30 Juni 2022) merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri, karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi dengan asumsi bahwa faktor-faktor lainnya mendukung.

3. Pola Distribusi Pendapatan

Faktor ini sangat mendukung faktor pasar di atas. Walaupun tingkat pendapatan perkapita naik pesat, tetapi kalau distribusinya sangat timpang, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri-industri selain industri-industri yang membuat barang sederhana makanan dan minuman, sepatu dan pakaian jadi.

4. Karakteristik dari industrialisasi

Cara cara pelaksanaan dan strategi pengembangan industri

yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri dan insentif yang diberikan.

5. Karakteristik Sumber Daya Alam

Ada kecenderungan bahwa Negara yang kaya SDA nya mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah atau lambat melakukan industrialisasi dibandingkan dengan Negara-negara yang kecil atau miskin SDA nya.

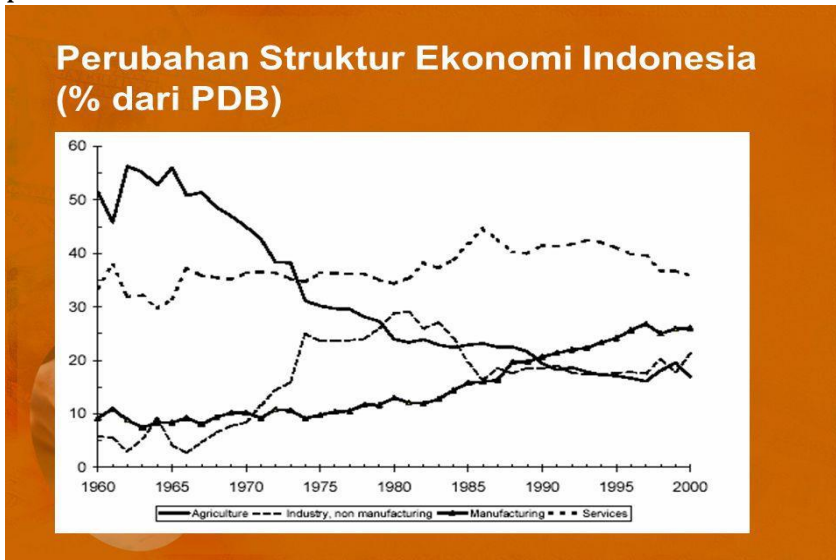
6. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Negara yang menetapkan kebijakan ekonomi tertutup, pola dan hasil industrinya berbeda dibandingkan dengan Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka.

Meningkatnya perhatian terhadap perkembangan ekonomi negara-negara berkembang mendorong upaya peningkatan pendataan kegiatan ekonomi di negara-negara tersebut. Sebagai hasil dari upaya ini, lebih banyak data dapat dikumpulkan tentang berbagai aspek kegiatan ekonomi negara hanya dalam beberapa tahun. Pertumbuhan jumlah dan jenis data kegiatan ekonomi di negara berkembang memungkinkan peneliti ekonomi untuk menganalisis perubahan struktur kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan yang terjadi di negara berkembang. Kuznets juga berada di garis depan studi ini, dan dalam beberapa tahun terakhir, banyak dari studi ini telah dilakukan oleh Chenery dalam usaha patungan dengan ekonom lain. Dalam penelitian terbarunya, Chenery, dengan dukungan Syrquin, menggunakan berbagai data yang menggambarkan kegiatan ekonomi di negara berkembang untuk menunjukkan karakteristik perubahan struktur ekonomi negara berkembang dalam proses pembangunan ekonomi antara tahun 1950-an dan 1970-an.

7.4 Perubahan Struktur Ekonomi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi sehingga akan berpengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Struktur ekonomi yang terjadi di Indonesia selama periode 1950-2015 mengalami perubahan dari Negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian hingga tahun 1970. Sejak tahun 1980-an berkembang menjadi Negara yang mendandankan sektor industri dan sektor lain di luar sektor pertanian.



Gambar 7.2 Perubahan struktur ekonomi indonesia

Sumber : bps.go.id

Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1985, sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dibandingkan sektor lainnya, penyumbang kedua adalah sektor pertambangan. Namun sejak tahun 1995, kontribusi sektor pertanian dan pertambangan yang tinggi telah digantikan oleh sektor industri dan perhotelan. Walaupun kontribusi dari

sektor industri dan pengolahan terus meningkat dari tahun 1985 hingga 2010, terlihat bahwa kontribusi dari industri dan sektor pengolahan cenderung terus menurun dan penurunan kontribusi diisi oleh kontribusi dari sektor keuangan. dan sektor jasa. Sementara itu, kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami stagnasi

DAFTAR PUSTAKA

- Chenery, H. B. 1979. *Structural change and development policy*. xviii. New York: Oxford University Press.
- Juliadi, I. 2000. Pola Perubahan Struktur Ekonomi', *JESP*, I, no 1, pp. 14–28.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan : teori, masalah dan kebijakan*. 4th edn. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tambunan, T. T. . 2018. *Perekonomian Indonesia 1965-2018*. 1st edn. Edited by Y. S. Bogor.
- Todaro, M. P. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. 11th edn. Jakarta: Erlangga.
- Weiss, J. 1993. *Industry in developing countries: theory, policy and evidence*. xvii. New York: Routledge.

BAB 8

UNSUR-UNSUR POKOK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Oleh Rina Arum Prastyanti

8.1 Pendahuluan

Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 disebutkan dalam Undang-Undang dasar 1945 "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social., oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan membuat kebijakan dan strategi untuk mencapainya yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional lima tahun berturut-turut yang di gulirkan dalam rencana pembangunan. Periode ini juga melihat kemajuan ekonomi yang baik dan politik yang luar biasa stabilitas. Pada tahun 1988, Pemerintah memutuskan untuk memulai perencanaan yang lebih baik dan lebih komprehensif sistem yang dirancang untuk memenuhi tantangan serius yang muncul. Strategi Pembangunan Nasional (NDS) adalah bagian dari sistem perencanaan baru ini. Proses kompilasi NDS dimulai oleh kumpulan pandangan dari masyarakat umum yang dicapai melalui penunjukan Economic Review Commission (ERC) oleh Yang Mulia. Laporan dari ERC, diterbitkan pada tahun 1995, meminta konsensus nasional dan menghasilkan rekomendasi yang menuntut perumusan strategi untuk memenuhi aspirasi bangsa. Setelah selesainya latihan Economic Review Commission yang

merupakan yang pertama fase proses NDS, delapan komite sektor dibebani tanggung jawab untuk: memberikan analisis mendalam untuk area tertentu. Idenya adalah untuk memberikan materi latar belakang untuk memandu pemikiran strategis dalam perumusan visi dan jangka panjang nasional strategi pembangunan bagi negara. Setelah pencalonan perwakilan pemangku kepentingan, proses konsultasi adalah semakin diperkuat dengan penunjukan yang dilakukan oleh Yang Mulia kepada kelompok pemangku kepentingan. Para wakil diberi tanggung jawab untuk mengartikulasikan visi jangka panjang, mengidentifikasi bidang-bidang utama pembangunan di mana sumber daya nasional akan dialokasikan dan perumusan strategi makro dan sektoral untuk pencapaian visi negara. Dokumen NDS telah disusun berdasarkan laporan kelompok pemangku kepentingan dan itu akan memberikan kerangka kerja jangka panjang (25 tahun) di mana jangka pendek dan menengah rencana pembangunan yang akan dibuat.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi dunia ketika tiba-tiba Munculnya wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan - Cina, kemudian menyebar dan menghancurkan sendi-sendi perekonomian dunia (Jennifer, 2020). Hingga Agustus 2020, Indonesia telah melaporkan 125.396 kasus positif, terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina (BNPB, 2020). Di Dari segi kematian, Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia dengan 5.723 kematian. Namun, tingkat kematian diperkirakan jauh lebih tinggi daripada data dilaporkan karena tidak ada kasus kematian dengan COVID-19 akut gejala yang belum dikonfirmasi atau diuji (BBC, 2020). Sementara itu, diumumkan bahwa 80.952 orang telah pulih, meninggalkan 38.721 kasus saat ini sedang dirawat. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada perekonomian dunia praktis telah memaksa semua negara di dunia untuk mundur dengan rencana strategis yang telah ditentukan, yang kemudian diganti dengan darurat kebijakan respon dengan mengerahkan semua sumber daya untuk

108

mengatasi Covid-19 kejadian luar biasa. Lembaga think tank dan pemikir strategis telah mengoreksi proyeksi, terutama pada tahun 2020, yang kemungkinan akan melihat perlambatan ekonomi, resesi, dan bahkan depresi. Pembangunan di setiap negara pasti terjadi terganggu. Setiap negara merevisi anggaran negaranya dan memberikan alokasi dana untuk menangani wabah korona ini. Mengingat penyakit datang melalui coronavirus cukup mematikan (rata-rata, sekitar 3-5% dari kematian dari korban yang telah terkena virus), kemudian obat paten belum ditemukan. Hanya solusi pencegahan yang merupakan cara terbaik untuk dilakukan sehingga setiap negara dapat melindungi setiap kehidupan warganya (Wang & Tang, 2020).

Berbagai negara telah menerapkan kebijakan penguncian untuk membatasi penyebaran virus ini secara menyeluruh. Namun, mengubah perilaku sosial masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai negara, dengan segala keterbatasannya, menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Bahkan negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sangat kewalahan. Kebijakan umum yang mengharuskan orang untuk melaksanakan social dan physical distancing (menjaga jarak aman antara individu dan menghindari keramaian) tidak mudah bagi manusia di bumi terbiasa dengan perilaku sosialnya (Fang, Nie, & Penny, 2020). Itu Kebijakan lockdown kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Beberapa berlaku secara penuh, sebagian, atau lokal dan minimum. Kemudian, di awal Juni, pemerintah Indonesia mulai menerapkan new normal aturan. Pengertian new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi (Isyunanda, 2020). Itu Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menerapkan normal baru skenario dengan mempertimbangkan studi epidemiologi dan regional kesiapsiagaan (Charles, 2020). Pemerintah daerah diperbolehkan untuk mempersiapkan new normal jika wilayahnya berada pada level sedang. Beberapa sektor

sedang mempersiapkan prosedur operasi standar skenario normal baru.

Beberapa penelitian telah menjelaskan bahwa kebiasaan yang terus menerus dilakukan akan menjadi kebiasaan baru. Pada titik ini, hampir semua sosial peneliti memiliki pendapat yang sama. Perbedaannya terletak pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru. Beberapa ahli menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk yang baru kebiasaan yang harus diciptakan antara lain 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru (Maxwell, 2020). Namun, Lally, dkk. (2010) dari University College London mengatakannya studi menetapkan rata-rata 66 hari untuk mengubah kebiasaan menjadi kebiasaan (Lally, Jaarsveld, Cornelia H, M, Potts, & Wardle, 2010). Prinsip baru normal adalah mampu beradaptasi dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru selama pandemi, yang kemudian akan diteruskan sampai ditemukan vaksin untuk Covid-19 (Sitorus, 2020). Ke membiasakan masyarakat, Tim Satgas merumuskan gerakan berjudul empat sehat lima sempurna (Zahrotunnimah, 2020). Gerakan ini adalah tidak sama dengan pola konsumsi pangan yang sudah ada sebelumnya. Ini lebih bertujuan dalam mencegah penularan virus corona. Beberapa negara menerapkan kebijakan new normal, termasuk Indonesia. Baru normal dimaksudkan untuk tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Pemerintah dapat menjalankan fungsinya menjaga rakyat jika ada penerimaan kas negara dari pajak dan negara lainnya pendapatan. Jika kegiatan ekonomi berhenti, maka negara tidak akan memiliki pendapatan, mempengaruhi rakyat. Selain itu, New Normal telah diberlakukan secara penuh kesadaran bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Untuk alasan ini, semua kegiatan publik diizinkan dengan syarat: menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. New normal dilakukan karena tidak semua orang dapat bertahan hidup dengan tinggal di rumah tanpa penghasilan finansial untuk memenuhi kebutuhan bertemu. Setiap orang perlu makan dan

menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, new normal adalah solusi yang perlu dilakukan dalam menghadapi pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Kebijakan new normal masih terintegrasi dengan program jaring pengaman dan perlindungan masyarakat untuk warga yang membutuhkan tanpa mengurangi fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan korban Covid-19. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menganalisis bagaimana Unsur-unsur pokok dalam kebijakan pembangunan Pasca Covid 19.

8.2 Dampak Covid 19 bagi Pembangunan di Indonesia

Setelah hampir 6 bulan kita menghadapi pandemi Virus Covid-19, dampak yang dirasakan masyarakat dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan pembangunan. Komunitas memiliki dampak yang sangat besar ketika mereka harus membatasi diri untuk tidak bepergian/beraktivitas di luar rumah, tidak berkumpul, tidak sekolah dan tidak bisa bekerja hidup seperti biasa (Abdini, 2020). Banyak kegiatan masyarakat di luar rumah atau di keramaian mengatur kebijakan berskala besar termasuk kegiatan ekonomi yang berisiko menularkan virus corona. Sudah banyak hal-hal yang telah kita lalui selama periode pertempuran ini pandemi, dan berdampak sangat signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat (Setiaji, 2020).

Berikut adalah dampak yang terjadi selama pandemi dan penerapan kebijakan social distancing berskala besar:

- a) Masyarakat tidak bisa mencari nafkah seperti biasa, sehingga pendapatan mereka menurun dan mereka bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Orang-orang yang terkena dampak langsung adalah mereka yang bekerja yang mengandalkan pendapatan sehari-hari seperti: tukang ojek, sopir angkot, toko, pedagang kaki lima. Dampak tidak bisa mencari nafkah sangat berpengaruh bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Kesulitan ekonomi membuat beberapa keluarga tidak mampu

- untuk memenuhi kebutuhan makan, membayar sewa/kost, membayar cicilan rumah/kendaraan dan sebagainya.
- b) Banyak lapangan usaha yang tutup, seperti perkantoran, mall, pertokoan, bioskop, tempat rekreasi/wisata, hotel, jasa angkutan umum, dan yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan bahkan sampai kebangkrutan (kebangkrutan) dan pengurangan jumlah karyawan. gaji hingga PHK besar-besaran. Begitu banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi virus corona.
- c) Bidang pendidikan khususnya sekolah dan universitas/ perguruan tinggi harus menutup siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar online di rumah. Tuntutan belajar di rumah secara online membuat orang tua harus mempersiapkan biaya beli paket internet, sedangkan tidak semua orang tua mencukupi kemampuan ekonomi selama pandemi.

Dua bulan setelah pelaksanaan Sosial Berskala Besar Pembatasan, Pemerintah Indonesia kini menerapkannya untuk menggulung mengembalikan perekonomian yang lesu akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (Lidwina, 2020). Pemerintah Indonesia Niat untuk kembali memutar roda perekonomian pertama kali terlihat ketika Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia harus hidup di perdamaian dengan Covid-19 sampai vaksin yang efektif ditemukan. Pernyataan tersebut adalah kemudian diterjemahkan lebih lanjut menjadi sebuah istilah yang menjadi pembicaraan banyak orang akhir-akhir ini yaitu "New Normal" (Setiaji, 2020). Skenario normal baru telah disiapkan oleh Koordinator Kementerian Perekonomian dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2020, dimana industri dan jasa dapat beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan (Jayani, 2020). Dalam rencana awal, ada lima fase normal baru, yaitu: 1 Juni, 8 Juni, 15 Juni, 6 Juli dan 20 Juli (Syahni, Della & Karokaro, 2020). Persiapan besar-besaran untuk era normalitas baru ditandai dengan Kunjungan Presiden Joko Widodo

ke berbagai titik strategis untuk dipantau persiapan kenormalan baru, sehari setelah libur lebaran. Di lain Di sisi lain, masyarakat akan rentan tertular virus jika protokol kehati-hatian dilonggarkan (Pranita, 2020). Di sisi lain, memaksa orang untuk tinggal di rumah juga akan berdampak parah pada perekonomian, karena data yang disajikan di atas menunjukkan.

8.3 Perencanaan Pembangunan Pasca Covid 19

Dalam new normal, terjadi perubahan norma, nilai, dan tata krama masyarakat perilaku dalam berinteraksi baik dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Bahkan meskipun mereka kembali ke aktivitas sehari-hari mereka, ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh setiap individu yaitu mengubah perilaku dan kebiasaannya sejauh ini. Misalnya, jika Anda biasanya keluar tanpa masker, Anda harus sekarang memakai topeng. Bahkan harus membatasi jarak fisik dengan orang lain sehingga Wabah Covid-19 tidak menginfeksi mereka. Kebiasaan cuci tangan sering juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar dapat mencegah penularan Covid-19. Begitu juga dengan kebiasaan berkumpul dengan rekan kerja untuk satu hal juga sudah mulai terbatas di lingkungan kerja, sekolah, klub, tempat olahraga, pariwisata, tempat ibadah, dan sebagainya.

Skenario untuk penerapan new normal di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Tahap I: 1 Juni 2020

1. Layanan Industri dan Bisnis ke Bisnis beroperasi dengan sosial jarak dan persyaratan kesehatan
2. Figur, pasar dan mall belum bisa beroperasi, kecuali jual masker pertokoan dan fasilitas Kesehatan
3. Sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan
4. Kumpulkan maksimal dua orang dalam satu ruangan, namun olahraga luar ruangan diperbolehkan

b) Tahap II: 8 Juni 2020

1. Tokoh masyarakat, pasar, dan mal boleh buka toko tanpa diskriminasi sektor dengan menerapkan protokol yang ketat
2. Bisnis dengan kontak fisik tidak dapat beroperasi
3. Dilarang berkumpul dan olahraga luar ruangan

c) Tahap III: 15 Juni 2020

1. Toko, pasar, dan mal tetap dalam tahap II, mengevaluasi pembukaan salon, spa dan lainnya dengan protokol kesehatan
2. Kegiatan budaya diperbolehkan dengan tetap menjaga jarak.
3. Kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai dengan jumlah kelas
4. Olahraga luar ruangan diizinkan oleh protokol
5. Evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang

6. d) Tahap IV: 6 Juli 2020

7. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti pada tahap III dengan tambahan evaluasi
8. Pembukaan restoran, kafe, bar, gym, dan lainnya secara bertahap dengan kebersihan protokol sangat ketat
9. Aktivitas luar ruangan lebih dari 10 orang
10. Berpergian ke luar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan
11. Kegiatan ibadah dilakukan dalam jumlah terbatas
12. Membatasi kegiatan pada skala lebih dari yang ditentukan

e) Tahap V: 20 dan 27 Juli 2020

1. Evaluasi tahap IV dan pembukaan tempat ekonomi lain atau kegiatan dalam skala besar
2. Akhir Juli atau awal Agustus semua kegiatan ekonomi telah dibuka. Tetap berpegang pada protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat

3. Evaluasi berkala sampai vaksin ditemukan dan disebarluaskan. Namun, beberapa ahli mengatakan bahwa implementasi saat ini baru normal tidak sesuai, karena tidak ada tanda-tanda penurunan jumlah kasus positif di Indonesia.

Padahal, kebijakan new normal seharusnya dilaksanakan dengan syarat terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus positif. Di Indonesia sendiri, kasus positif Covid-19 masih menunjukkan sifat yang fluktuatif, dimana masih ada pasang surut dalam jumlah kasus pada kisaran 500-900 kasus per hari (Isyunanda, 2020). Berbeda dengan negara-negara yang telah menerapkan new normal, seperti seperti Korea Selatan dan Australia. Penerapan new normal di negara itu dilakukan setelah penurunan kasus positif yang signifikan (Sugihamretha, 2020). Memang penerapan new normal harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu penerapan new normal di Indonesia sedang dibahas di awal Juni. Hal ini dikatakan terkesan sangat dini dan terburu-buru (Buana, 2020).

Beberapa para ahli di Indonesia kemudian memberikan pendapatnya. Salah satunya adalah Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia mengatakan ada atau tidaknya new normal akan diberlakukan tergantung dari hasil evaluasi (Ketchell, 2020). Perlu untuk mempertimbangkan hasil epidemiologi evaluasi terlebih dahulu dan kemudian diterapkan secara bertahap, dan persiapan ini tidak dapat diterapkan pada tingkat yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia (Heriani, 2020). Kebijakan new normal ini memang dilakukan dalam rangka restrukturisasi kehidupan dan aktivitas manusia dengan hal-hal yang baru (Habibi, 2020).

Kebijakan New Normal tersebut juga dilakukan dalam rangka memulihkan perekonomian nasional. Seperti yang kita Maklum, beberapa sektor mati akibat pandemi ini. Insentif yang telah diberikan oleh pemerintah untuk berbagai sektor juga dipertimbangkan tidak mampu menyelamatkan perekonomiannya

(Syahni, Della & Karokaro, 2020). Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tumbuh sekitar 5,02 persen (Nurjanah, 2020). Tidak hanya itu, penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia menyebabkan PHK besar-besaran oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Selama perekonomian Indonesia normal baru mulai berjalan seperti biasa, belum menunjukkan signifikansi yang signifikan karena dukungan terbesar dari pendapatan negara berasal dari UKM dan pariwisata. Hidup berjalan normal dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun jumlah pasien positif dengan Covid-19, dengan penerapan new normal, telah merata meningkat menjadi 200 ribu orang, dan 100 dokter meninggal. Tentu saja, ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk meninjau kembali normal baru ini kebijakan di Indonesia.

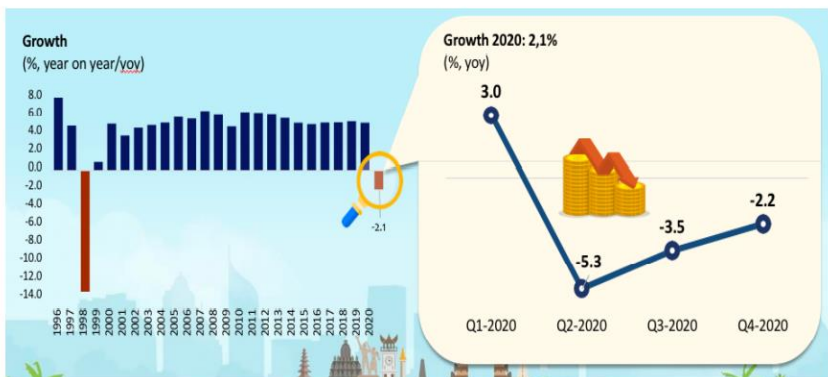
8.3 Kemajuan Pembangunan Indonesia Tahun 2020 dan Perencanaan Pembangunan Indonesia 2022

Baldwin dan Mauro (2020) menjelaskan hubungan antara upaya pengendalian Covid-19 dengan dampak ekonomi. Untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah Covid-19 (flattening the curve), diperlukan kebijakan penerapan protokol kesehatan berupa physical distancing dan social distancing. pembatasan. Pilihan kebijakan ini memiliki konsekuensi secara signifikan mengurangi masyarakat dan kegiatan usaha. Output kemudian berada di bawah tekanan, mendorong ekonomi untuk terus melambat menjadi resesi. Untuk mencegah resesi yang lebih dalam, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan stimulus. Prioritas kebijakan diberikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelompok rentan masyarakat dan dunia usaha agar tidak mengarah pada kebangkrutan. Kebijakan stimulus juga dilakukan agar penurunan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat tidak

berdampak negatif di luar ekonomi, seperti kerusakan sosial dan/atau politik (Eka Chandra Buana et al., 2021).

8.3.1 Kemajuan Pembangunan Indonesia Tahun 2020

Mencermati sejarah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, banyak pihak akan bersyukur, mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian tidak lebih parah dari krisis moneter pada tahun 1998. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang berada di bawah luar biasa tekanan akibat pandemi Covid-19, tumbuh minus 2,1 persen. Ini adalah pertama kalinya sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997—1998. Bandingkan dengan tahun 1998 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai minus 13,3 persen (gambar 5). Namun, pertumbuhan negatif ini dapat membawa Indonesia turun ke dalam kategori Lower Middle Income Countries, setelah masuk ke Upper Kategori Middle Income Countries tahun 2019. Selain itu, target Indonesia untuk menjadi high income country berpotensi untuk dicapai lebih lama. Ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari skenario dalam visi Indonesia 2045 (Bappenas, 2021b)



Gambar 8.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: Bappenas 2021

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen. Meskipun itu masih berkontraksi, realisasi ini terus meningkat dibandingkan dengan yang kedua dan ketiga triwulan tahun 2020, yang masing-masing berkontraksi sebesar 5,3 dan 3,5 persen. Lebih-lebih lagi, jika dibandingkan dengan negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia juga relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada di jalur yang benar menuju pemulihan. Namun, masih diperlukan upaya lebih untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,0 persen.

8.3.2 Perencanaan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

- (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.



Gambar 8.2 Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata Kelola.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni

- (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri,
- (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata,
- (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,

- (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional,
- (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur,
- (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital,
- (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK),
- (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial,
- (9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, serta
- (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19.



Gambar 8.3 Pemulihan Ekonomi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah,

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut: Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan;
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.
- (3) Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI; (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
- (4) Terpenuhiya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) prevalensi

- stunting pada balita, (d) insidensi tuberculosis, (e) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun, (f) persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
- (5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - (6) Meningkatkan aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - (7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
- (2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan; (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai

Budaya Literasi. Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif); (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km), dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop); (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan (a) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota), serta (b) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan; (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton); (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Berkurangnya

kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB; (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut: (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional; (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum; (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik; (5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN, terdapat 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. Major Project selalu mengalami pemutakhiran sejak pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Pada RPJMN Tahun 2020–2024, terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi, jumlah MP kembali dimutakhirkan menjadi 45 pada RKP Tahun 2022/

Dalam rangka mendukung capaian PN, pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 208 proyek dan 10 program, dengan rincian PN 1 didukung 7

proyek dan 4 program, PN 2 didukung 17 proyek dan 2 program, PN 3 didukung 2 proyek, PN 5 didukung 181 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2021b. Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi Q4 2020. Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bappenas. 2021c. Kilas Balik Indonesia 2020. Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/files/4315/8589/4350/16032020_Kilas_Balik_2019_Compiled_MFH_hh_Final_Outlook_Revisi.pdf.
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. 2020. Sustainability and development after COVID19. *World Development*, 135, 105082.
- Buana, E. C., et al. 2021. Bab 7: Pengelolaan Ekonomi. Buku: Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/files/9116/1479/0631/Buku_Studi_Pembelajaran_Penanganan_COVID-19_BAPPENAS.pdf
- Economist Intelligence Unit. 2020. The next calamity: The coronavirus could devastate poor countries. <https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries>. Dipublikasikan The Economist pada 26 Maret 2020, dan diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- McKinsey and Company. 2020. Covid-19 Briefing Note: Global Health and Crisis Response. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis>. Dipublikasikan 25 Maret 2020.
- Muhyiddin, & Dharendra Wardhana. 2020. Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1). <https://doi.org/10.36574/jPP.V4I1.108>.

- Panji Hadisoemarto. (2020). Preokupasi R(T) dan Hidup Zaman Normal Baru.
<https://majalah.tempo.co/read/kolom/160591/kolom-statistik-rt-dan-penggunaannya-dalam-kebijakan-publik-tentang-normal-baru>. Dipublikasikan Majalah Tempo edisi 30 Mei 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- World Bank. 2020. East Asia and Pacific in the Time of COVID-19 East Asia and Pacific Economic Update (April), World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1565-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
- World Health Organization (WHO). 2020. Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19, <https://www.who.int/publications-detail/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-thecontext-of-Covid-19>. Dipublikasikan 12 Mei 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2020. From the Great Lockdown to the Great Meltdown: Developing Country Debt in the Time of Covid-19, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsinf2020d3_en.pdf. Dipublikasikan tanggal 23 April 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Berita Online Bappenas Official Website. 25 Februari 2020. Rencana Kerja Pemerintah 2021: Penguatan Industri, Pariwisata, Dan Investasi Diusung. <https://www.bappenas.go.id/id/beritadan-siaran-pers/rencana-kerja-pemerintah-2021-penguatan-industri-pariwisatadan-investasi-diusung/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

- Bappenas Official Website. 1 Mei 2020. Menteri Suharso Tegaskan Komitmen Bappenas Realokasi Anggaran IKN 2020 untuk Percepat Pemulihan Sosial-Ekonomi Indonesia. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-tegaskankomitmen-bappenas-realokasi-anggaran-ikn-2020-untuk-percepat-pemulihansosial-ekonomi-indonesia/> . Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Bappenas Official Website. 10 Mei 2020. Menteri Suharso Jabarkan Strategi Bappenas untuk Percepatan Pembangunan 62 Daerah Tertinggal. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-jabarkanstrategi-bappenas-untuk-percepatan-pembangunan-62-daerah-tertinggal/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- The Indonesian Journal of Development Planning 252 Volume IV No. 2 – Juni 2020 Muhyiddin Bappenas Official Website. 29 Mei 2020. Terapkan Protokol Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19,BappenasDorong Contactless Dan Cashless Society, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/terapkan-protokolmasyarakat-produktif-dan-aman-covid-19-bappenas-dorong-contactless-dancashless-society/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Kompas Online. 18 April 2020. Indonesia Diproyeksikan Tumbuh 0,5 Persen Tahun Ini. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/18/Indonesia-diproyeksikan-tumbuh05-persen-tahun-ini/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Kompas Online. 20 April 2020. Triwulan II-2020, Titik Kritis Dampak Covid-19. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/20/triwulan-ii-2020-titik-kritisdampak-covid-19/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

Kompas Online. 26 Mei 2020. Mulai 1 Juni, Ini Skenario Tahapan New Normal untuk Pemulihan Ekonomi, <https://money.kompas.com/read/2020/05/26/073708726/Mulai-1-juni-iniskenario-tahapan-new-normal-untuk-pemulihan-ekonomi?page=all>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

Kompas Online. 27 Mei 2020. Indonesia Menuju New Normal Corona, Ini Protokol Kesehatan Covid-19 yang Harus Dilakukan. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/27/163200923/indonesia-menjunew-normal-corona-ini-protokol-kesehatan-covid-19-yang> . Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

Liputan 6. 14 Februari 2020. Jokowi Teken Perpres RPJMN 2020-2024, Ini Rinciannya. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4178653/jokowi-teken-perpres-rpjmn2020-2024-ini-rinciannya> . Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

BAB 9

MASALAH POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh Fikriyatul Falashifah

9.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang luas dengan beragam kultur budaya, kontur lingkungan dan keunggulan, sehingga banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menunaikan tugas pembangunan negara. Tantangan demi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional merupakan tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika pada awal tahun 2020, Indonesia merasakan dahsyatnya pandemi ini dalam berbagai aspek pembangunan.

Kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 melalui Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami pasang surut, apalagi jika dibarengi dengan kebijakan new normal. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai pengganti PSBB dilaksanakan pada awal Februari dan program paralel vaksinasi nasional diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan yang dituangkan dalam RKP 2021.

Kembali ke konteks tujuan pembangunan. Kita ketahui bahwa pembangunan nasional memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan rasa percaya diri berbangsa dan bernegara, meningkatnya standar kehidupan dan tercapainya kebebasan. Tujuan pembangunan nasional tersebut dapat ditempuh dengan cara pengurangan disparitas atau ketimpangan regional

dengan prinsip keadilan dan pemerataan, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya agar dapat dimanfaatkan lintas generasi, seperti tertuang dalam kutipan berikut:

"Tidak ada demokrasi politik yang dapat bertahan dan berkembang jika rakyat tetap dalam kemiskinan, tanpa tanah, tanpa prospek nyata untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan dan kekurangan harus menjadi prioritas pertama dari pemerintahan yang demokratis."

-Program Rekonstruksi dan Pembangunan Tahun 1994 (Commission, 2013)

Tujuan pembangunan dapat dicapai secara paralel apabila pembangunan di level daerah terlaksana dengan baik dan sesuai target. Permasalahan pembangunan di level daerah dalam skala agregat akan menjadi permasalahan di level nasional. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi atas apa yang menjadi pokok permasalahan pembangunan daerah, sehingga seluruh elemen yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dapat dipetakan peranan atau kontribusinya serta dapat diterapkan strategi yang tepat, terutama untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan *recovery* atau kebangkitan kembali pasca wabah pandemi Covid-19.

Bab 9 pada buku ini akan membahas lebih dalam mengenai permasalahan pokok pembangunan daerah. Pembahasan akan diawali dengan penjabaran mengenai definisi pembangunan daerah, mekanisme pembangunan daerah, pilar dan pelaku pembangunan daerah dan pergeseran paradigma pembangunan daerah. Pembahasan spesifik mengenai masalah pembangunan daerah dikategorikan menjadi lima pokok permasalahan, yaitu: permasalahan pembangunan ekonomi, permasalahan kependudukan dan sosial, ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta permasalahan politik.

9.2 Hakikat dan Paradigma Pembangunan Daerah

Sejatinya, pembangunan merupakan sebuah mekanisme lintas dimensi yang mencakup transformasi sikap hidup dan sosial kelembagaan menuju pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan disparitas (Kato et al., 2021). Transformasi tersebut tentunya didasari oleh azas keadilan dan kontinuitas. Negara atau daerah harus memiliki modal potensial dan modal riil untuk melaksanakan proses pembangunan.

9.2.1 Definisi Pembangunan Daerah

Merujuk pada pendefinisian atas terminologi pembangunan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah merupakan sekumpulan usaha yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan upaya berkelanjutan guna meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah, meningkatkan kualitas layanan dan memberdayakan masyarakat daerah. Dalam hal ini tujuan pembangunan daerah (Soares et al., 2015) adalah untuk:

1. Menciptakan lingkungan masyarakat yang maju, tenteram, dengan kualitas hidup yang lebih baik
2. Peningkatan martabat, harkat, harga diri serta kapabilitas masyarakat untuk menunjang kehidupannya.

9.2.2 Mekanisme Pembangunan Daerah

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan dengan sistem otonomi daerah, yakni daerah otonom memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri (*self authority, self government, self regulation and self sufficiency*) (Suparto, 2017). Sistem ini merupakan sistem yang diterapkan untuk

memperbaiki kinerja sistem sentralisasi atau sentralistik yang diterapkan hingga zaman orde baru.

Sistem sentralisasi memiliki beberapa kelemahan, yaitu menimbulkan ketidakadilan ekonomi, sosial, politik, pangan, dan hukum. Ketidakadilan tersebut menimbulkan krisis multidimensi berkepanjangan (Kuncoro, 2004). Ketegangan tersebut menimbulkan dampak ketimpangan desa-kota, antargolongan dan antar daerah, sehingga mendesak terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah (Dewanta, 2004).

Azas sentralisasi kemudian dirubah menjadi azas desentralisasi seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 1999 dan Tap.MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatur dan membagi pemanfaatan sumber daya yang berimbang dan berkeadilan. Sistem desentralisasi tersebut kemudian mulai diimplementasikan pada tahun 2000 hingga sekarang, seiring perubahan amandemen undang-undang berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Menurut (Habibi, 2016), pelaksanaan sistem desentralisasi pada mekanisme otonomi daerah dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah. Menurut Kurniawan (2007), azas desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan beberapa dampak berupa penambahan beban tanggung jawab pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan daerah. Pelaksanaan mekanisme tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kesiapan yang matang dalam hal sumber daya keuangan, sumber daya

manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

9.2.3 Pilar dan Pelaku Pembangunan Daerah

Dalam pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan keseimbangan dan optimalisasi peranan dari pilar dan pelaku pembangunan daerah. Pelaku pembangunan daerah tersebut di antaranya adalah:

1. **Pemerintah**, berperan dalam menciptakan regulasi, pelayanan masyarakat dan lingkungan politik yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Sektor yang tergolong pemerintah adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, pelayanan publik, polisi dan militer;
2. **Sektor Swasta atau Dunia Usaha**, berperan dalam peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Sektor yang tergolong swasta mencakup UMKM, korporasi multinasional, perusahaan, institusi finansial dan *stock exchange*;
3. **Masyarakat**, perwujudan interaksi ekonomi, sosial dan politik. Sektor yang termasuk masyarakat adalah masyarakat sipil, organisasi masyarakat, organisasi, NGO, asosiasi profesional, komunitas keagamaan, kelompok pemberdayaan perempuan dan media.

Keseimbangan antara ketiga pelaku tersebut akan menciptakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau yang disebut dengan *good governance*. Pola interaksi keseimbangan antara ketiga pelaku pembangunan daerah tersebut tercermin dalam bagan berikut:



Gambar 9.2 Interaksi Pelaku Pembangunan

Sumber: Drs. H. Dadang Solihin, M.A (2018) – Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BAPPENAS. Presentasi. Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah. Diakses dari URL: <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/isu-dan-masalah-perencanaan-pembangunan-daerah-presentation>

Sementara itu, dimensi yang merupakan pilar pembangunan daerah terdiri atas pilar politik, pilar ekonomi, pilar sosial dan budaya (Suparto, 2017). *Pilar politik* menitikberatkan pada keterbukaan ruang untuk terselenggaranya pemerintahan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, kebijakan yang transparan, taat azas dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. *Pilar Ekonomi* menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan regional dan lokal sebagai bentuk implementasi kebijakan ekonomi nasional di level daerah. Target-target pemenuhan ekonomi nasional diterjemahkan ke dalam kontribusi daerah dan ditujukan bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. *Pilar Sosial dan Budaya* merupakan cerminan dari terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dengan terwujudnya sikap saling menghormati dan tidak membedakan antar suku, agama, ras maupun antargolongan.

9.2.4 Pergeseran Paradigma Pembangunan Daerah

Implementasi pembangunan daerah telah mengalami pergeseran pola mekanisme pelaksanaan, dari pola *government* menjadi *governance*. Paradigma *government* yang menjadi pola pelaksanaan pemerintah di masa silam menempatkan pemerintah menjadi pusat kekuasaan dengan kewenangan yang hierarki, sehingga otonomi berasal dari dominasi negara.

Sementara itu, paradigma pembangunan daerah terbaru menganut azas *citizen-centered* atau *good governance* yang menempatkan posisi para pelaku pembangunan menjadi horizontal dengan pola hubungan kemitraan. Menurut (Kurniawan, 2007), pada pola *good governance*, terjadi keseimbangan semua pelaku pembangunan karena mengakodomir kepentingan masyarakat dan keterbukaan pemerintah terhadap publik. Keterbukaan ini juga membuka ruang bagi sektor privat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Lebih lanjut, mengutip dari Bappenas (2002), pemerintahan dengan konsep *good governance* dilaksanakan dengan menganut prinsip akuntabel, transparan, responsif, taat hukum, konsensus, partisipatif, inklusif, efektif dan efisien. Dialog publik merupakan tahapan yang krusial dalam konsepsi *good governance* karena mencerminkan nilai bersama yang akan diakomodir oleh pemerintah dalam bentuk tata aturan hukum.

9.3 Masalah Pokok Pembangunan Daerah

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan maupun mengidentifikasi permasalahan pokok pembangunan, baik yang terjadi pada skala nasional maupun daerah, perlu diketahui macam-macam indikator pembangunan nasional maupun daerah di berbagai bidang. Pemakaian indikator ini pun berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi negara atau daerah yang diukur. Indikator bermanfaat untuk mengukur dan

melihat perbandingan level pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.

Dalam bukunya, Siregar et al. (2021) menjelaskan bahwa anda indikator makro dan mikro untuk menganalisa masalah pokok pembangunan daerah. Indikator tersebut adalah pendapatan daerah, struktur ekonomi, urbanisasi, investasi dan indeks kualitas hidup. Indikator lainnya yang tercermin dalam statistik pembangunan masing-masing daerah adalah jumlah penduduk, ketenagakerjaan, kemiskinan, indeks pembangunan manusia (*Human Development Index - HDI*) dan statistik akomodasi.

Pada chapter ini, indikator yang akan digunakan untuk menganalisis masalah pokok pembangunan dibedakan menjadi lima permasalahan umum (ekonomi, sosial kependudukan, sarana prasarana, sumber daya alam dan politik) serta satu permasalahan khusus yakni pemulihan pas pandemi Covid-19.

9.3.1 Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan daerah menurut paradigma modernisasi merupakan sebuah mekanisme pembentukan institusi, industri alternatif dan perusahaan baru, peningkatan kapabilitas angkatan kerja, identifikasi *market* baru, serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Siwu (2019), definisi pembangunan ekonomi daerah adalah mekanisme kemitraan yang terjadi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya untuk membentuk lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

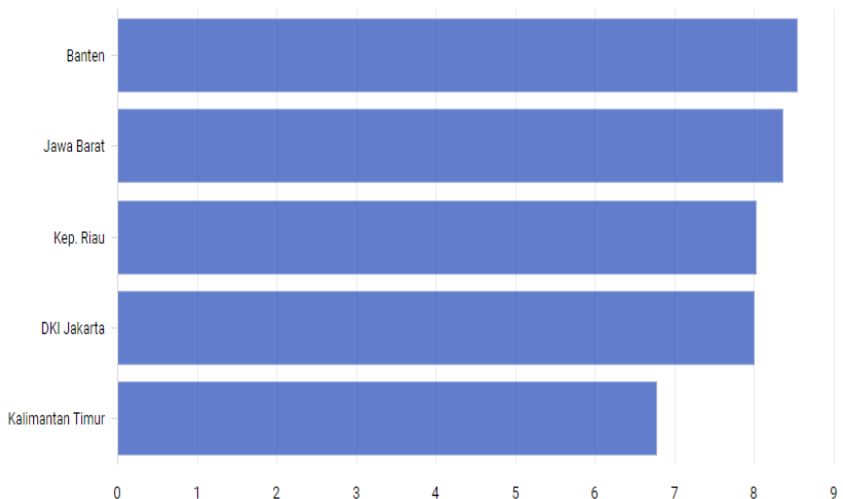
Siwu (2019) menjelaskan bahwa permasalahan utama pembangunan daerah bergantung pada ciri khas daerah tersebut atau yang disebut dengan *endogenous development*. Ciri khas ini akan melahirkan kebijakan pembangunan tertentu yang berkaitan dengan inisiatif ekonomi. Namun, inisiatif

ekonomi ini juga menimbulkan permasalahan umum yang kerap terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Permasalahan tersebut berupa:

1. *Pengangguran*

Permasalahan terkait pengangguran merupakan permasalahan ekonomi klasik yang dihadapi hampir seluruh daerah maupun pada tingkat negara. Menurut Indayani and Hartono (2020), pengangguran didefinisikan sebagai selisih antara tenaga kerja yang terserap ke lingkungan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran ini juga bervariasi di desa dan di kota.

Data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Mei Tahun 2022 merekap 15 provinsi di Indonesia dengan tingkat pengangguran tertinggi yang direpresentasikan pada tabel berikut:



Gambar 9.3 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Diakses melalui URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/10/danhttps://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

2. *Kemiskinan*

Menurut Giovanni (2018), kemiskinan merupakan krisis multidimensi yang mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Giovanni (2018) mengelompokkan kemiskinan menjadi dua dimensi, yakni dimensi primer (kemiskinan aset, pengetahuan, *skill* dan partisipasi politik) dan dimensi sekunder (ketidakterjangkauan jaringan sosial, sumber keuangan dan arus informasi).

Menurut Hasan (2022), terdapat tiga penyebab kemiskinan, yaitu: ketimpangan kepemilikan sumber daya, kualitas sumber daya manusia yang rendah (produktivitas rendah), dan ketimpangan akses modal. Di desa dan kota juga terdapat perbedaan kondisi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Lapangan kerja di desa tidak memadai, sementara di kota terjadi lonjakan penduduk dengan spesialisasi dan kompetensi kerja yang tidak dimiliki oleh penduduk miskin.

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 menyebutkan lima provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin tertinggi sesuai kriteria BPS adalah Provinsi Bengkulu (Indeks 14.62), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Indeks 13.68), Provinsi Sumatera Selatan (Indeks 11.90), Provinsi DI Yogyakarta (Indeks 11.34) dan Provinsi Jambi (Indeks 7.62).

3. *Investasi dan Inklusivitas Pelaku Pembangunan*

Permasalahan pembangunan ekonomi daerah yang tidak kalah pentingnya adalah daya investasi daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kurang berfungsinya sektor perbankan dalam pengembangan sektor riil di daerah

- Daya saing investasi daerah yang rendah dikarenakan lemahnya dukungan pemerintah daerah terhadap pembaharuan
- Sarana dan prasarana serta tata aturan hukum yang kurang memadai untuk mengakomodir investasi.

9.3.2 Permasalahan Sosial dan Kependudukan

Permasalahan di bidang ekonomi juga berimbas kepada permasalahan sosial. Kemiskinan dan pengangguran menimbulkan dampak terhadap keterbatasan akses terhadap kebutuhan primer penduduk serta akses terhadap fasilitas sosial. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas sosial yang bervariasi juga disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti akses menuju daerah, ketersediaan pasokan pemenuhan barang dan jasa penunjang fasilitas sosial serta faktor dinamika politik.

Secara umum, permasalahan pokok pembangunan daerah di bidang sosial dan kependudukan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Sosial (Pendidikan dan Kesehatan)

Permasalahan terkait pelayanan sosial ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan dasar. Pemerintah daerah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar dengan hadirnya kebijakan pendukung, sementara masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menunaikan pendidikan dan mengevaluasi kesehatannya.

Permasalahan yang terjadi di daerah terkait isu pemenuhan kebutuhan sosial dasar ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan kebutuhan dasar tersebut. Perbedaan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan akses

kesehatan di desa dan kota juga merupakan faktor penyebab ketimpangan pemenuhan kebutuhan tersebut antar daerah. Selain disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan tingkat pendapatan juga mempengaruhi tinggi rendahnya akses suatu daerah dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan dasar bagi masyarakatnya (Ariutama, 2016).

2. *Laju Pertumbuhan Penduduk dan Arus Urbanisasi*

Faktor lainnya yang merupakan salah satu masalah pokok pembangunan daerah di aspek sosial adanya tingginya laju pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi. Meskipun sudah ditetapkan program Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2009 silam, tetapi angka kelahiran penduduk di Indonesia tergolong tinggi. Daerah atau provinsi dengan angka kelahiran tertinggi di Indonesia menurut data BPS (2017) adalah Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara.

Arus urbanisasi juga merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Penduduk di Indonesia memiliki kecenderungan untuk berpindah sementara dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang layak. Menurut Dewi (2017), pada awal abad ke-21, arus urbanisasi meningkat menjadi 40% penduduk yang menempati daerah perkotaan. Diperlukan adanya pemerataan kesempatan kerja antara desa dan kota untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

9.3.3 Permasalahan Sarana dan Prasarana

Permasalahan ketiga yang menjadi momok bagi pemerintah daerah adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembangunan daerah. Hal ini terutama dialami oleh

daerah di Indonesia di luar pulau Jawa, utamanya di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) (Syafii, 2018). Permasalahan sarana prasarana tersebut dapat dikategorikan menjadi:

1. *Permasalahan Jaringan Transportasi*, yang menyebabkan terhambatnya arus pasokan ketersediaan barang dan jasa penunjang kebutuhan hidup sehari-hari atau akses terhadap fasilitas sosial;
2. *Pengaturan dan Pengelolaan*, yakni permasalahan mengenai manajemen sumber daya dan sarana prasarana daerah, seperti kebijakan prioritas pembangunan daerah
3. *Kapasitas dan Ketersediaan Air dan Listrik*, yang bergantung pada sumber air dan listrik pada daerah tertentu.

9.3.4 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan keempat yang merupakan bagian dari permasalahan umum pembangunan daerah adalah kontur, profil, kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah tersebut. Permasalahan ini juga merupakan permasalahan multidimensi antara aspek hukum dan kebijakan, ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana untuk tata kelola sumber daya dan lingkungan hidup tersebut. Pada aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup, masalah pokok pembangunan daerah dibedakan menjadi:

1. *Permasalahan Kualitas Pemukiman*, yang merupakan kebutuhan pokok setiap rumah tangga di daerah.
2. *Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan*, yang berkaitan dengan pengaturan tata kelola kepemilikan lahan dan tata ruang. Hal ini juga berkaitan dengan pemanfaatan ruang untuk keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan. Terwujudnya lingkungan yang sehat jika memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di setiap daerah. Pemekaran peruntukan area atau alih fungsi lahan

menjadi area pabrik misalnya, akan menimbulkan permasalahan baru terkait kualitas lingkungan dan limbah yang ditimbulkan, meskipun juga berpotensi menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja. Juga terkait dengan isu penambahan DAS kritis, alih fungsi hutan tropis di beberapa daerah dan berkurangnya kawasan resapan air, utamanya di perkotaan.

3. *Bencana*

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara laboratorium atau lumbung bencana, tetapi di hampir semua daerah di Indonesia, mitigasi bencana belum dilaksanakan secara masif dan efektif. Masyarakat di beberapa daerah di Indonesia masih rentan terhadap dampak bencana yang akan timbul karena belum mengetahui cara penanggulangan dampak bencana, rencana mitigasi lokal serta tidak familiar dengan jalur evakuasi. Penanggulangan bencana masih sebatas langkah adaptasi pasca bencana.

9.3.5 Politik: Pembangunan dan Penguatan

Permasalahan kelima yang merupakan bagian dari masalah pokok pembangunan daerah adalah terkait dengan politik dan penguatan stabilitas daerah. Hal ini terutama dialami oleh daerah 3T, di mana isu keamanan dan stabilitas politik menjadi isu utama, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua.

9.3.6 Permasalahan Khusus: Pemulihan Pasca Covid-19

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun melambat menjadi minus 5,3 persen pada triwulan II-2020 dan secara agregat tumbuh minus 2,1 persen pada 2020. Target perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 direvisi melalui pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020,

dengan prioritas utama penanggulangan Covid-19.

Kemudian pembangunan mulai digencarkan pada tahun 2021 untuk mengejar target prioritas nasional yang terbengkalai akibat Covid-19. APBN 2020 mengalokasikan sekitar Rp 937,42 triliun untuk pencegahan Covid-19, termasuk akumulasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 86,32 triliun sehingga membuat defisit pembiayaan tahun itu mencapai Rp 1.226,8 triliun (Sambhi, 2019).

Imbas kebijakan nasional terhadap penanggulangan dampak Covid-19 juga menyebabkan dinamika stabilitas pemenuhan kebutuhan di daerah. Prioritas pembangunan daerah juga serentak mengikuti prioritas penanggulangan Covid-19, yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Permasalahan tersebut menjadi permasalahan multidimensi karena hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di daerah. Namun, pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 telah beralih status menjadi endemi dan masyarakat dapat beraktivitas seperti sediakala, sehingga prioritas pembangunan daerah beralih menjadi pemulihan pasca Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariutama, I.G.A., 2016. Analisis Panel Var: Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Info Artha* 1, 1–16.
- Bappenas, R.I., 2002. Public Good Governance.
- Commission, N.P., 2013. National development plan vision 2030.
- Dewanta, A.S., 2004. Otonomi dan pembangunan daerah. *Unisia* 325–329.
- Dewi, Y.S., 2017. Arus Urbanisasi Dan Smart City, in: *Prosedding Seminar Nasional Inovasi Teknologi*.
- Giovanni, R., 2018. Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. *Econ. Dev. Anal. J.* 7, 23–31.
- Habibi, M.M., 2016. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *J. Ilm. Pendidik. Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28.
- Hasan, A., 2022. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU TAHUN 2011-2020. *PARETO J. Ekon. Dan Kebijak. Publik* 5, 95–110.
- Indayani, S., Hartono, B., 2020. Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *J. Perspekt.* 18, 201–208.
- Kato, I., Faridi, A., Revida, E., Damanik, D., Siregar, R.T., Purba, S., Handiman, U.T., Purba, B., Firdaus, F., Silalahi, M., 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis.
- Kuncoro, M., 2004. Otonomi & pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang.
- Kurniawan, T., 2007. Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. *J. Ilmu Adm. Negara* 7, 16–17.

- Sambhi, N., 2019. INDONESIA IN 2018. *Southeast Asian Aff.* 123–143.
- Siregar, R.T., Purba, T., Manurung, T.S., Albaihaqi, U., Pulungan, U.Y.S., Purba, V.A., Yanti, V., Novitasari, W., Nasution, W.S., Sitohang, W.V., 2021. *Ekonomi Pembangunan: Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis.
- Siwu, H.F.D., 2019. Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *J. Pembang. Ekon. Dan Keuangan Drh.* 18.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., Makmur, M., 2015. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.* 4.
- Suparto, S., 2017. *Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*.
- Syafii, A., 2018. Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat J. Manaj. Dan Pendidik. Islam* 4, 153–171.

BAB 10

MASALAH DUALISME

PEMBANGUNAN

Oleh Tri Wahyu Rejekiningsih

10.1 Pendahuluan

Dualisme sebagai salah satu karakteristik dari negara-negara yang sedang berkembang. Ini bukan berarti bahwa di negara yang sudah maju tidak ada dualisme, namun di negara maju tidak begitu menonjol seperti di negara berkembang. Dualisme bisa masuk ke segala bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bahkan teknologi.

Dualisme didefinisikan sebagai keadaan ganda atau terdiri dari dua bagian. Dualisme bisa tercermin dari keberadaan dua sistem, yaitu sektor modern besar (wilayah inti) dan sektor tradisional kecil (wilayah pinggiran). Dualisme bisa terjadi dimanapun, baik negara maju maupun negara berkembang, yang hanya berbeda dalam karakteristik dan derajat. Di antara beberapa indikator dualisme ekonomi, yang paling banyak diterapkan adalah kesenjangan produktivitas atau produktivitas tenaga kerja relatif. Kesenjangan produktivitas antar wilayah dalam suatu negara menunjukkan dualisme regional, dan kesenjangan produktivitas antara usaha kecil dan besar menunjukkan dualisme bisnis.

Sumber sejarah dualisme di Indonesia pertama kali dibahas, dengan penekanan khusus pada relevansi konsep dualisme Boeke. Terlepas dari adanya berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, ketimpangan antar daerah di tanah air cukup besar menurut standar internasional. Kesenjangan produktivitas antara usaha mikro-kecil dengan usaha besar juga sangat mencolok.

Jadi, dualisme adalah dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat superior dan keadaan yang lain bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini tentu akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut sistem dualisme ekonomi.

10.2 Jenis Dualisme

Dari sudut ekonomi suatu masyarakat dapat ditandai atas dasar jiwa sosial, bentuk organisasi dan teknik yang mendukung. Ketiga unsur ini saling berkaitan, sehingga akan menentukan ciri khas dari masyarakat yang bersangkutan, dalam arti bahwa jiwa sosial, bentuk organisasi dan teknik yang unggul menentukan gaya dan wajah masyarakat.

Apabila dalam waktu yang sama terdapat dua atau lebih sistem sosial, dan masing-masing sistem sosial ini jelas berbeda satu sama lain dan masing-masing menguasai bagian tertentu dari masyarakat yang bersangkutan, dan itulah yang dinamakan masyarakat ganda/dualisme (J.H. Boeke). Sistem sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah gaya-gaya sosial yang dalam perkembangan normal masyarakat homogen dipisahkan satu dari yang lain oleh bentuk-bentuk peralihan, seperti pra-kapitalisme yang dipisahkan dari kapitalisme tinggi/penuh. Di era sebelum merdeka, masyarakat dualisme itu ditandai oleh keberadaan sistem barat impor yang lebih maju dan sistem pertanian prakapitalisme pribumi.

Dualisme sering dikaitkan dengan ketimpangan. Setiap proses pembangunan memerlukan kekuatan penyebaran atau dispersi (sentrifugal) dan kekuatan konsentrasi atau aglomerasi (sentripetal). Kecenderungan kegiatan untuk berkonsentrasi didorong oleh eksternal ekonomi yang melebihi eksternalitas negatif (harga yang lebih tinggi, kemacetan, dll) yang disebabkan oleh konsentrasi. Di sisi lain, eksternal ekonomi dapat membantu

mengurangi ketimpangan antara UMKM dengan usaha besar melalui menawarkan manfaat bagi UMKM yang bisa bekerja melalui klaster untuk tindakan kolektif.

10.2.1 Dualisme Statis

Identifikasi terhadap dualisme statis yang berbeda dalam literatur ada dua jenis yaitu:

- a. “Dualisme Sosiologis”, yang lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan kultural sehingga menimbulkan konsep organisasi ekonomi dan rasionalitas “barat” dan “non barat” yang berlainan.
- b. “Dualisme Kantong (*enclave*)” yang menekankan pada perilaku model dan pasar produk dari bangsa-bangsa industri modern barat yang melakukan interaksi dengan masyarakat tradisional di bagian-bagian dunia yang lain.

Kedua jenis itu penting untuk memahami anggapan-anggapan mengenai struktur dan perilaku ekonomi negara berkembang yang akan dimasukkan ke dalam model-model ekonomi ganda modern. Dualisme sosiologi merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan ahli ekonomi Belanda Boeke mengenai sebab-sebab kegagalan politik kolonial Belanda di Indonesia (Boeke, 1953). Kegagalan politik ekonomi liberal yang dilaksanakan dalam tahun 1870 untuk membalikkan “kesejahteraan yang berkurang” dari rakyat Indonesia khususnya di Jawa, menyebabkan suatu penilaian kembali yang intensif terhadap politik kolonial. Dimulai dalam disertasinya di tahun 1910 Boeke mengemukakan bahwa pikiran ekonomi barat tidak bisa diterapkan pada kondisi-kondisi kolonial tropis, dan diperlukan pendekatan teoritis terpisah pada persoalan-persoalan ekonomi yang demikian itu.

Boeke menganggap, sebagai prakondisi bagi dualisme, eksistensi dua sistem sosial yang melakukan interaksi secara marginal saja melalui kontak yang sangat terbatas dalam pasar produk dan pasar tenaga kerja. Dalil inti tesis Boeke adalah

perbedaan pokok antara tujuan-tujuan aktivitas ekonomi dalam masyarakat barat dan timur berdasarkan dorongan kebutuhan ekonomi. Boeke mengeritik usaha-usaha untuk menjelaskan alokasi sumber-sumber atau pembagian pendapatan menurut teori produktivitas marginal neo-klasik, terutama disebabkan oleh immobilitas yang besar dari sumber-sumber masyarakat timur. Sifat statis teori Boeke yang percaya bahwa masyarakat ganda di Indonesia adalah “permanen setidaknya dalam jarak waktu yang dapat diukur.” Boeke juga menulis “bahwa masyarakat pra-kapitalistik didorong semakin jauh ke dalam ekonomi pertukaran yang tidak sesuai dan tidak dapat menguasai.” Dalam pandangan Boeke, fitur statis dari teori dapat digunakan dalam konteks sektor pra-kapitalistik (Boeke, 1953).

Implikasi kebijakan terpenting dari analisis Boeke adalah bahwa tidak ada guna mencoba mengintroduksi teknologi barat dan lembaga-lembaga barat ke dalam sistem masyarakat timur yang tradisional. Apabila sektor tradisional dan sektor kapitalis hidup berdampingan, bahwa suatu kebijakan yang diberlakukan bagi seluruh sektor di negara tersebut adalah tidak mungkin, karena akan terjadi yang menguntungkan satu bagian masyarakat mungkin merugikan yang lain (Boeke, 1953).

Dualisme Kantong sebagai varian dualisme statis, yang dijelaskan oleh beberapa ahli teori perdagangan sebagai suatu kondisi perekonomian suatu negara dengan ada kehadiran suatu sektor dengan tingkat produktivitas tinggi yang menghasilkan produk ekspor berjalan bersama sektor dengan tingkat produktivitas rendah yang memproduksi untuk pasar dalam negeri (Singer, 1950).

Perluasan sektor modern terutama untuk memenuhi permintaan di pasar luar negeri. Pertumbuhan sektor modern berpengaruh relatif sedikit atas ekonomi lokal. Disisi lain, perluasan sektor tradisional dibatasi oleh kekurangan tabungan. Myint dan Higgins dalam menekankan pentingnya pasar modal sebagai dasar dualisme kantong (Myint, 1964). Ketika sektor

modern masuk ke dalam pasar uang modern sehingga akan memperoleh modal dengan sedikit ongkos dibandingkan sektor tradisional. Oleh karena itu, akan terjadi penggunaan teknologi yang lebih padat modal dan tingkat produksi tenaga kerja yang lebih tinggi. Myint juga mengemukakan bahwa sektor finansial kantong cenderung menghasilkan pemasukan modal baru dari sektor subsisten dan pengeluaran baru ke pusat-pusat finansial internasional. Pengaruh kantong modern atas perkembangan ekonomi lokal dengan demikian dibatasi, baik oleh permintaan yang rendah terhadap tenaga kerja maupun kegagalan dalam menyalurkan investasi ke perusahaan lokal.

10.2.2 Dualisme Dinamis

Beberapa tulisan tentang dualisme dinamis diperoleh dari tulisan Jorgenson, Fei & Ranis, dan Lewis. Bahkan tulisan Lewis tentang “Perkembangan Ekonomi dengan Persediaan tenaga Kerja tidak terbatas” dianggap sebagai jembatan antara dualisme statis dan dinamis. Dualisme dinamis digambarkan sebagai kondisi dimana dualitas sosial ekonomi mengalami pembangunan dan pertumbuhan di Negara-negara yang kelebihan tenaga kerja (Lewis, 1954). Menurut konsep ini, kelebihan tenaga kerja bisa dialihkan dari sektor tradisional yang subsisten ke sektor perkotaan yang modern untuk meningkatkan produksi non pertanian. Sektor perkotaan dengan industri modern sebagai pusat dinamika diharapkan secara lambat laun dapat mengubah sifat status tatanan pedesaan dengan ciri pertanian yang lamban dan produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah.

Tujuan utama model ekonomi ganda dinamis adalah untuk menjajaki hubungan formal yang akan memungkinkan jalan keluar,

- a. Dari perangkat Malthus yang dianggap Boeke sebagai konsekuensi yang mesti timbul akibat masuknya teknologi baru ke dalam pertanian pribumi.

- b. Dari kurangnya hubungan-hubungan di pasar tenaga kerja dan modal yang efektif antara ekonomi modern dengan ekonomi tradisional.

Sesungguhnya peningkatan produktivitas pertanian, dalam model dinamis akan menjadi mekanisme yang memungkinkan realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri secara tetap.

Perbedaan pokok antara model-model yang diusulkan Ranis dan Fei serta Jorgenson adalah sampai dimana sektor subsisten mengambil bagian dalam perubahan-perubahan pertumbuhan produktivitas di sektor subsisten. Ciri-ciri sektor subsisten dalam model Fei dan Ranis (yang oleh Jorgenson disebut klasik) adalah, (a) pengangguran terselubung dari kekurangan kerja, (b) produktivitas marginal nol, (c) tingkat upah yang ditetapkan secara institusional yang positif bagi tenaga kerja pertanian, kira-kira sama dengan produktivitas rata-rata pekerja dalam sektor subsistensi, dan (d) input dipusatkan pada tanah (Fei dan Ranis, 1964). Dengan syarat-syarat ini Fei dan Ranis mengemukakan bahwa ada kemungkinan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor industri komersial tanpa mengurangi output pertanian dan tanpa meningkatkan harga penawaran tenaga kerja bagi sektor industri di saat awal perkembangan. Sesungguhnya pemindahan satu tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor nonsubsisten akan menghasilkan surplus pertanian yang kemudian menjadi dana investasi bagi perkembangan sektor industri. Fei dan Ranis melihat bahwa surplus pertanian sebagai tambahan hasil berupa peningkatan produktivitas yang disebabkan perbaikan padat karya.

Titik kritis pertama dalam perkembangan ekonomi dualistik, dalam konteks model Fei dan Ranis terjadi pada saat produk nilai marginal tenaga kerja pertanian mulai meningkat diatas nol. Pada titik ini pemindahan satu tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor industri perdagangan tidaklah menghasilkan “upah dana”

yang cukup besar untuk menyokong konsumsi di sektor industri perdagangan. Ini mengakibatkan “masuknya syarat-syarat dagang” dalam sektor industri, yang hanya dapat diimbangi oleh gabungan pertumbuhan produktivitas dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang menurun dalam sektor industri perdagangan.

Titik kritis kedua terjadi apabila nilai produk marginal tenaga kerja melampaui tingkat upah yang “ditetapkan secara institusional” di sektor pertanian. Pada titik ini kenaikan tingkat upah di sektor industri diharuskan untuk bersaing secara efektif dengan sektor subsisten. Apabila pada tingkat ini tercapai pertumbuhan produktivitas yang cepat di sektor pertanian, sehingga ciri-ciri “dualistis” dari ekonomi semakin menciut dan pertanian semakin banyak mengambil peranan tambahan dalam ekonomi.

Model ekonomi ganda Jorgenson (1961) beranggapan bahwa (a) produktivitas marginal pekerja sebesar nol dan (b) tingkat upah yang “ditetapkan secara institusional” di sektor subsisten dilepaskan. Tingkat upah ditetapkan dalam suatu pasar pekerja antar sektor selama taraf permulaan perkembangan. Dari anggapan tersebut menghasilkan (a) tidak pernah tersedia tenaga kerja bagi sektor industri tanpa mengorbankan output pertanian, (b) neraca perdagangan sektor industri terus menerus menurun selama proses pembangunan. Dengan demikian kemampuan ekonomi untuk membangkitkan surplus pertanian tergantung hanya pada tiga parameter yaitu: (1) laju kemajuan teknik dalam pertanian, (2) laju pertumbuhan penduduk (bila penduduk tidak dibatasi oleh kekurangan bahan makanan), (3) tingkat elastisitas output sektor pertanian yang berhubungan dengan perubahan tenaga kerja pertanian. Suatu perekonomian yang terperangkap dalam keseimbangan rendah, jalan keluarnya mungkin melalui, (a) perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan (b) praktek medis yang menurunkan laju kelahiran lebih cepat daripada kematian. Perhatikan bahwa dalam model Jorgenson, perubahan teknologi

harus dimasukkan dalam sektor pertanian sejak permulaan proses pembangunan (Jorgenson, 1961).

Baik model dua sektor Fei dan Ranis maupun Jorgenson mempunyai kekuatan yang sangat nyata untuk membenarkan secara formal, penilaian intuitif, bahwa (a) pergeseran neraca perdagangan ke arah pertanian ini menandakan keruntuhan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang mandiri (*sustainable growth*), dan (b) bahwa ini hanya bisa diimbangi oleh suatu gabungan antara laju perubahan teknologis yang lebih besar dalam pertanian dan/atau menahan laju pertumbuhan penduduk. Dari kesederhanaan kedua model tersebut dapat memunculkan anggapan yang meremehkan (*underestimation*) kesulitan untuk mencapai transformasi semacam itu.

10.2.3 Dualisme Teknologi

Higgins yang tegas-tegas menolak dualisme sosiologis Boeke, dan menyatakan bahwa asal mula dualisme adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dengan sektor tradisional. Higgins berpendapat bahwa sektor modern lebih terkonsentrasi untuk memproduksi barang-barang primer dalam pertambangan, perkebunan dan seterusnya. Teknologi yang diimpor dan dipergunakan di sektor modern pada dasarnya untuk menghemat tenaga kerja dengan koefisien modal yang relatif tinggi dan telah terpadu. Ini bertentangan dengan teknologi yang dipergunakan di sektor tradisional dengan sifat yang secara luas memungkinkan substitusi antara modal dan pekerja, serta penggunaan metode produksi padat karya (Higgins, 1966).

Dualisme teknologi dengan ciri penggunaan berbagai fungsi produksi baik di sektor maju maupun tradisional dalam perekonomian yang terbelakang. Dualisme ini akan memperberat masalah pengangguran teknologi atau pengangguran struktural di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Teori Higgins tentang dualisme teknologi memasukkan masalah proporsi faktor dan dikaitkan dengan keterbatasan kesempatan

kerja produktif yang ditemui di kedua sektor dalam ekonomi terbelakang ini akibat dari pasar yang tidak sempurna, perbedaan kekayaan faktor dan perbedaan fungsi produksi. Ketidakseimbangan seperti itu menimbulkan pengangguran atau kekurangan pekerjaan melalui dua cara, (a) ketidaksempurnaan atau sistem harga yang tidak berfungsi, (b) keterbatasan teknologi, atau struktur permintaan yang ada menyebabkan surplus buruh di negara terbelakang berpenduduk padat. Jadi pengangguran teknologi berkaitan dengan surplus buruh yang timbul karena salah alokasi sumber, struktur permintaan atau kendala teknologi.

Higgins (1966) membangun teori dengan asumsi ada dua barang, dua faktor produksi, dan dua sektor dengan kekayaan faktor dan fungsi produksi. Sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ladang minyak, kilang minyak atau industri skala besar. Sektor industri yang padat modal, dengan koefisien teknis tetap. Dengan kata lain tidak ada kemungkinan substitusi teknis faktor-faktor dalam proporsi tetap. Sektor pedesaan bergerak dalam produksi bahan makanan dan kerajinan tangan atau industri dengan skala kecil. Sektor pedesaan memiliki koefisien teknis produksi yang mudah berubah sehingga produksi output yang sama dengan berbagai macam teknik dan kombinasi alternatif buruh dan modal (termasuk tanah).

Berdasarkan fungsi produksi di kedua sektor tersebut, Higgins (1966) menelaah proses bagaimana dualisme teknologi cenderung akan meningkatkan pengangguran struktural dan pengangguran tersembunyi dalam perekonomian dualistik. Dari kedua sektor tersebut, sektor industri tumbuh dan berkembang dengan bantuan modal luar negeri. Oleh karena itu, industrialisasi akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang melebihi laju akumulasi modal di sektor industri. Sektor industri memakai teknik padat modal dengan koefisien teknik tetap sehingga tidak dapat menciptakan laju kesempatan kerja yang sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Proses industrialisasi bahkan dapat menyebabkan “penurunan secara proporsional pekerja total di

sektor industri”. Dengan demikian surplus pekerja yang ada tidak mempunyai alternatif lain kecuali mencari pekerjaan di sektor pedesaan.

10.3 Produktivitas dan Ketimpangan

Didefinisikan sebagai keadaan berganda atau terdiri dari dua bagian, dualisme tercermin dalam eksistensi dua sistem, yaitu sektor modern besar (wilayah inti) dan sektor tradisional kecil (wilayah pinggiran). Itu bisa terjadi di manapun, baik negara maju maupun negara berkembang. Ini hanya berbeda dalam karakteristik dan derajat. Di antara beberapa indikator dualisme ekonomi, yang paling banyak diterapkan adalah kesenjangan produktivitas atau produktivitas tenaga kerja relatif. Kesenjangan produktivitas antar wilayah dalam suatu negara menunjukkan dualisme regional, dan kesenjangan produktivitas antara usaha kecil dan besar menunjukkan dualisme bisnis.

Gambaran keseluruhan dualisme bahwa ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi di beberapa negara, dan juga kesenjangan kinerja antara usaha besar dan kecil yang tetap besar. Sumber kesenjangan produktivitas antar wilayah yang ditemukan tidak saling eksklusif. Mulai dari bauran industri, intensitas modal, investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan tingkat regulasi pasar produk dan fleksibilitas pasar tenaga kerja (OECD, 2018). Namun faktor yang lebih spesifik seperti lokasi dan institusi lokal juga penting. Sebagaimana Acemoglu dan Dell (2010) berpendapat bahwa ketersediaan barang publik lokal dan keamanan hak milik di negara berkembang yang secara signifikan menjelaskan variasi produktivitas relatif antar wilayah dalam suatu negara. Meskipun dualisme antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, perbedaan pendapatan dan upah yang terkadang digunakan sebagai ukuran alternatif pada kesenjangan produktivitas yang tetap menjadi sebagai indikator yang paling penting. Perbedaan produktivitas relatif antara perusahaan besar

dengan perusahaan kecil sangat berfluktuasi di seluruh negara. Besaran produktivitas perusahaan kecil berada pada kisaran 20-60% produktivitas perusahaan besar, meskipun jumlahnya bervariasi antar sektor.

Dualisme juga memiliki kaitan erat dengan ketimpangan. Dengan menggunakan rasio produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian dengan di bagian ekonomi yang lain sebagai ukuran dualisme ekonomi. Bourguignon dan Morrisson menunjukkan bahwa, dengan serangkaian variabel kontrol, produktivitas tenaga kerja relatif memainkan peran utama untuk menjelaskan perbedaan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang. Untuk Indonesia, produktivitas tenaga kerja relatif rata-rata selama dekade terakhir adalah sekitar 0,36 dibandingkan dengan 0,38 selama dekade 1990-an (Bourguignon & Morrisson, 1998).

Di negara-negara dengan ketimpangan antar wilayah tinggi dan kesenjangan produktivitas antara usaha kecil dan besar lebar, konsep dualisme sosial akan sangat memungkinkan. Menggabungkan antara dualisme ekonomi dan ketidaksetaraan, bagaimanapun akan menjadikan kompleksitas analisis. Dengan menggunakan kasus Indonesia, fokus analisis adalah pada ketimpangan antar daerah dan tantangan yang ada di sekitar upaya peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan utama adalah untuk memahami faktor dan kekuatan utama di balik ketidaksetaraan antar wilayah tersebut, dan alasan di balik kesulitan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Salah satu implikasi dari studi Boeke adalah perlunya mempertimbangkan karakteristik masyarakat dualistik jika ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persistensi ketimpangan antar daerah dan alasan mengapa mayoritas UMKM mengalami kesulitan untuk meningkatkan kinerja. Untuk itu, peran institusi dan modal sosial tidak bisa diabaikan. Sejauh institusi dan modal sosial yang berlaku dibentuk oleh karakteristik masyarakat, sehingga interaksi antara kebijakan dengan institusi dan modal sosial akan memungkinkan menemukan akar masalah. Agar

kebijakan menjadi efektif atau direspon positif oleh UMKM, diperlukan pemahaman yang baik tentang interaksi tersebut. Implikasinya, jika suatu kebijakan atau kerangka kelembagaan tertentu dipaksakan pada budaya lain, maka hanya sebagian yang akan diadopsi oleh penduduk yang bersangkutan.

Titik awal analisis adalah pengakuan bahwa setiap proses perkembangan memerlukan kekuatan penyebaran atau dispersi (sentrifugal) dan kekuatan konsentrasi atau aglomerasi (sentripetal). Interaksi antara kedua kekuatan tersebut akan menentukan konfigurasi aktivitas spasial. Ketimpangan antar daerah terjadi ketika gaya aglomerasi lebih kuat daripada gaya dispersi. Efek ketidaksetaraan itu mencerminkan dualisme dari segala macam. Kecenderungan kegiatan untuk berkonsentrasi didorong oleh ekonomi eksternal yang melebihi eksternalitas negatif yang disebabkan oleh konsentrasi (seperti: harga dan biaya yang lebih tinggi, kemacetan, dll). Ekonomi eksternal yang sama juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan antara UMKM dan usaha besar dengan menawarkan manfaat kepada UMKM. Jika UMKM dan usaha besar dapat bekerja melalui klaster atau beroperasi dalam jarak dekat satu sama lain, sehingga ini akan memberi dampak positif kepada UMKM.

Konsentrasi aktivitas spasial dapat menjadi mesin sosial ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan (Azis, 2020a, 2020b; Krugman, 1991; Porter, 1998). Ketika kegiatan terkonsentrasi di beberapa wilayah dalam suatu negara, efisiensi nasional meningkat, tetapi kesenjangan antar wilayah akan cenderung melebar atau ketimpangan antar wilayah akan meningkat. Oleh karena itu, keseimbangan yang dihasilkan tidak optimal. Ketika perusahaan dan kegiatan lain menggumpal di beberapa lokalitas atau suatu area dalam suatu wilayah, baik secara organik atau didorong oleh insentif yang diberikan pemerintah (misal, kawasan industri), baik pertumbuhan wilayah maupun ketidaksetaraan antar lokalitas cenderung meningkat, yang merupakan keseimbangan sub-optimal. Jadi akan terjadi

suboptimalitas yang disebabkan oleh munculnya ketimpangan atau divergensi antara inti dan pinggiran. Ketidaksetaraan yang diakibatkan konsentrasi spasial, ini tergantung pada tempat konsentrasi terjadi. Dualisme dan ketimpangan akan meningkat ketika terjadi peningkatan aglomerasi di daerah atau kawasan maju yang berada pada posisi yang lebih baik untuk menarik kegiatan baru.

Dualisme dan ketimpangan bersifat multidimensi sehingga dapat terjadi pada berbagai tingkatan, misal, antara rumah tangga kaya dan miskin, antara pedesaan dan perkotaan, antara usaha kecil dan besar, dan antara sektor tradisional dan modern. Jika, karena alasan tertentu, kegiatan terkonsentrasi di daerah yang kurang berkembang, atau, usaha kecil beroperasi dalam klaster untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi aglomerasi, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Secara definisi, UMKM sangat berbeda dari usaha besar tidak hanya dalam ukuran tetapi juga dalam hal struktur hukum, gaya manajemen, pengaturan pembiayaan, teknologi, dan ukuran pasar. UMKM juga memiliki jaringan yang terbatas untuk ekspansi (seperti: kapasitas lobi, kontak bisnis, komunikasi), dengan lokasi yang cenderung tersebar. Karakteristik ini akan mencegah UMKM untuk menikmati manfaat dari berbagai input, pengumpulan pasar tenaga kerja, dan limpahan pengetahuan atau sumber dari ekonomi aglomerasi. UMKM yang beroperasi dalam cluster akan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Apabila ekonomi eksternal terkait aglomerasi ini dapat dinikmati oleh UMKM yang beroperasi secara klaster. Ada kesamaan antara konsep kekuatan yang mengarah pada konsentrasi spasial yang diterapkan pada wilayah dan yang diterapkan pada sektor bisnis dengan ukuran yang berbeda. Penerapan konsentrasi spasial di suatu wilayah akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dengan dualisme yang lebih intens. Sedangkan penerapan konsentrasi spasial di sektor bisnis akan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi dualisme.

10.4 Dualisme Dan Perkembangan

Konsep dualisme ekonomi Boeke dipakai sebagai salah satu upaya untuk bisa menemukan diagnosis penyebab yang mendasari karakteristik dualistik dan implikasi terhadap proses pembangunan di negara-negara terbelakang. Dualisme menjadi salah satu alasan penting untuk bertahan bagi ekonomi informal di banyak negara berkembang. Hal ini juga yang menyebabkan marginalisasi dan pengucilan kelompok sosial dari kegiatan ekonomi formal (Clement, 2015).

Higgins (1966) membantah bahwa jika ekonomi statis dalam arti bahwa pendapatan per kapita tidak meningkat dan akumulasi modal berlangsung dengan lambat. Deskripsi tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan abstraksi teoretis ekonomi statis tetapi juga mengabaikan fakta bahwa ekonomi yang tidak tumbuh sebenarnya adalah kasus khusus dari ekonomi dinamika. Pandangan Itagaki (1960) bahwa yang penting untuk dianalisis adalah peran penting 'kapitalisme kolonial' yang menyebabkan 'faktor-faktor penyeimbang' yang dikemukakan oleh Myint (1964), dan 'efek backwash' yang dikemukakan oleh Myrdal (1957), keduanya dapat mempertahankan atau memperkuat dualisme awal dengan menghambat perkembangan lebih lanjut dari sektor-sektor ekonomi pribumi. Untuk menghilangkan kekuatan tersebut Itagaki menyoroti peran penting nasionalisme negara dan ekonomi.

Dualisme ekonomi yang berjalan dengan dinamika masing-masing yakni modern dan tradisional. Sudah tentu dalam dualisme itu, dinamika sektor modern lebih canggih dan cepat bergerak daripada sektor tradisional yang statis dan marginal. Beberapa pendapat ekonom telah dikemukakan tentang akibat yang kurang menguntungkan dari keberadaan dualisme tersebut terhadap kemungkinan untuk mengembangkan perekonomian, terutama untuk sektor yang menjalankan kegiatan ekonomi secara tradisional. Analisis tersebut menunjukkan bahwa ciri ekonomi

yang bersifat dualistik itu terutama dualisme sosial dan dualisme teknologi, akan menimbulkan keadaan-keadaan yang menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi semestinya. Ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini akan mengakibatkan sumber daya yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien.

Konsep dualisme terus relevan karena terkait erat dengan ketidaksetaraan. Lewis (1954) memberikan analisis secara menyeluruh dan menunjukkan bahwa perpindahan tenaga kerja dari pertanian tradisional ke aktivitas industri modern adalah yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, dualisme tidak statis. Migrasi tenaga kerja lintas sektor merupakan sumber atau mesin pembangunan ekonomi. Namun, anggapan bahwa kesenjangan antara organisasi ekonomi dan sosial, sulit untuk disangkal. Begitu juga kesenjangan pembangunan antara wilayah inti dan pinggiran. Keberadaan organisasi ekonomi dan sosial yang kontras seperti itu menjadi aspek fundamental dalam proses pertumbuhan di banyak negara dengan diiringi tren ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

Alasan mengapa penting untuk mengatasi masalah dualisme dan ketidaksetaraan adalah karena ada hubungan yang rumit dengan pertumbuhan. Sebagaimana pemikiran ekonomi klasik bahwa orang kaya ada kecenderungan menabung marjinal yang lebih tinggi daripada orang miskin sehingga tingkat ketimpangan pendapatan awal yang lebih tinggi cenderung menghasilkan tabungan dan investasi yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan lebih tinggi di lingkungan orang kaya (Kaldor, 1956). Secara agregat ketika ada ketimpangan yang lebih besar menyebabkan pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti: ketidakpastian karena penyebaran ketidakstabilan politik dan sosial, disinsentif di kalangan orang kaya untuk berinvestasi, kurangnya investasi dari orang miskin yang disebabkan oleh pasar kredit yang tidak sempurna, dan fertilitas yang lebih tinggi terkait dengan pangsa pendapatan kelas menengah yang lebih kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa ketidaksetaraan yang tinggi tidak hanya merugikan orang yang hidup dalam kemiskinan dan kelompok kurang beruntung, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Masyarakat miskin akan tumbuh lebih lambat daripada masyarakat kaya, sehingga ini mengindikasikan kurang berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, tanpa kebijakan dan institusi yang tepat, ketidaksetaraan akan mempertahankan peluang yang tidak setara dan melanggengkan perpecahan sosial. Selain itu disinyalir bahwa ketidaksetaraan yang meningkat telah menimbulkan ketidakpuasan, memperdalam kesenjangan politik dan dapat menyebabkan konflik kekerasan (UN, 2020). Apa pun kekuatan yang bekerja, ketidaksetaraan yang tinggi dan dualisme yang lebih besar cenderung memperburuk prospek pertumbuhan.

Ekonomi pembangunan harus dipahami sebagai proses sosial ekonomi yang lebih besar, tidak hanya sebagai proses ekonomi, tetapi juga mengakui karakteristik dan budaya lokal sangat penting. Ketika kebijakan dirancang sesuai dengan budaya dan karakteristik lokal, sehingga akan tercipta kesempatan untuk bekerja dan diadopsi oleh penduduk lokal. Dari perspektif ini, keberadaan dualisme tidak harus meniadakan kemungkinan pembangunan dan menolak langkah kebijakan apa pun. Selama rencana dan kebijakan dirancang dengan cermat dengan mempertimbangkan pengaturan kelembagaan yang berlaku. Ketimpangan yang tinggi menyiratkan bahwa memang ada kesenjangan antara kebijakan dan hasil.

Bukti Dualisme

Indonesia sebagai negara kepulauan terpadat keempat di dunia dengan beragam etnis sekitar 300an kelompok etnis dan bahasa lisan lebih dari 700 bahasa. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat heterogen di dunia. Keragaman Indonesia dijelaskan oleh sejarah masyarakat yang berbeda dengan perkembangan yang terisolasi, dualisme tinggi di negara dengan atribut seperti itu (Geertz, 1963). Analisis apa pun mengabaikan

implikasi dari dualisme yang melekat seperti itu kemungkinan besar terdistorsi.

Dari data makro menunjukkan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendapatan per kapita relatif meningkat secara signifikan meskipun tidak stabil karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Alasan di balik kinerja yang mengesankan tersebut berasal dari strategi dan kebijakan negara, kekayaan sumber daya alam, lokasi strategis, dan kondisi eksternal yang berkembang seperti rantai pasokan global yang meningkat, aliran modal, dan transfer teknologi.

10.5 Konsentrasi Dan Kebijakan

Analisis hasil dari interaksi antara kebijakan dan institusi melalui pendekatan yang mengaitkan konsep aglomerasi yang mengarah pada dualisme dan ketimpangan dengan kebijakan gabungan dan institusi termasuk modal sosial. Hipotesis bahwa dualisme dan ketimpangan tidak hanya sebagai hasil dari kebijakan pembangunan tetapi juga akibat dari kekuatan aglomerasi dan interaksi kebijakan dan institusi. Kebijakan saja kemungkinan besar akan gagal jika modal sosial berdasarkan institusi yang berlaku diabaikan.

Sehubungan dengan pertanyaan, intervensi kebijakan seperti apa yang dapat secara efektif melawan kekuatan aglomerasi? Lalu diikuti pertanyaan, apakah pengalihan belanja ke wilayah tertinggal/pinggiran (*Little Develop Region*, LDR) bisa efektif untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah maju/inti (*Develop Region*, DR) dengan LDR. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan informasi tentang struktur hubungan ekonomi regional dan interregional dengan menggunakan tabel *multiregional input-output ratio* (MRIO). Contoh: Indonesia yang terbagi kedalam lima wilayah: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua.

Dasar teoretis pengganda antar wilayah bersandar pada gagasan bahwa ada hubungan antara kegiatan ekonomi nasional dan ekonomi regional. Sementara pengganda dari Tabel I-O menangkap efek langsung, tidak langsung, dan induksi dari setiap perubahan di satu sektor ekonomi atas sektor lain, dengan tidak peduli terhadap lokasi sektor. Lokasi sektor tempat terjadinya perubahan awal serta lokasi kegiatan yang terkena dampak perubahan tersebut menentukan hasil bersih dari ketimpangan antar wilayah. Pengalihan investasi ke wilayah pinggiran akan mengurangi kesenjangan antara wilayah inti dan pinggiran, dengan tidak mengabaikan mekanisme multiplier antar wilayah.

Apabila akan dibangun infrastruktur utama. Proyek ini akan mendorong pertumbuhan wilayah dimana tempat proyek dilaksanakan serta pertumbuhan nasional. Tapi bagaimana dampak proyek tersebut terhadap gap antara DR (core) dan LDR (periphery). Karena DR berada dalam posisi yang lebih baik dalam fasilitas atau infrastruktur yang ada (logistik, layanan keuangan, dll.) dan daya beli yang mencerminkan kondisi pasar, sehingga keputusan berakhir dengan DR sebagai lokasi proyek tersebut. Jika berdampak ada ketimpangan disikapi dengan argumentasi bahwa proyek infrastruktur di DR tidak hanya akan mendorong pertumbuhan nasional tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan LDR, dengan mekanisme trickle down effect. Argumen ini, bagaimanapun menempatkan pertumbuhan di atas ketidaksetaraan, dan sama sekali mengabaikan ukuran relatif dari multiplier antar wilayah bila dibandingkan dengan skenario dimana proyek dibangun di lokasi yang berbeda. Artinya, bagaimana jika infrastruktur dibangun di LDR.

Skenario di mana peningkatan permintaan dan produksi di LDR menyebabkan peningkatan permintaan dan produksi yang lebih besar di DR. Hal yang sama berlaku untuk efek peningkatan pendapatan dan konsumsi (bagian dari permintaan akhir) di LDR pada DR. Tidak jarang warga LDR lebih memilih membelanjakan pendapatannya yang meningkat untuk produk dan jasa yang

diproduksi di DR. Bagaimanapun, membandingkan pengganda antar wilayah merupakan langkah penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang mengarahkan belanja ke LDR efektif untuk mengurangi kesenjangan antara inti dan pinggiran.

Mengubah struktur perekonomian suatu wilayah dan keterkaitan ekonomi antar wilayah bukanlah tugas yang mudah. Ini melibatkan perubahan dalam pengaturan kelembagaan yang melampaui masalah ekonomi. Karena efektivitas setiap intervensi kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan tersebut, artinya modal sosial memainkan peran penting. Oleh karena itu, agar suatu kebijakan efektif harus dirancang sehingga kompatibel dengan pengaturan kelembagaan yang berlaku. Melemahkan peran pengaturan kelembagaan tersebut dapat membuat kebijakan yang bermaksud baik menjadi tidak efektif, atau bahkan dapat membuat kebijakan menjadi bumerang.

Kekuatan sentripetal aglomerasi, antara lain tercermin dalam struktur perekonomian dan sifat keterkaitan antar wilayah (*interregional multipliers*). Bahkan kekuatan aglomerasi dapat berisiko memperburuk dualisme dan ketidaksetaraan. Kondisi demikian akan membatasi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, suatu kebijakan harus bisa memahami persepsi dan aspirasi UMKM untuk bertindak lebih sesuai dengan modal sosial yang berlaku. Interaksi tersebut menentukan jenis klaster yang dianggap cocok untuk mengefektifkan kerja sama dan tindakan kolektif bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing.

Dalam proses pembangunan akan melibatkan kekuatan aglomerasi dan interaksi antar wilayah. Dari perspektif ini, arah kebijakan lebih diutamakan untuk mengurangi efek kekuatan aglomerasi atau konsentrasi kegiatan yang dilakukan di daerah maju, dan mengeksplorasi kekuatan konsentrasi di usaha kecil yang beroperasi dalam jarak dekat untuk menikmati ekonomi eksternal. Kedua hal tersebut sebagai wujud upaya serius untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Tentu dengan berfokus pada

interaksi antara kebijakan dan institusi, di mana modal sosial merupakan bagian penting.

Meskipun keberhasilan UMKM, bukan karena program pemerintah. Pertumbuhan UMKM selama bertahun-tahun telah ditemukan dipengaruhi oleh faktor-faktor selain bantuan pemerintah, dan kemungkinan menerima bantuan yang berhubungan positif dengan ukuran perusahaan (Berry et al., 2001). Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memajukan UMKM. Bantuan pemerintah meliputi:

a. Keuangan

- Kredit kecil bersubsidi seperti yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) untuk petani kecil dan koperasi desa.
- Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK) untuk kepentingan umum.
- Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) untuk unit desa, Badan Kredit Desa (BKD) untuk bank pembangunan kecil pedesaan.
- Kredit Umum Rakyat (KUR) untuk UMKM (diluncurkan tahun 2007).

b. Teknis

Untuk bantuan teknis, seperti: pelatihan dan peningkatan desain produk, pemasaran, promosi, akuntansi dan pembukuan, serta penggunaan teknologi digital seperti e-commerce, fintech, dan kegiatan berbasis internet lainnya.

c. Peraturan

- Pemerintah mewajibkan bank untuk mengalokasikan 20% kredit kepada UMKM.
- Menetapkan tarif pajak yang lebih rendah atau memberikan pembebasan pajak untuk beberapa UMKM.

- Menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan lisensi dan dokumen/izin yang lain.
- Menciptakan hubungan antara UMKM dengan UMKM besar perusahaan dan kegiatan terkait yang lain (subkontrak).
- Menciptakan hubungan antara UMKM itu sendiri, dll.
- Pembuat kebijakan selalu membuat pernyataan yang mendukung operasi UMKM selama pandemi.

Beberapa langkah yang diambil sebelum tahun 2020 berlanjut dan beberapa diperluas selama pandemi, seperti pemberian program bantuan langsung tunai (BLT) untuk usaha ultra-mikro dan mikro melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan, restrukturisasi kredit dan subsidi bunga untuk usaha mikro. Penataan kredit koperasi melalui lembaga dana bergulir yang dikenal dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDBKUMKM), pemberian subsidi bunga kredit kepada koperasi, dan pemberian bantuan likuiditas kepada koperasi dengan suku bunga rendah dan mekanisme yang mudah. Upaya untuk menarik UMKM agar mengikuti program pelatihan dengan memberikan dana stimulan kepada peserta melalui Program Kartu Prakerja (program kartu pra-pekerja).

Beberapa upaya dari sisi permintaan juga telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli konsumen untuk membeli produk UMKM/koperasi, misalnya dengan mengalokasikan dana diskon untuk pembelian barang UMKM (offline dan online), membagikan voucher diskon, memanfaatkan kios/ data toko (warung) yang terhubung dengan e-commerce, menjalin kemitraan dengan sembilan BUMN (misalnya di klaster makanan), dan memanfaatkan influencer muda untuk mendorong masyarakat berbelanja produk UMKM di lingkungan sekitar. Selain

itu, untuk meningkatkan ekspor UMKM melalui acara perijodohan bisnis virtual.

Mengatasi masalah UMKM yang disebabkan karena kegagalan pasar, tidak boleh dicampuradukkan dengan tujuan lain. Bahkan jika sangat urgen harus ditangani dengan kebijakan berbeda yang dirancang khusus, bukan kebijakan untuk UMKM. Contoh, program untuk membantu UMKM sering disalahartikan dengan menargetkan lapangan kerja karena UMKM terlihat lebih padat karya. Namun, kenyataan bahwa skala perusahaan bukanlah panduan yang dapat diandalkan untuk intensitas tenaga kerja, karena banyak UMKM ternyata lebih padat modal daripada perusahaan besar di industri yang sama. Oleh karena itu, kebijakan untuk meningkatkan lapangan kerja harus terfokus pada perubahan pola permintaan yang mendukung industri padat karya daripada upaya sisi penawaran. Pelajaran penting yang lain adalah, jika tujuan tidak cukup spesifik atau terlalu ambigu, ada risiko bahwa fasilitas yang diberikan oleh kebijakan tidak akan diterima dengan baik atau bahkan dihindari oleh UMKM. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami permasalahan internal yang dihadapi oleh UMKM dan mengapa hal tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. & M. Dell. 2010. Productivity differences between and within countries. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(1), 169–188
- Azis, I. J. 2020a. *Regionaleconomics: Fundamental concepts, policies, and institutions*. World Scientific Press.
- Azis, I. J. 2020b. Regional development and noneconomic factors. In A. Kobayashi (Ed) *International encyclopedia of human geography* (2nd Ed., Vol. 11, pp. 269–274). Elsevier.
- Berry, A., Rodriguez, E., & H. Sandee. 2001. Small and medium enterprise dynamics in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(3), 363–384.
- Boeke, J. H. 1953. *Economics and economic policy of dual societies*, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem.
- Bourguignon, F. & C. Morrisson. 1998. Inequality and development: The role of dualism. *Journal of Development Economics*, 57, 233–257.
- Clement, C. 2015. The formal-informal economy dualism in a retrospective of economic thought since the 1940s. Schriftenreihe des Promotionsschwerpunkts Globalisierung und Beschäftigung, Working Paper No. 43.
- Fei, J. C. H., & G. Ranis. 1964. *Development of the labor surplus economy: Theory and policy*. Homewood, IL: Richard A. Irwin, Inc.
- Geertz, H. 1963. Indonesian cultures and communities. In R. T. McVey (Ed.), *Indonesia*. Hraf Press, Southeast Asia Studies, Yale University.
- Hayashi, M. 2000. *Support mechanisms for the development of SMEs in Indonesia, with special reference to inter-firm linkages*. Australian National University, Canberra.
- Higgins, B. 1966. Review of development of the labor surplus economy: Theory and policy, by G. Ranis & John C. H. Fei. *Economic Development and Cultural Change*, 14(2), 237–243.

- Hill, H. 2001. Small and medium enterprises in Indonesia: Old policy challenges for a new administration. *Asian Survey*, 41(2), 248–270.
- Itakagi, Y. 1960. Some notes on the controversy concerning Boeke's "Dualistic Theory": Implications for the theory of economic development in underdeveloped countries. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 1(1), 13–28.
- Jorgenson, D.W. 1961. The Development of Dual Economic. *The Economic Journal*, Vol.71, No.282, pp.309 – 334.
- Kaldor, N. 1956. Alternative theories of distribution. *Review of Economic Studies*, 23, 83–100.
<http://dx.doi.org/10.2307/2296292>.
- Krugman, P. 1991. *Geography and trade*. MIT Press.
- Lewis, W. A. 1954. Economic Development with Unlimited supplies of Labor. *Manchester school*, Vol.22. pp.139 – 191.
- Myint, H. 1964. Financial Dualism and Monetary Dependence and Independence. Chapter 5 dalam *The Economic of the Developing Countries*. Hutchinson London, pp. 69 – 84.
- Myrdal, G. 1957. *Economic theory and under-developed regions*. Gerald Duckworth & Co.
- OECD. 2018. *OECD regions and cities at a glance 2018*. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/reg_cit_glance-2018-en.
- Porter, M. E. 1998. Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–91.
- Ramanathan, R. 1966. Jorgenson's Model of a Dual Economy, An Extension. *The Economic Journal*, Vol. 76, pp. 321 – 327.
- Singer, Hans W. 1950. The Distribution of Gains Between Investing and Borrowing Countries. *American Economic Review*, Vol. 40, pp. 473 – 485.
- United Nations. 2020. *World Social Report 2020: Inequality in a rapidly changing world*. Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.

BAB 11

POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh Iwan Henri Kusnadi

11.1 Tantangan Pembangunan Daerah

Di Era reformasi dewasa ini sangat memberikan peluang besar bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dimana perubahan yang tengah terjadi dari kondisi paradigma pertumbuhan menuju pada paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil serta berimbang. Beberapa perubahan paradigma ini diantaranya diwujudkan melalui berbagai kebijakan otonomi daerah. Sebenarnya kebijakan pemberian otonomi daerah serta desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah perlu dilihat sebagai langkah paling strategis paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, bahwa otonomi daerah sekaligus desentralisasi sebagai jawaban dalam menghadapi permasalahan lokal bangsa Indonesia yakni berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemudian masalah kemiskinan, adanya ketidakmerataan pembangunan, kemudian rendahnya kualitas hidup masyarakat, serta berbagai masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kemudian yang kedua*, bahwa otonomi daerah serta desentralisasi fiskal merupakan langkah yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia untuk menyambut atau menyongsong kondisi dan era globalisasi ekonomi yakni dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Penyelenggaraan otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota ini dilaksanakan dengan langsung memberikan kewenangan hukum yang luas, nyata serta bertanggungjawab kepada seluruh pemerintah daerah secara

tepat dan proporsional. Hal ini berarti bahwa pelimpahan tanggungjawab ini akan diikuti oleh berbagai pengaturan kemudian pembagian, serta segala pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang sungguh-sungguh berkeadilan. Dengan pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi, kemudian efektivitas, serta akuntabilitas diberbagai sektor publik di Indonesia. Dapat dipahami bahwa dengan otonomi, Daerah sangat dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi berbagai potensi dan harapan dan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peranan investasi swasta serta perusahaan milik daerah didorong serta sangat diharapkan sebagai pemicu dan pemacu utama dalam pertumbuhan serta pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*) di seluruh Indonesia. Kemudian Daerah juga diharapkan dapat lebih mampu untuk menarik investor khususnya untuk mendorong berbagai pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kemampuan serta keleluasaan kepada semua daerah dalam pembangunan daerahnya diantaranya melalui usaha-usaha penting yang sejauh mungkin dapat atau mampu meningkatkan terwujudnya partisipasi aktif masyarakat. Perlu diakui bahwa pada dasarnya terkandung tiga misi utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu, yakni :

1. Bagaimana menciptakan efisiensi serta efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat

3. Bagaimana memberdayakan sekaligus menciptakan ruang bagi seluruh masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

11.2 Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kedudukan dan sebagai elemen yang penting dalam suatu organisasi. Berdasar hal tersebut, manajemen SDM diperlukan untuk mengelola secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan organisasi saat ini maupun untuk masa mendatang dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan suatu organisasi turut ditentukan dengan SDM yang bekerja di dalamnya. Demikian halnya dengan organisasi pemerintah daerah, yang membutuhkan SDM yang berkualitas agar tujuan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal. SDM yang dimaksud dalam lingkup organisasi pemerintah daerah adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

Secara khusus sumber daya manusia menyangkut penyelenggara pemerintahan di daerah, termasuk lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau dengan kata lain,

sumber daya manusia adalah para aparatur daerah. Dalam perspektif demikian, kebutuhan tersedianya sumber daya aparatur daerah yang berkualitas menjadi dasar pertimbangan utama yang memerlukan langkah-langkah prioritas yang terprogram secara sistematis. Aparatur pemerintah daerah adalah pelaksana kebijakan publik yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan wewenang di areal administrasi. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan persyaratan kualitas yang memadai bagi sumber daya manusia aparatur daerah, dan kualitas tersebut dapat diamati dari kemampuan profesionalitas sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Bambang Yudoyono, 2002:61 dalam Effendi, 2012).

Pembahasan mengenai SDM di tingkat daerah, tidak dapat terlepas dari beberapa masalah yang menyertai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kapasitas dan kualitas PNS daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat mereka berperan sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, diperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan maupun sebagai elemen dalam merumuskan ide-ide untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Aparatur yang ada di daerah akan mempengaruhi kinerja bahkan performa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan aparatur yang benar-benar memahami dan memaknai keadaan dan potensi yang dimiliki daerahnya. Sikap berpikir aparatur harus didasarkan pada kepentingan dan pengembangan daerah dengan mengutamakan potensi yang ada di daerah.

Realitas yang terjadi pada kondisi aparatur daerah saat ini adalah kurangnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam menjalankan pembangunan serta masih rendahnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat. Hal ini dapat diperkuat dengan masih adanya keluhan masyarakat, atas pelayanan yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Meminjam istilah lama, bahwa aparatur bukan lagi melayani masyarakat melainkan dilayani oleh masyarakat. Realitas ini tentunya berbanding terbalik dengan konsep yang ada.

Masih rendahnya kompetensi aparatur daerah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikaji melalui sistem rekrutmen pegawai daerah. Fenomena yang ada di daerah, masih banyaknya penyelewengan dalam sistem perekrutannya. Hal ini bahkan sudah menjadi rahasia umum, apabila seseorang ingin menjadi pegawai daerah, harus melalui “jalan belakang” dengan menyuap pihak-pihak tertentu. Kegiatan penerimaan CPNS seakan tidak bisa lepas dari beberapa penyimpangan. Hal ini terungkap dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menerima 60 pengaduan terkait penyelenggaraan CPNS tahun 2012 (informasibumncpns.com, 2012). Selain itu, masih maraknya perekrutan CPNS dengan cara *spoiled system*. Realitas ini tentunya akan semakin memperburuk mekanisme perekrutan CPNS di daerah. Sistem ini akan memperkecil peluang atau bahkan menutup peluang bagi peserta seleksi pegawai daerah yang sebenarnya memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dalam pemerintahan.

Seleksi awal atau perekrutan merupakan proses yang turut menentukan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang nantinya akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam peraturan. Apabila realitas yang ada di daerah masih demikian adanya, tentunya kapabilitas para pegawai daerah akan diragukan. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan reformasi birokrasi di level daerah serta penyediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain seleksi CPNS yang tidak akuntabel dan transparan, di beberapa daerah diketahui bahwa penempatan pegawai tidak berdasarkan pada penilaian kompetensi pegawai, bahkan

ketiadaan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masih belum dilakukan. Sebagai contoh, di instansi salah satu daerah, para pegawainya merupakan limpahan dari SKPD lain. Berdasarkan informasi yang ada, pelimpahan ini merupakan sumber daya sisa yang tidak digunakan atau tidak memiliki kompetensi spesifik di SKPD lain. Selain itu, juga terjadinya defisiensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan potensi pertambahan jumlah PNS menurut rasionalitas sebelumnya tidak terjadi ketika dihadapkan pada kebutuhan kinerja di Pemerintah kabupaten/kota (Holidin dan Hariyati, 2012).

Dibeberapa daerah, kualitas SDM yang diakui secara umum masih relatif rendah menjadi hambatan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang ditangani menjadi permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja. Kuantitas pegawai daerah juga memunculkan masalah baru, ditambah lagi dengan distribusi yang tidak merata di daerah yang bersangkutan, terutama di daerah kepulauan yang beberapa wilayahnya masih pelosok. Masalah yang timbulkan akibat kuantitas pegawai ini adalah membengkaknya pos anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD. Pos anggaran tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal, pembangunan infrastruktur maupun belanja pelayanan publik.

Kondisi yang hampir sama juga ditunjukan di suatu daerah di Indonesia. Pemerintah daerah melalui Kepala daerah membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah pengangguran melalui perekrutan pegawai honorer maupun pegawai negeri sipil. Kebijakan ini malah menimbulkan masalah baru yakni membengkaknya pos anggaran untuk belanja pegawai. Gaji atau penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehingga mereka harus mencari tambahan lain di luar tugasnya sebagai pegawai

pemerintahan. Hal ini tentunya akan membuat kinerja mereka di pemerintahan tidak optimal. Beberapa dari mereka mangkir dari pekerjaannya di kantor karena ada pekerjaan lain di luar yang harus diselesaikan. Ketika masyarakat datang untuk meminta pelayanan, tentu saja mereka tidak tertangani dengan baik.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan SDM atau pegawai tersebut, tidak dapat dibiarkan terus berlangsung yang semakin memperburuk kondisi pelayanan pemerintahan daerah sehingga harus dicari solusi terbaiknya. Hal ini mengingat, urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah memerlukan kesiapan dari pihak pemerintah daerah melalui penyelesaian masalah-masalah utama yang masih menggelayuti, salah satunya adalah mengenai SDM (pegawai daerah). Dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi, diperlukan SDM yang handal, berkualitas, berkompeten dan mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi ini mengharuskan setiap daerah memiliki formula yang jelas, transparan dan akuntabel dalam manajemen SDM daerah, mulai dari proses perekrutan hingga evaluasi kinerja pegawai. Mekanisme yang dibuat harus sedapat mungkin menutup celah terjadinya penyelewengan, terutama dalam proses awal yaitu perekrutan. Harus ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta jobdesk masing-masing dibarengi dengan distribusi pegawai yang efektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapabilitas pegawai melalui pengembangan dan pelatihan pegawai.

11.3 Potensi Kemitraan

Membangun hubungan kemitraan, bagi pemerintah daerah merupakan langkah dan program strategis yang penting dilakukan sebab tidak mungkin seluruh permasalahan dan pekerjaan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Hubungan kemitraan tersebut dapat terbangun dengan kerjasama baik dengan pemerintah daerah lain,

pemerintah pusat, pihak swasta, masyarakat maupun *stakeholder* lain. Mengingat momen otonomi daerah yang sudah dikembangkan lebih dari satu dasawarsa ini, sudah selayaknya segala urusan di daerah dapat segera diselesaikan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Berbagai masalah daerah berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan, sarana dan prasarana dan sebagainya, tidaklah mampu diatasi melalui APBD saja. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, baik sektor swasta dan sektor ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007:54).

Hal yang perlu menjadi fokus bagi pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan sektor swasta serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investor untuk berinvestasi di daerah. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan daerah untuk menciptakan inovasi serta kemampuan dalam menjalin hubungan kemitraan yang baik agar dapat mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak, baik itu pemerintah daerah sendiri maupun mitra kerjasamanya. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat meliputi berbagai sektor di pemerintah daerah, tergantung pada kebutuhan daerah untuk memberikan pelayanan dan menjalankan pembangunan di daerahnya.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menarik investor maupun pihak lain menjalin kemitraan dengan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan potensi di daerahnya atau dengan kata lain, pemerintah daerah mampu *membranding* daerahnya sehingga dilirik oleh investor-investor swasta untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Pemerintah daerah juga dapat membuka peluang berinvestasi dengan memudahkan urusan perizinan untuk membuka usaha. Hal ini mengingat masih ada atau bahkan masih banyak keluhan dari pengusaha-pengusaha dalam berinvestasi di daerah karena prosedur perizinan yang sulit serta birokrasi yang panjang bahkan

180

terjadi pemerasan terhadap pengusaha oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bukan hanya itu, kemitraan juga dapat terjalin dengan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan. Dalam hal ini, biasanya letak daerah tersebut berdekatan atau adanya perbedaan kebutuhan antar daerah sehingga dapat saling memenuhi.

Adanya urgensi untuk melaksanakan reformasi birokrasi, termasuk oleh daerah-daerah, diperlukan kesiapan dari pihak daerah dalam melaksanakan reformasi tersebut. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatasi dan memperbaiki masalah-masalah yang masih dihadapi oleh daerah hingga saat ini, termasuk permasalahan utama dalam hal kemitraan. Bukan tidak ada, atau bahkan saat ini sudah mulai banyak daerah-daerah yang dapat membuka diri untuk menjalin kemitraan dengan para *stakeholder* melalui suatu kebijakan tertentu, pun demikian tidak dapat dipungkiri pula, masih terdapat daerah-daerah yang belum efektif dan optimal dalam memanfaatkan pentingnya menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain. Kondisi tersebut apabila tidak segera diperbaiki tentunya akan menghambat pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi yang saat ini sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah.

Penilaian juga sering muncul dari kalangan masyarakat terkait kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Mereka menilai, kemitraan dengan pihak luar daerah masih belum memadai. Dalam pelaksanaan program pelatihan misalnya, masih perlu ditingkatkan kemitraan dengan pihak luar daerah dalam rangka penyaluran alumni dari program pelatihan serta dalam pengadaan sarana dan penyelenggaraan pelatihan yang memadai. Begitu pula dalam pelaksanaan program dana bergulir bagi masyarakat, diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lain guna meningkatkan kinerja dari inovasi program tersebut. Diharapkan melalui kerjasama dengan pihak lain seperti akademisi dan pihak-pihak lainnya bisa meningkatkan kinerja program di masa akan

datang bagi daerah (Prasojo, Kurniawan, dan Holidin, 2007:188-189)

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, secara pembiayaan perlu ada kerjasama bersama swasta. Sinergi yang ada antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta menjadi penting untuk kesuksesan. Hal tersebut dinilai baik mengingat dukungan dari semua kalangan memicu suksesnya pembangunan infrastruktur dari waktu-waktu mendatang. Idealnya, layak secara ekonomi dan finansial diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Untuk kontribusi pemerintah sendiri adalah dukungan pemerintah yang bisa melalui pendanaan pembebasan lahan, pembiayaan sebagian konstruksi, dan pemberian Viability Gap Fund (www.infobanknews.com, 2012).

Kegagalan dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta pernah dialami oleh salah satu daerah otonom di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur transportasi. Ada persoalan mendasar yang kemudian berimplikasi pada kegagalan kerjasama, antara lain (1) Skema kerjasama yang timpang. Hal ini misalnya dapat ditilik dari ketimpangan hak dan kewajiban antara kedua pihak; (2) Kegagalan mitra Pemkot dalam menyediakan fasilitas pendukung, padahal fasilitas tersebut dibayangkan menjadi jangkar perekonomian dan diproyeksikan memberikan keuntungan ekonomi yang besar sehingga bisa segera menutup biaya pembangunan. Selain itu, lemahnya kontrol Pemkot terhadap kinerja mitra kerjasama. Hal ini berimplikasi pada (1) keleluasaan pihak kedua dalam memodifikasi layout bangunan infrastruktur sehingga menghasilkan bentuk bangunan yang tidak efektif dan kemudian menyebabkan kesulitan akses transaksi ekonomi dan penjaminan keamanan, dll; (2) pemanfaatan bangunan infrastruktur yang tidak maksimal sehingga mengganggu sektor-sektor lain dan tidak menimbulkan *multiplier effect*; (3) Fungsi pemerintah sebagai pelindung kepentingan pedagang dan pengusaha kecil yang tidak berjalan baik. (4) lemahnya kontrol Pemkot dalam mengawasi kerjasama karena keterbatasan pegawai. Hal ini merupakan efek

182

dari perubahan kedudukan bagian kerjasama menjadi sub bagian ditengah banyaknya pekerjaan kerjasama, dan belum ditemukannya mekanisme pengawasan lintas dinas-badan yang efektif. (5) Lemahnya manajemen infrastruktur yang dibangun sebagai akibat dari lemahnya pembagian tugas dan koordinasi dari kedua belah pihak. Kegagalan kerjasama ini pada gilirannya juga menghasilkan sejumlah konsekuensi bagi pemkot, seperti beralihnya kewajiban penggajian pegawai dan pembayaran hutang kepada pemkot. Persoalan-persoalan kelembagaan dan pengelolaan juga bermuara pada ketidakefektifan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik dan fungsi komersil.

Pun demikian, menjalin kemitraan di beberapa daerah sudah berjalan dengan cukup baik dengan melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor. Misalnya seperti dalam memenuhi kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan yang optimal dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah bekerja sama dengan agensi yang konsen terhadap pemenuhan gizi anak dan balita, selain itu pemda bekerjasama juga dengan organisasi kesehatan dan kemanusiaan yang lain (Mano Deby, 2012).

Dipaparkan pula oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisty, bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat menjalin hubungan strategis dengan pengusaha untuk mendayagunakan secara maksimal potensi yang dimiliki daerah bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hambatan-hambatan yang kerap muncul di daerah, seperti hambatan struktural, perizinan, birokrasi dan lain sebagainya dapat dikurangi sehingga pengusaha lebih mudah dalam berinvestasi. Sejak pemberlakuan otonomi daerah lebih dari satu dekade lalu, dunia usaha kerap mengeluhkan tentang panjangnya jalur birokrasi pengurusan izin usaha, minimnya daya saing infrastruktur dan ketidakpastian hukum (Ihsan, 2013). Kondisi ini tentunya akan turut mempengaruhi iklim usaha di Indonesia. Tidak dipungkiri pula, kondisi yang tidak kondusif seperti demikian, akan menyebabkan pengusaha-pengusaha melirik negara lain.

Selain berperan untuk menyokong pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan serta menyediakan pelayanan bagi masyarakatnya, kemitraan penting guna mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Dikatakan pula oleh Suryo, lambannya pengurusan izin investasi di daerah karena birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menyebabkan banyak kalangan pengusaha mengaku terjebak dalam lilitan kebijakan yang dibuat oleh oknum penguasa setempat untuk mengeruk keuntungan pribadi (Ihsan, 2013).

Peran pihak swasta lebih ekspansif dalam mempercepat pembangunan. Misalnya lewat pengembangan dan pemanfaatan potensi alam. Mulai dari penambangan batubara atau perluasan lahan perkebunan sawit. Hal ini otomatis menaikkan jumlah angkatan kerja di daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah. Aspek percepatan pembangunan daerah ini tergantung pada potensi daerah itu sendiri. Menjalin hubungan dan mengundang pihak swasta untuk bekerjasama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan seyogyanya tetap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (otdanews.com, 2012).

11.4 Potensi Sumber Daya dan Prospek

Pengembangan wilayah pada hakekatnya adalah pengembangan di daerah yang bersifat menyeluruh. Artinya pembangunan tidak hanya menyentuh aspek pengembangan fisik, tetapi yang lebih prinsip adalah upaya memaksimalkan potensi sumber daya manusia agar dapat mengelola sumber daya absolut yang dimiliki daerahnya secara bijak. Kondisi sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam melakukan perbaikan dan pembangunan di banyak sektor. Terlebih lagi pada masa pelaksanaan Otonomi daerah dimana partisipasi dan kompetensi masyarakat sangat dibutuhkan dalam

merancang, menentukan kebijakan dan melaksanakan pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak (Chalid, Peni, 2005: 82-83).

Selain SDM, Sumber Daya Alam (SDA) dalam berbagai sektor merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dikembangkan dan masing-masing memiliki prospek yang menjanjikan selama daerah mampu mengeksplornya. Sektor yang paling menjanjikan misalnya sektor pertambangan, namun banyak yang perlu diperhatikan dalam mengeksplornya. Hal krusial yang harus dilakukan dalam kegiatan pertambangan adalah harus berdasarkan ketersediaan SDA. Diperlukan wawasan jangka panjang atau pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan potensi sektor pertambangan perlu memperhatikan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan), agar kelestariaannya tetap terjaga. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya tambang secara efektif dan efisien. Dapat dilihat dari tren yang terjadi di beberapa daerah masih memanfaatkan sumber daya tambang secara besar-besaran atau tidak terkendali dan dijadikan prospek utama dalam mendongkrak perekonomian daerah dan meningkatkan PAD. Namun demikian kegiatan ini tidak memperhatikan pemanfaatan untuk masa depan. Ketergantungan masyarakat yang melulu terhadap hasil tambang dikawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila hasil tambang di daerah tersebut sudah habis dan tidak dapat dieksplor lagi. Bahkan dapat dipastikan hal ini akan mengganggu kestabilan ekonomi karena beberapa masyarakat akan kehilangan pekerjaan utama mereka sebagai penambang dan juga dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat pasca aktivitas pertambangan. Kondisi ini juga akan semakin memperburuk dan menambah permasalahan di daerah.

Saat ini, beberapa pemerintah daerah memutuskan memanfaatkan cadangan tambang sebagai motor untuk menggerakkan ekonomi. Dapat disadari, cara ini merupakan

kebijakan pemerintah daerah sebagai solusi pragmatis jangka pendek untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Namun kadang kala kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lupa bahwa barang tambang adalah komoditas yang tidak terbarukan, akan habis suatu waktu. Ditambah lagi, kebanyakan pemerintah daerah mengartikan kemajuan ekonomi dengan memanfaatkan hasil eksploitasi pertambangan membiayai keperluan belanja pemerintah yang kebermanfaatannya tidak untuk jangka panjang, misalnya mendirikan gedung perkantoran atau untuk belanja pegawai. Poin utama yang perlu dipertimbangkan adalah hasil kegiatan pertambangan tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun komoditas lain yang dapat dijadikan penggerak perekonomian jangka panjang, misalnya untuk pertanian, perkebunan maupun pengembangan, permodalan dan pelatihan UMKM masyarakat daerah. Melalui hasil tersebut, seharusnya pemerintah mulai dapat menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian, perkebunan dan UMKM masyarakat daerah, tentunya akan lebih bijak apabila sesuai dengan kearifan lokal masyarakat daerah.

Ada pula hambatan yang dialami daerah, dalam hal pengelolaan dan pengembangan potensi SDA khususnya pertambangan adalah masih rendahnya kualitas SDM serta kualitas teknologi yang kurang memadai. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan informasi wilayah tentang potensi sumber daya mineral yang akurat bagi kepentingan investasi, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara baik (www.bakorsurtanal).

Masalah rendahnya kualitas SDM pemerintah salah satunya akan menyebabkan pemerintah tidak mampu memetakan potensi daerah yang dimiliki. Mereka kurang mampu melakukan analisis terhadap potensi yang ada dan tidak dapat melihat prospek jangka panjang dari potensi yang dimiliki. Upaya tersebut misalnya pembentukan instansi pemerintah (dinas/badan) yang mengurus dan bertugas mengkoordinasi pengelolaan potensi daerah. Dengan

demikian, potensi yang ada tidak dapat tergali dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Permasalahan lain yang juga muncul di daerah adalah sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta/investor dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya alam pada skala tertentu dapat menyebabkan/memicu konflik antar kepentingan sektor, swasta dan masyarakat. Kegiatan yang tidak terpadu itu selain kurang bersinergi juga sering saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif dengan kegiatan budidaya perikanan yang berdampingan. (Kusdinar, 2011).

Dalam pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam masih ada kelonggaran pengawasan, sehingga antara kedua belah pihak yakni investor dan pemerintah daerah tidak terjalin hubungan “simbiosis mutualisme” namun lebih menguntungkan pihak swasta. Hal ini juga dipengaruhi masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan dalam merencanakan pembangunan termasuk pengelolaan anggaran pada pos pendapatan daerah. Ketidakmampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sendiri berimbas pula pada masyarakat daerah asli. Investasi yang seharusnya diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian daerah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah ternyata tidak demikian adanya. Hal ini dapat didasari karena juga masih rendahnya kualitas sumber daya manusianya sehingga tidak dapat memenuhi standar minimum kemampuan yang dibutuhkan oleh investor dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, para investor ini lebih banyak merekrut SDM dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Kondisi ini pula yang ditengarai menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat asli. Potensi daerah yang kaya tidak serta merta menjadikan masyarakatnya sejahtera namun menunjukan kondisi yang sebaliknya. Masyarakat daerah tetap ada dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan bahkan semakin

terpuruk dengan banyaknya pendatang ke daerah mereka yang dari segi kapabilitas dan keahlian yang dimiliki lebih unggul dibanding mereka. Hal inilah yang hingga saat ini menimbulkan konflik di daerah dan menjadi dasar alasan munculkan potensi disintegrasi.

Dapat diambil contoh yang dialami papua. Meskipun wilayah papua memiliki sumber daya mineral logam yang penting untuk negara, tidak ada kebijakan khusus yang disiapkan pemerintah pusat terkait rencana pengelolaan pertambangan di sana. Secara umum, pengelolaan pertambangan Papua dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang ada dalam undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan aturan pelaksanaan terkait. Undang-undang yang terbit Januari 2009 itu memberi keleluasaan lebih besar kepada pemerintah daerah mengeluarkan izin pertambangan. Kewenangan ini yang kemudian oleh pengamat bahkan pejabat pemerintah Kementerian ESDM dinilai perlu untuk tetap diawasi (energytoday.com, 2013).

Kecenderungan pemerintah daerah khususnya dalam memperoleh sumber PAD terlalu fokus pada SDA yang memberikan keuntungan langsung misalnya pertambangan logam dan mineral. Ditambah lagi, hasil tambang tersebut langsung dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lebih dulu untuk meningkatkan nilai guna sehingga nilai jualnya juga lebih tinggi. Selain itu masih rendahnya kepedulian pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan SDA lain yang dapat terus diperbaharui dalam jangka panjang misalnya perikanan, pertanian dan perkebunan.

Masih jarang daerah, khususnya yang memiliki sumber daya tambang, melihat potensi pertanian, perikanan maupun perkebunan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sendiri masih kesulitan merancang kebijakan yang tepat untuk mendongkrak komoditas sektor ini. Selain itu, komoditas ini dipengaruhi pula oleh kondisi alam, misalnya di sektor pertanian dan perkebunan. Pada musim kemarau tentunya akan terjadi penurunan produksi,

hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dalam hal pengembangannya, juga diperlukan modal yang besar. Terkadang, dalam pemberian bantuan kepada masyarakat pun, tidak disertai dengan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan pun tidak memberikan kebermanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Meskipun sudah ada inovasi yang muncul dalam pengelolaan sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan di beberapa daerah, namun jumlahnya cenderung masih sedikit. Bahkan beberapa pemerintah daerah mengakui, mereka masih kesulitan dalam membantu memasarkan atau mendistribusikan produk daerah, terutama untuk ke luar daerah.

Sektor lain yang sebenarnya juga mempunyai prospek yang menjanjikan bagi daerah adalah sektor pariwisata. Setiap daerah di Indonesia, memiliki budaya lokal dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Namun apabila diamati, sebagian daerah belum mampu mengeksplor prospek pariwisata di daerahnya dengan alasan kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang. Selain itu, promosi kekayaan pariwisata juga masih kurang. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebenarnya dapat menjalin kerjasama dengan swasta.

11.5 Strategi Pembangunan Daerah

Rencana strategis suatu daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya berperan penting dalam menyukseskan tujuan otonomi daerah. Semangat reformasi birokrasi dapat tercermin dari rencana strategis yang disusun. Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun samapai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam

membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai tahun yang ditentukan.

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadi lebih memiliki legitimasi. Rencana strategis yang disusun oleh suatu daerah dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Menilik kembali maksud otonomi daerah yang ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan daerah, nampaknya hal ini tidak sepenuhnya terwujud.

Fenomena yang terjadi saat ini, partisipasi masyarakat yang diharapkan sulit terwujud, terutama dalam menyusun perencanaan strategis pembangunan daerah yang kemudian akan tertuang melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Dalam hal ini dapat dianalogikan, apabila partisipasi masyarakat masih kurang dalam proses penyusunan perencanaan strategis, maka program-program yang nantinya diciptakan dan diselenggarakan oleh SKPD-SKPD terkait jauh dari kebutuhan dan harapan masyarakat daerah.

Bentuk partisipasi masyarakat daerah yang menjadi tradisi di beberapa daerah dalam penyusunan perencanaan strategis disebut dengan musyawarah pembangunan daerah (musrenbangda). Musrenbangda diharapkan mampu menjadi sarana akumulasi penyampaian aspirasi pembangunan daerah dari masyarakat. Namun demikian, di beberapa daerah di Indonesia, musrenbangda tidak berjalan efektif. Musrenbangda masih belum bisa menjadi sarana akumulasi penyampaian aspirasi pembangunan daerah dari masyarakat, hanya menjadi penampung yang tidak selamanya dan juga hanya sebagian kecil yang

ditindaklanjuti sebagai basis perencanaan pembangunan di daerah (Holidin dan Hariyati, 2012).

Fenomena perencanaan pembangunan daerah secara nasional dikemukakan pula oleh Soedjito (2002) yaitu sebagai berikut : (1) kegiatan-kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah masih didominasi oleh kebijakan lembaga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan masyarakat; (2) para perencana pembangunan daerah masih lebih mengedepankan kepentingan instansi atasan daripada aspirasi masyarakat; (3) lemahnya para perencana pembangunan daerah maupun instansi yang lebih tinggi dalam menyerap aspirasi untuk kemudian diakomodasikan dalam berbagai kegiatan atau program pembangunan daerah ; (4) lemahnya posisi masyarakat dalam berhadapan dengan pemda pada saat proses penyusunan rencana yang mengakibatkan kurang terakomodasinya seluruh kepentingan masyarakat dalam program-program pembangunan.

Realitas perencanaan pembangunan yang ditemui di daerah menunjukkan bahwa (1) perencanaan ditetapkan kurang rasional karena usulan prioritas pembangunan tidak sebanding dengan pagu indikatif sehingga banyak program yang belum terealisasi; (2) kurangnya kualitas SDM dan rendahnya kompetensi dalam bidang perencanaan di Bappeda dan setiap SKPD serta forum delegasi Musrenbangda tingkat kecamatan; (3) pemanfaatan biaya operasional perencanaan tidak sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan perencanaan. Pelaksanaan perencanaan (Musrenbang) misalnya, dilaksanakan pada bulan Januari sedangkan biaya untuk kegiatan tersebut baru cair bulan April; (5) fasilitas perencanaan yang kurang memadai; (6) kurangnya kemampuan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Musrenbangda (Akadun, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, S. 1997. Flexibility Management: The Ultimate Strategy. *Industrial Management*, Januari/Februari, 26-31.
- Dharma. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Erlangga, Jakarta.
- Faustino C. Gomes. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Gibson, J. Ivancevich and J.M. Doneley. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Jilid 1 & 2 (Terjemahan)*. Jakarta: PT Erlangga.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. 2003. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hong Jon-Chao and Chia-Ling Kuo. 1999. Knowledge Management in The Learning Organization. *The Leadership and Organization Development Journal*, 207-215.
- Husein, Umar, 1997, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juoro, Umar. 1990. Persaingan Global dan Ekonomi Indonesia dekade 1990-an. *Prisma*. No. 8 tahun XIX.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. Otonomi Daerah dalam Transisi", pada *Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global*, 12 April. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat dan Abimanyu, Anggito. 1995. Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi. *KELOLA*, No. 10/IV.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya, Wihana. 1999. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik", *KOMPAK STIE YO*, Yogyakarta, Oktober.
- Mas'ud, Fuad. 2004. *Survey Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Mayer, J.P., Allen, N.J. Gellatly, I.R. 1994. Affective and Continuance Commitment to Organization: Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time- Lagged Relations. *Journal of Applied Psychology*, 75.
- Nasution, Anwar. 1990. Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi. *Prisma* No. 8 tahun XIX.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

BAB 12

PARSITIPASI MASARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Oleh Derizka Inva Jaswita

12.1 Pendahuluan

Parsitipasi masarakat sering menjadi perbincangan diberbagai tempat, wilayah dan manapun, baik didaerah kota maupun pedesaan, karena partisipasi memiliki pengaruh yang sangat besar, keberhasilan perencanaan suatu program ditentukan oleh bagaimana pasrtisipasi masyarakat di sekitar mereka, dengan tidak diadanya parsitipasi masarakat sebuah rencana atau kegiatan atau progam tidak akan melangkah dengan baik, karena keikutsertaan masyarakatlah yang dibutuhkan dalam perencanaan sebuah program. Setiap progam–progam di susun sehingga berhubungan erat oleh sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena dengan demikian seluruh masarakat diminta agar dapat berpasitipasi pada setiap pembangunan.

Kesadaran setiap warga masyarakat yang memiliki minat dan kepentingan yang sama dalam partisipasi memiliki peranan penting dalam melaksanakan setiap program. Parsitipasi masarakat dengan melaksanakan setiap progam pembagunan tentunya menginginkan pemahaman setiap rakyat masarakat dengan memiliki tujuan dan keperluan yang sama melalui cara yang benar sehingga dapat ekonomis/efisien baik dari segi pendanaan, serta mengena/epektif dari haasil yang diperoleh. Dalam memilih strategi pembangunan tersebut tentunya menentukan bagaimana peranan pemerintah dan peranan masarakat, dimana diantara dua pihak tersebut dapat menjalankan

perannya dengan maksimal serta bersinergis, terdapat beberapa program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, seperti menyediakan air bersih yaitu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membantu kesadaran masyarakat dalam menyediakan air bersih, hal ini tentunya program penyediaan air bersih sangat diperlukan oleh warga masyarakat karena masyarakat bisa menggunakan air yang bersih untuk minum. Untuk itu dengan dalam rangka meningkatkan kesehatan serta kebersihan lingkungan hal ini menjadi perhatian dan utama keberhasilan satu program dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program agar dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut :

- Program harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat
- Program harus memiliki tujuan yang jelas
- Program memiliki rencana evaluasi dan pengawasan
- Program harus mengikutsertakan masyarakat mulai awal proses *planning, actuatuig* dan *evaluation*
- Program dibuat serta dirancang keberlanjutan dengan waktu yang lama agar lebih efektif dibandingkan program yang dibuat dalam waktu jangka pendek.
- Pelaksanaan program harus memiliki sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan tepat sasaran.

Setiap program tentunya harus memiliki tujuan yang dapat menjelaskan tentang hasil yang diperoleh setelah melaksanakan program tersebut. Hal ini tentunya memiliki beberapa prinsip tujuan yang harus dimiliki , diantaranya adalah :

- Tujuan harus memiliki rumusan yang jelas
- Tujuan menggambarkan mengenai situasi serta perubahan perilaku yang sesuai harapan

- Tujuan diharapkan membawa perubahan perilaku yang sesuai harapan dan dapat diukur dengan target pencapaian hasil yang telah ditetapkan
- Tujuan yang jelas dan telah dirumuskan dengan baik harus dipahami oleh warga masyarakat yang menjadi sasaran khususnya juga oleh staf sendiri
- Tujuan menjadi panduan atau pedoman bagi setiap pelaksanaan program
- Tujuan harus sesuai dengan jenis program yang akan dilaksanakan.

Parsitipasi masarakat dalam pengembangan juga merupakan usaha dengan menjaga kelebihan atau kekuatan masarakat dengan membuat perencanaan suatu pembangunan yng berhubungan degan kekuatan keahlian/sumberdaya daerah brdasarkan pengamatan musawarah, dengan meningkatkan ide-ide seperti kebutuhan nyata serta keinginan yg terdapat didalam masarakat, meningkatkan dorongan dan fungsi masyarakat dan perencanaan proses pembangunan, serta meningkatkan tali persaudara dan mempunyai diantara komunitas masarakat pada setiap progam yg sudah dirncanakan .

12.2 Parsitipasi masarakat

Konsep awal parsitipasi masarakat didalam pembangunan dikenal pemerintah mulai tahun 1980 dengan katalain pembrdayaan masarakat. Dimana masarakat diperlukan agar bisa ikutserta berpartisipasi saat membangun dan menjaga lingkungan dimanapun mereka berada. Menurut Slamet (Suryono 2001:124) parsitipasi masarakat dalam pembangunan diartikan “merupakan turut sertanya masaarakat saat pembangunan, turut saat program pembangunan dan turut serta digunakan serta turut merasakan hasil-hasil pembangunan”.

Terdapat beberapa tujuan dari partisipasi masyarakat yaitu dengan turutserta masyarakat saat penanganan lingkungan hidup dan turutsertakan masyarakat saat setiap pembangunan negara serta turut mendukung pemerintah dalam memperoleh kebijakan serta ketetapan yang tepat serta lebih baik. Menilai hasil partisipasi masyarakat dalam dan partisipasi dalam menerima hasil pembangunan, menurut Isbandi (2007:27) yaitu “keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”.

Usaha pemberdayaan masyarakat merupakan pengelolaan pembangunan yang harus dibangun dengan berorientasi pada potensi dan melibatkan masyarakat untuk mengarah pada kemandirian masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara aktif pada pembuatan perencanaan pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi perhatian penting yang dapat dijadikan tolak ukur kemampuan masyarakat agar berinisiatif dan dapat menikmati hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan meningkatkan dan memotivasi munculnya sikap partisipasi dan keikutsertaan, oleh karena itu perlu dipahami oleh setiap pengembang masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat maupun individu.

12.2.1 Fungsi dan Manfaat Partisipasi masyarakat

Carter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1989) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005) merinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi warga masyarakat menjadi sesuatu aturan/kebijakan
- 2) Partisipasi warga masyarakat menjadi sebuah cara/strategi
- 3) Partisipasi warga masyarakat menjadi suatu media komunikasi

- 4) Parsitipasi warga masarakat menjadi suatu media menyelesaikan maslah
- 5) Parsitipasi warga masarakat menjadi suatu usaha pemulihan

Menurut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) mengatakan bahwa manfaat dari parsitipasi masarakat adalah seperti :

- 1) Menjadi masarakat yg memiliki pertanggung jawaban dan peluang saat berpasitipasi program masyarakat, sehingga dapat membuka cara pandang pikiran dan mempertimbangan kepentingan masyarakat dibandingkan memikirkan kepentingan sendiri, dengan demikian mempunyai karakter/sifat tanggung jawab dengan mementingkan keperluan bersamaa.
- 2) Menjadi cara pembelajaran dengan memiliki keahlian keikutsertaan dengan berpasitipasi dengan cara psikologis dapat menjadi dan memberi kepercayaan yang lebih baik lagi untuk bisa berpasitipasi untuk program-program lainnya.
- 3) Menimalisir perasaan terasing, karena dengan menjadi masyarakat yang aktif berpasitipasi saat sebuah program maka seorang tidak merasakan asing sehingga merasakan bagian dari masyarakat tersebut.
- 4) Memperoleh dukungan serta perolehan perencanaan pemerintahh pada saat masyarakat melibatkan diri kepada cara atau strategi perolehankeputusan yang nantinya akan berpengaruh ada kehidupan-nya, dimana mereka akan mempunyai keyakinan dan akan memperoleh hasil sebuah keputusan tersebut. Sehingga progam parsitipasi masarakat dapat meningkatkan legalitas serta kemampuan dari perencanaan kebijakan publik, selain itu dapat meningkatkan keyakinan masarakat atas proses politik yang telah dijalankan oleh para pengambil keputusan.
- 5) Menciptakan kesadaran politik, atas parsitipasi masarakat tingkatdaerah dengan pendidikan yang terlihat oleh parsitipasi yang ada/terjadi, masyarakat dapat belajar mengenai

demokrasi. Dengan kata lain bahwa seseorang tidak hanya belajar membaca atau menulis dengan kata-kata saja, melainkan dengan melakukan atau melaksanakannya. Seperti dengan terus melakukan praktek pemerintahan dalam lingkup kecil akan membuat masyarakat belajar untuk mempraktekan dalam lingkup yang jauh lebih besar lagi.

- 6) Setiap ketentuan yang diperoleh mulai dari hasil partisipasi merupakan keperluan serta harapan masyarakat ternyata dengan berpartisipasi masyarakat dapat memberikan penyaluran yang cukup rata dari profit pembangunan yang akan diperoleh, Oleh sebab itu jarak keperluan yang cukup banyak terdapat pada cara dari perolehan ketentuan.
- 7) Sebagai asal informasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, selain itu pada kondisi khusus masyarakat bisa menjadi ahli yang baik dikarenakan memiliki dan berlatih dari keahlian atau kepandaian yang diperoleh sehari-hari. Lebih uniknya lagi partisipasi tersebut masyarakat bisa mengganti keahlian daerah yang bernilai yang tidak atau tidak juga dipunyai oleh ahlinya yg lain, maka dari itu dari keahlian atau kepandaian tersebutlah harus terdapat dalam proses penyusunan ketentuan.
- 8) Merupakan suatu komitmen sistem demokrasi, setiap program partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang membuka bertambahnya/meningkatnya akses masyarakat kedalam sebuah cara perolehan ketentuan.

12.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat pada pembangunan dibagi menjadi 3 tahap menurut Ericson dalam Slamet (1993), diantaranya :

- 1) Partisipasi pada tahapan perencanaan, dimana tahapan partisipasi ini seperti keterlibatan seseorang dalam tahapan penyusunan suatu perencanaan serta strategi dalam

menyusun kepanitiaan serta biaya atau anggaran pada suatu program /project.

Masyarakat yang berpartisipasi secara bersungguh-sungguh dengan menghadiri pertemuan serta ikut menyatakan pendapat, usulan, penilaian pada pertemuan.

- 2) Partisipasi pada tahapan implementasi, dimana tahapan ini seperti keterlibatan seseorang dalam tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan suatu kegiatan atau project. Warga masyarakat disini bisa memberikan tenaga, baik materi maupun material dan pikiran-pikiran merupakan bentuk nyata partisipasi suatu kegiatannya tersebut.
- 3) Partisipasi di tahapan pendayagunaan, dimana tahapan ini seperti keterlibatan seorang dalam tahapan pemanfaatan suatu kegiatan atau project setelah project tersebut telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan, selain itu partisipasi ini bisa berwujud tenaga, dan materi atau uang yang digunakan untuk mengoperasikan serta memelihara project yang dibangun.

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1998) yang meliputi :

- 1) Ide – Ide atau pikiran –pikiran, jenis partisipasi pada tahapan pertama yaitu menggunakan ide dan pikiran seseorang atau kelompok dengan tujuan mencapai sesuai yang yang diharapkan.
- 2) Tenaga, jenis partisipasi pada tahapan kedua yaitu dengan mengupayakan seluruh tenaga yang dimiliki baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai sesuai yang diharapkan.
- 3) Ide – Ide serta tenaga, jenis partisipasi pada tahapan ketiga yaitu dengan melakukan secara bersamaan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya ; partisipasi yang berada pada suatu lembaga atau partai.

- 4) Skill atau keahlian, jenis partisipasi pada tahapan keempat yaitu merupakan unsur yang paling di inginkan karena dapat menentukan suatu tujuan sesuai keinginan.
- 5) Barang, jenis partisipasi pada tahapan kelima yaitu dilakukan dalam wujud barang guna membantu untuk mencapai hasil yang sesuai harapan.
- 6) Materi berupa uang, jenis partisipasi pada tahapan ke enam yaitu menggunakan uang untuk alat mencapai sesuatu yang diharapkan. Partisipasi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat kalangan atas.

Menurut Konkon dan Suryatna (1978) bahwa partisipasi dapat diwadahi dalam bentuk :

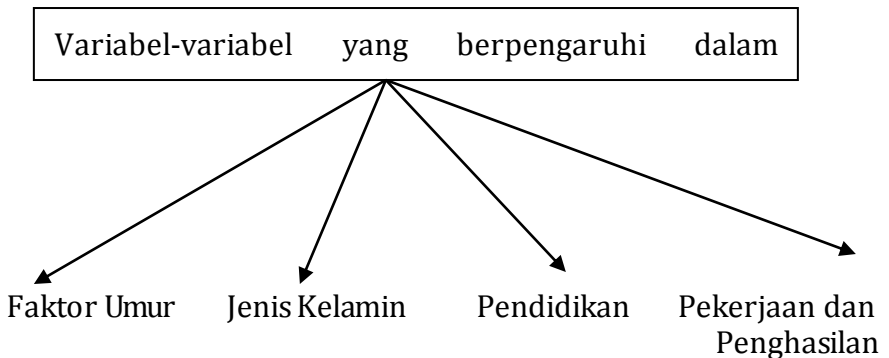
- 1) Ide – ide serta buah pikiran melalui forum diskusi, penyuluhan, rapat dan seminar
- 2) Tenaga, yang bisa diwujudkan dalam bentuk gotong royong
- 3) Materi dan material atau berupa harta benda
- 4) Skill atau keahlian (keterampilan)

Tahapan-tahapan ini sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena pada dasarnya bentuk wujud dari tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi tiga bagian diawali dengan wujud sumbangan persepsi, materi dan keikutsertaan masarakat pada kelompok projek. Parsitipasi masarakat menurut Taufiqullah (2007) pada bentuk sumbangan energi/tenaga diartikan sebagai gambaran pasitipasi masarakat dengan kemampuan berpasitipasi. Sedangkan menurut Davis dan Newstrom (1989) mengatakan salahsatu hakikat parsitipasi merupakan keikutsertaan artinya adanya keikutsertaan mental dan emosional dibandingkan aktivitas fisik. Dengan kata lain partisipasi sukarela lebih baik dan jelas dibandingkan partisipasi mobilisasi. Jika menurut Mubyarto (1984) mengenai parsitipasi masarakat dalam pembangunan diartikan dalam bentuk kesediaan untuk membantu berhasilnya

setiap program sesuai kemampuan masing-masing individu tanpa mengorbankan kepentingan individu itu sendiri.

12.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut (Slamet, 1993) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sebuah program dimana sifat dari faktor-faktor tersebut bisa mendukung keberhasilan suatu program akan tetapi ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan suatu program, contohnya yaitu faktor usia, keterbatasan materi berupa harta benda, pendidikan serta pekerjaan dan penghasilan. Pada intinya partisipasi yang tumbuh didalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Faktor –faktor apa saja yang cenderung biasanya mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi diantaranya ;



Keterangan :

Faktor Umur, berdampak perilaku individu pada program – program kemasyarakatan yang ada. Mulai dari masyarakat golongan umur menengah ke atas yang memiliki keterkaitan adat/akhlak dari nilai dan norma norma masyarakat yang lebih baik, sehingga cenderung lebih banyak yang ikut berpartisipasi dibandingkan dari kelompok usia yang lain.

Jenis Kelamin, Kultur lama menyatakan bahwasanya tempat perempuan yaitu mengatur tempat tinggal namun tetapi semakin lama munculah kultur dan nilai baru mengenai fungsiperempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi serta pendidikan perempuan kini yang semakin membaik.

Pendidikan, merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk dapat berpartisipasi, karena pendidikan dapat mempengaruhi perilaku hidup seseorang terhadap lingkungan sekitar,hal ini tentunya dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat.

Pekerjaan dan Penghasilan, Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, setiap pekerjaan menentukan pendapatan yang akan didapat. Pekerjaan dan pendapatan yang cukup dapat memberikan semangat seseorang untuk partisipasi setiap program program masyarakat. Intinya setiap kegiatan butuh partisipasi yang didukung oleh perekonomian yang cukup.

Beberapa point yang bisa berpengaruh pada parsitipasi masarakat dalam pembangunan yaitu seperti tingkat pendidikan, kemampuan dari membaca dan menulis, mengatasi kemiskinan, serta percaya oleh diri sendiri, menterjemahkan sesuatu yang berkaitan terhadap agama merupakan kecendrungan dalam menyalahkan arti motivasi, tujuan serta keperntingan organisasi suatu penduduk biasanya menuju kepada munculnya pendapat yang salah terhadap harapan dan dorongan juga organisasi penduduk seperti yang terjadi di banyak dan diantara negara serta tidak diperolehnya peluang untuk berpartisipasi dari banyaknya program pembangunan.

12.2.4 Tahapan Parsitipasi Masarakat

Ada delapan (8) tahapan partisipasi yang berdasarkan ukuran kekuatan masyarakat yang mempengaruhi perencanaan. Menurut Sherry Arnstein, 4 Juli 1969), Adapun 8 tahapan tersebut adalah :

- 1) Kecurangan
- 2) Terapi/Penyembuhan
- 3) Laporan/Keterangan
- 4) Dialog/diskusi
- 5) Penentruman
- 6) Kerjasama
- 7) Wewenang kekuasaan
- 8) Pengamatan Masyarakat

Kecurangan merupakan tingkatan level yang paling bawah, dimana hanya digunakan untuk sebatas pemberian persetujuan, dan partisipasi masyarakat dalam hal ini sebenarnya kebanyakan tidak ada yang tulus sehingga dijadikan alat dan digunakan sebagai publikasi dari pihak atas atau penguasa, Terapi atau penyembuhan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, sehingga banyak para pakar menggunakan masyarakat seperti proses penyembuhan atau terapi pasien, selain itu masyarakat yang terlibat dalam suatu kegiatan pada faktanya kegiatan itu lebih banyak mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk kepentingan pemerintah.

Laporan, menjadi hal yang utama dan penting dalam melaksanakan partisipasi masyarakat, contohnya dengan memberikan informasi ke masyarakat mengenai hal-hak dan tanggungjawab serta berbagai pilihan. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi sering pemberian informasi tersebut hanya satu arah saja, dimana dari pemegang kekuasaan kepada masyarakat bawah tanpa menggunakan feedback atau kekuatan bernegosiasi masyarakat. Dimana masyarakat cuma mempunyai peluang yang sangat minim buat memengaruhi sebuah rencana.

Konsultasi, merupakan salah satu tahapan penting ke arah partisipasi penuh dari masyarakat, hal ini mengundang pendapat masyarakat sesudah menyampaikan laporan mereka. Walaupun sering terjadi komunikasi dua arah, proses ini tahapan kesuksesannya cukup rendah karena tidak ada garansi bahwa perhatian dan pikiran masyarakat akan diperhatikan. Cara yang sering dipakai yaitu survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan mendengarkan masukan dengan masyarakat.

Penentruman, tahapan ini masyarakat pada mulanya memiliki macam-macam pengaruh walaupun masih terdapat macam-macam perihal yang masih tetap ditunjuk oleh pihak yang memiliki pemegang kekuasaan. Kenyataan pada pelaksanaannya terdapat anggota masyarakat di anggap mampu dituangkan sebagai anggota dalam badan kerjasama pengembangan masyarakat yang anggotanya terdiri wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun pendapat dari masyarakat memang dipandang sesuai dengan keperluannya, akan tetapi suara masyarakat sering tidak dihiraukan atau didengar karena dianggap rendah kedudukannya, dimana jumlahnya dianggap sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

Kerjasama, tahapan ini didasarkan atas persetujuan bersama, kekuasaan dapat dibagi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Hal ini disetujui dan disepakati bersama agar dapat membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan kesepakatan atau keputusan serta penyelesaian masalah. Banyak kesamaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

Pelimpahan kekuasaan, tahapan ini masyarakat memberikan kewenangan dalam memberikan suatu keputusan lebih banyak pada rencana atau program tertentu. Dimana dalam menyelesaikan beberapa perbedaan yang ada, pemegang kuasa mengadakan negosiasi kepada masyarakat serta tidak diperkenankan memberikan penekanan –penekanan dari atas, sehingga

masyarakat diberikan hal dalam membuat suatu keputusan dalam perencanaan yang nantinya ditetapkan dari pemerintah.

Pengawasan Masyarakat, tahapan ini masyarakat mempunyai kekuatan dalam mengkoordinir kegiatan atau kelembagaan yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memiliki wewenang dan bisa mengadakan negosiasi kepada pihak – pihak eksternal yang akan melakukan perubahan. Perihal ini maka usaha yang berkaitan dengan masyarakat langsung berhubungan dengan sumber sumber dana guna memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Pointnya masyarakat mempunyai kekuasaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan.

12.2.5 Teori Partisipasi : Konsep Parsitipasi masarakat dalam Pembangunan Menurut Para Ahli

Pendapat Hetifah (dalam Handayani 2006 :39) tentang “parsitipasi merupakan keikutsertaan individu dengan cara kemauan sendiri tanpa tekanan serta jauh dari pemerintah kepentingan pihak luar”.

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi dominan pada alat sehingga diartikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, selain itu partisipasi juga dianggap media pertumbuhan kohefisisitas diantara masyarakat, dimana warga masyarakat serta pemerintah melakukan penggalangan tumbuhnya rasa memiliki serta tanggungjawab dengan program yang dilaksanakan.

Saat ini yang menjadi kunci dari setiap program pengembangan masyarakat, seakan-akan menjadi “tampilan baru” yang harus ada disetiao rumusan kebijakan dan kegiatan proyek. Pada pengembangannya banyak diucapkan dan ditulis berkali kali akan tetapi jarang diparaktekan, sehingga makna yang ada hilang. Partisipasi sama dengan keikutsertaan , peran serta dan

keterlibatan dimana terjadinya proses saling memahami, merencanakan, menganalisis serta melakukan tindakan dari sejumlah beberapa anggota masyarakat. Terdapat tiga tradisi konsep partisipasi bila dihubungkan dengan pembangunan masyarakat secara demokratis, menurut Slamet (2003:8) diantaranya yaitu :

- 1) Partisipasi politic
- 2) Partisipasi sosial
- 3) Parsitipasi masarakat

Dari ketiga tradisi tersebut bahwa partisipasi politic lebih dominan mempengaruhi wakil wakil rakyat yang terdapat di dalam lembaga pemerintah dibandingkan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan itu sendiri, Partisipasi sosial lebih dominan menempatkan sebagai kelompok yang memperoleh keuntungan, atau sesuatu yang dilaksanakan untuk memperkokoh bagaimana cara belajar dan mobilisasi social, dimana tujuan utama dari proses sosial itu sendiri bukan dari kebijakan publik akan tetapi bagaimana keterlibatan suatu komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih mengarahkan sebagai proses pembelajaran dan mobilisasi sosial, Partisipasi warga lebih mengarahkan langsung kepada warga untuk segala pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Saat ini partisipasi warga telah beralih konsep partisipasi dimana dari hanya kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulia dengan berbagai macam keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijakan serta pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka, hal ini tentunya berbeda dengan pasrtisipasi sosial, karena partisipasi warga lebih berorientasi pada kegiatan dalam menentukan pada kebijakan publik. Seperti yang telah dijelaskan partisipasi sebagai masyarakat pembangunan dianggap hanya menjadi masyarakat sebagai objek semata.

Satu permasalahan dan kritik yang ada yaitu bahwasanya masyarakat merasa belum memiliki dan sedikit acuh dengan program atau kegiatan pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat merupakan bagian pembangunan yang wajib diperlukan sehingga masyarakat bisa memiliki peran secara aktif mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai pengawasan hingga evaluasi pembangunan.

Partisipasi tidak saja salah satu tujuan dari pembangunan sosial akan tetapi bagian yang integral pada proses pembangunan sosial. Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan eksistensi manusia sepenuhnya, dimana sebuah tuntutan akan partisipasi masyarakat terus berjalan bersamaan kesadaran antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam hal ini penyusunan perencanaan partisipatif adalah proses dari program pembangunan yang memang benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat yang dilakukan dengan diskusi suatu kelompok masyarakat dengan fokus dan terarah.

Komunitas strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, permasalahan, hambatan dan keperluan masyarakat setempat, sehingga merupakan skala prioritas, dan bersifat diterima oleh masyarakat luas dan dianggap pantas dipercaya sehingga dapat dilaksanakan kegiatan atau program pembangunan baik secara efektif dan efisien, dengan kata lain distribusi dan alokasi faktor produksi bisa dilaksanakan secara optimal dan maksimal, begitu juga tercapainya tujuan serta bertambahnya produksi dan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja atau berkurangnya pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan dibuat oleh masyarakat sendiri, dimana pada kenyataan dan prakteknya agar masyarakat dapat terlibat secara langsung, hal ini tentunya keikutsertaan masyarakat dan tenaga kerja daerah, kontraktor daerah yang memenuhi syarat. kemudian

guna untuk menjamin hasil pekerjaan bagaimana bisa terlaksana tepat waktu, tepat mutu serta tepat sasaran, keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan juga benar dilibatkan secara nyata sehingga peran partisipasi masyarakat dilibatkan mulai dari bagaimana menyusun program dan mengimplementasikan suatu program sampai dengan pengawasan serta pelaksanaan. Program pembangunan ini akan terlaksana baik secara efektif dan efisien.

Setelah menjelaskan semua tentang pengertian dari partisipasi masyarakat yang telah diuraikan diatas, pointnya adalah bahwasanya partisipasi masyarakat merupakan peran serta/keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat baik secara aktif baik secara moral maupun materil, yang bersama sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan dimana didalamnya menyangkut kepentingan individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya keikutsertaan dan peran masyarakat sangat penting didalam setiap bentuk kegiatan pembangunan, karena dengan dukungan masyarakat yang sama sama berinteraksi bisa memberikan harapan ke arah berhasilnya suatu program atau kegiatan.

12.3 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Arti dari perencanaan pembangunan merupakan satu proses dimana terdapat proses beberapa alternatif atau keputusan yang berupa data, fakta yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu susuna kegiatan / aktivitas kemasyarakatan baik yang sifatnya fisik ataupun non fisik dengan harapan dan tujuan yang lebih baik. Sedangkan pengertian dari perencanaan merupakan suatu konsep yang terencana, tersusun secara berurutan oleh suatu badan tertentu untuk tercapainya suatu tujuan. Perencanaan juga bisa dikatakan pemilihan dan penetapan kegiatan, seperti apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan oleh siapa yang melakukannya.

Pembangunan adalah suatu perubahan kearah yang lebih baik yang dilakukan secara terencana, selain itu pembangunan juga bisa dikatakan pembaharuan dari suatu bentuk perubahan kearah yang diinginkan atau dikehendaki akan tetapi yang berhubungan dengan nilai atau sistem nilai. Melihat dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pembangunan merupakan suatu perumusan penyusunan langkah-langkah atau tahapan –tahapan yang melibatkan beberapa faktor didalamnya untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Suatu perencanaan pembangunan dapat dikatakan tepat pada sasaran dan bisa dilaksanakan baik dan bisa bermanfaat hasilnya jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat dua point yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah:

Pertama : Diperlukan sikap penerimaan terhadap keinginan yang disampaikan masyarakat, serta tanggap dengan kebutuhan masyarakatnya. Artinya pemerintah harus mengetahui apa saja yang diperlukan dari masyarakatnya sehingga mendengarkan apa masukan yang disampaikan dari masyarakat tersebut.

Kedua : Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah harus melibatkan masyarakat dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Artinya pemerintah harus bisa menyesuaikan masyarakat sebagai subject pembangunan, tidak hanya sebagai object pembangunan.

Parsitipasi masarakat Dalam Pembangunan

Didalam Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan memiliki peran penting, dimana dalam Undang—Undang tersebut berisi tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Selain itu juga terdapat empat pasal Undang-Undang mengenai pendekatan partisipatif masyarakat yaitu diantaranya

- 1) Pasal 2
- 2) Pasal 5
- 3) Pasal 6, dan
- 4) Pasal 7

Didalam Undang Undang 25/2004 mengatur tentang sistem perencanaan dan bagaimana aturan pelaksanaan dalam penerapan bermacam pendekatan melalui Top Down (atas bawah) serta Bottom Up (bawah atas) sehingga lebih ditekankan cara aspiratif dan partisipatif.

Melihat dengan munculnya kegiatan – kegiatan partisipatif dapat memberi dan membuka peluang secara langsung ke masyarakat untuk dapat berpartisipasi pada rencana yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat serta secara langsung turut ikut melaksanakan sendiri sehingga bisa merasakan dan mendapatkan hasil dari program tersebut. Bukan saja UU No.25 Tahun 2004 melainkan ada peraturan ‘perundangan undangan’ yang lainnya yang membahas serta menekankan pentingnya parsitipasi masarakat didalam perencanaan pembangunan yaitu ;

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pentingnya keterlibatan masyarakat luas dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya pada prinsipnya yaitu harus berorientasi ke bawah dengan melibatkan masyarakat, dengan cara memberikan kepercayaan atau semacam wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Karena dengan begitu pemerintah dapat dan mampu menyerap aspirasi masyarakat luas, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat mendorong dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kebanyakan. Selain itu juga masyarakat harus bisa menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibimbing dan disiapkan agar dapat menyusun sendiri masalah – masalah yang ada serta dihadapi, menyusun tahapan-tahapan yang dibutuhkan, melakukan perencanaan yang telah disusun serta diprogramkan, menerima hasil produk serta memelihara program yang telah disusun dan dilakukan.

Dalam teori ilmu pengetahuan mengenai pembangunan saat ini menjadikan masyarakat pemeran utama pembangunan. Maksudnya, pemerintah bukan lagi sebagai provider dan pelaksana, akan tetapi disini pemerintah dianggap dan berperan sebagai fasilitator dan kalisator dari permasalahan gerakan pembangunan, baik dari awal merencanakan sampai melaksanakan, masyarakat memiliki wewenang dalam melibatkan diri dan memberikan saran serta mengambil suatu keputusan untuk dapat memenuhi hak – hak dasarnya, seperti saat memulai dan melalui proses musyawarah dalam merencanakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Yuwono, Teguh. 2001. *M Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University

BIODATA PENULIS



Eko Sudarmanto

Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia

Penulis lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doktoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta, SMA Negeri Simo Boyolali, SMP Muhammadiyah 6 Klego Boyolali, dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali. Pelatihan dan sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified of Sharia Fintech (CSF)*, dan *Certified Fundamental Tax (C.FTax)*. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia, yang sebelumnya sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta (> 25 tahun) dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry-Tangerang. Email penulis: ekosudarmanto.umat@gmail.com.

BIODATA PENULIS

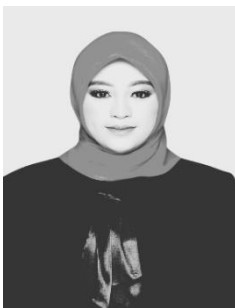


I Nyoman Wahyu Widiana, S.E., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana dan Universitas Mahendradatta

I Nyoman Wahyu Widiana, pria kelahiran Sanur, 25 April 1994. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini menamatkan S1 Ekonomi Pembangunan tahun 2015 dan S2 Ilmu Ekonomi tahun 2018 di Universitas Udayana, dengan predikat Cumlaude Lulusan Terbaik. Penulis kini tengah menyelesaikan S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan Universitas Mahendradatta. Penulis menyukai kesenian dan kebudayaan sejak remaja ini mengantarkannya mengikuti pertukaran pelajar dan kebudayaan mewakili Indonesia pada ajang Asia Student Summit di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2018. Saat ini penulis menjabat menjadi Kepala Prodi S1 Manajemen Universitas Mahendradatta dan Ketua BUMN CSR Provinsi Bali. Penulis aktif sebagai pembicara pada setiap kegiatan, termasuk Pembicara Nasional Literasi Digital Keminfo 2021. Penulis berkomitmen dapat berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Besar harapan penulis untuk dapat memajukan generasi emas penerus bangsa melalui tulisannya.

BIODATA PENULIS



Diana Kartika Dewi, S.E., M.Si

Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Bukittinggi pada tanggal 21 April 1989. Penulis merupakan salah satu Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang pada tahun 2011 dan studi S2 pada Program Magister Ekonomi Universitas Andalas Jurusan Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada tahun 2018. Selain itu penulis juga merupakan Tutor pada kelas Tutorial Online Universitas Terbuka sejak tahun 2019 sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Misfi Laili Rohmi, M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung

Penulis lahir di Pringsewu tanggal 29 Maret 1989. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung tahun 2006 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Lampung pada tahun 2006. Penulis adalah ibu dari 2 (orang) anak, mempunyai moto hidup bekerja dan bermanfaat bagi orang banyak.

BIODATA PENULIS



Fitri S. Kasim, S.E., M.P. W

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli

Penulis lahir di Luwuk tanggal 22 Maret 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (2015) dan melanjutkan S2 pada Pembangunan Wilayah konsentrasi Perencanaan Pembangunan Regional (2019) di Universitas Tadulako. Email penulis fitris.kasim@gmail.com

BIODATA PENULIS



Tri Widayati

Staf Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang, tanggal 28 April 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang, dan melanjutkan jenjang S2 pada Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis melanjutkan program Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2017. Penulis mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Mikro, Matematika Ekonomi, Ekonomi Makro dan Ekonomi Manajerial.

BIODATA PENULIS



Dr. Rina Arum Prastyanti, SH.MH
Dosen Fakultas Hukum dan Bisnis
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Penulis lahir di Kota Surakarta pada 6 Desember 1978, Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum dan melanjutkan S2 pada Hukum Bisnis dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum. Saat ini penulis aktif diberbagai organisasi seperti Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Komisariat II Surakarta menjabat sebagai wakil Ketua bidang Kerjasama dan aktif juga sebagai Pendiri Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beberapa buku juga sudah diterbitkan seperti Hukum Perlindungan konsumen, legal drafting, kewarganegaraan, etika profesi dan beberapa buku lain.

BIODATA PENULIS



Fikriyatul Falashifah, S.Si., MDevStud
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Fikriyatul Falashifah adalah seorang fulltime staf di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Salatiga dan seorang *part time freelance writer*. Lahir di Batang, 1 Januari 1992. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor dan S2 di Victoria University of Wellington, New Zealand dengan Beasiswa LPDP Kemenkeu. Penulis pernah menjalani magang di *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan mengerjakan proyek penelitian tentang Emisi Karbon di Katingan, Kalimantan Tengah. Selain menekuni dunia kepenulisan, ia juga bercita-cita untuk menjadi Dosen atau seseorang yang *concern* di dunia pendidikan, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) untuk turut serta memajukan sektor pendidikan di masa yang akan datang. Terhubung dengan Fikriyatul via email: fikriyatulfalashifah01@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Pati tanggal 10 Pebruari 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan menyelesaikan S3 pada Jurusan Ilmu Ekonomi. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S. Sos, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Penulis merupakan Dosen Bidang Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesiaa, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Lokakarya tertentu.
Email: iwanhenri01@gmail.com

BIODATA PENULIS



Derizka Inva Jaswita.,S.Ikom.,M.M

Dosen Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang

Penulis lahir di Jakarta tanggal 14 Desember 1985. Penulis adalah dosen tetap pada program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Komunikasi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen. dan telah memiliki banyak pengalaman bekerja di beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan perbankan. Penulis menekuni bidang Menulis agar dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.